

SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI DALAM DINAMIKA POLITIK KERAJAAN BANJAR ABAB XIX.

Oleh : Dr. Ahmad Suriadi, MA

A. Latar Belakang Masalah

Struktur politik di kerajaan di Nusantara, yang berbentuk Kesultanan pada abad XIX pada umumnya di bawah kendali raja (*King centrist*). Raja/Sultan adalah aktor politik, pemilik otoritas tertinggi/mutlak. Demikian juga struktur politik di Kerajaan Banjar pada abad XIX tidak jauh berbeda dengan Kesultanan Islam lainnya di kawasan Nusantara. Sultan Banjar memiliki otoritas penuh, dalam menentukan garis-garis kebijakan politik dan dalam menggunakan instrument-instrumen politik untuk melaksanakan kebijakan Kesultanan.

Hal yang sedikit membedakan antara Kerajaan Banjar dengan kerajaan lain di Nusantra adalah adanya lembaga musyawarah yang disebut “Dewan Mahkota”¹ yang anggotanya terdiri dari kerabat (bubuhan) raja-raja, kelompok kerabat istana. Lembaga ini sudah muncul sejak abad ke 17 di

Kesultanan Banjar yang diketuai oleh Mangkubumi. Penjabat ini biasanya sangat mengetahui tentang persoalan-persoalan politik, ekonomi dan sosial budaya. Tidak Heran jika mereka dapat mempengaruhi Sultan dan pada suatu situasi tertentu dapat merebut kedudukan Sultan.

Pangeran Tamjidillah yang bergelar Sultan Sepuh adalah seorang mantan Mangkubumi Kesultanan Banjar pada masa Pemerintahan Sultan Hamidulllah (1700 M-1734 M). Ketika Sultan Hamidullah wafat, Pangeran Tamjidillah ditunjuk sebagai Wali Putera Mahkota Pangeran Aliuddin Aminullah. Pangeran Tamjidillah adalah adik dari Sultan Hamidullah atau Paman (*Paanang*) dari Pangeran Aliuddin Aminullah. Pangeran Tamjidillah mengangkat dirinya sebagai Sultan Banjar.

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari² datang ke Banjar Kalimantan Selatan pada pertengahan abad XVIII dalam situasi Kesultanan berada di bawah kekuasaan Dinasti Baru serta struktur dan sistem politik “terpusat” di tangan Sultan. Oleh karena itu untuk mengkaji hubungan, posisi dan peran Syekh Muhammmad Arsyad al-Banjari dalam dinamika interaksi kekuasaan di Kesultanan Banjar memerlukan

¹ Dewan Mahkota ini diketuai oleh Mangkubumi dengan empat deputi. Yaitu : Pangiwa, Panganan, Gampiran, dan panumping. Keberadaan dewan mahkota tentunya tidak selalu ada dan sama, baik bentuk maupun personilnya tergantung kebijakan sultan yang berkuasa saat itu. Lihat. J.J. Ras, *Hikayat Banjar : A Study in Malay Historiography*, (Martinus Nijhoff : The Hague, 1968) hlm.233. A.A. Cense, *De Kroniek Van Banjarmasin*, Poetschiff, CA. Mess Santpoort(NH), hlm. 109. Dan Idwar Shaleh, *Papper Trade and the Rulling Class of Banjarmasin in the Seventeenth Century*, (Leiden : Duchth-Indonesian Historical Conference, 1978). Lihat pula Milner AC, *Islam and Malay Kingship*,

(JRAS, 1981) Dan *Islam and The Muslim State*, dalam M.B. Hooker (ed), *Islam in South East Asia*, (Leiden : Brill), hlm. 23-49

² Untuyk biografi lengkap Muhammad Arsyad al-Banjari, lihat, Zamzam, *Syekh Muhammmad Arsyad*. Jusuf Halidi, *Ulama Besar Kalimantan : Sech Muhammad Arsyad al-Banjari*, (Martapura : Yayasan al-Banjari, 1968). Tamar Djaja, *Sjeh M. Arsyad al Banjari, dalam Puistaka Indoensia*. (Djakarta : Bulan Bintang, 1965) Shagir Abdullah, *Syekh Muh. Arsyad al-Banjari, Matahari Islam*, (Pontianak : al Fathanah, 1983). Abu Daudi, Maulana Sekh Moh. Arsyad al Banjari Pelopor Dakwah Islam di Kalimantan Selatan, “*Mimbar Ulama*”, (Vol 6, 1976), hlm.69-79

pemahaman yang mendalam. Karena idiom “Politik/Kekuasaan “ terkadang tersamakan oleh realitas pertentangan elite politik (bangsawan). Untuk itu konsep ilmu politik (kekuasaan) dengan segala aspeknya perlu dilihat sebagai alat untuk menganalisis hubungan interaksi ulama dengan Raja/Sultan dalam konteks sistem kekuasaan kerajaan Nusantara ini, khususnya Kerajaan Banjar.

Kesultanan Banjar pada awal abad XVIII dipandang sebagai Kerajaan bebas dan berhasil mengalahkan penetrasi asing dalam bidang ekonomi yang terbukti dengan adanya pelabuhan Kerajaan Banjar sebagai pusat perdagangan lada³ Keadaan ekonomi dan politik yang stabil pada abad XVIII itu sangat mendukung bagi Kesultanan Banjar untuk mengirim putera terbaiknya, yaitu Arsyad seorang anak angkat Sultan Hamidullah (1700 M-1734 M) untuk belajar keluar negeri di Mekkah dan Madinah. Arsyad (Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari) dibiayai oleh Sultan (Kesultanan) sejak berangkat sampai pulang pada masa Pangeran Tamjidillah yang bergelar Sultan Sepuh (1734 M-1759 M).

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari disambut oleh Sultan Banjar dengan penuh suka cita Syekh Arsyad al-Banjari dan dikawinkan dengan cucu Sultan yang bernama Ratu Aminah. Sultan juga meminta dibuatkan sebuah kitab yang kemudain dikenal dengan kitab *Sabilal-al Muhtadin*⁴ Sultan memberikan hadiah tanah di daerah Martapura yang sekarang disebut “Dalam Pagar”⁵

Gambaran tersebut memberikan makna bahwa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari telah memberikan visi pada Sultan untuk mewujudkan masyarakat Islam dalam kerangka kedaulatan Kesultanan Banjar. Disamping *Political Will* Sultan untuk melakukan kebijakan pemerintahan yang memberikan ruang bagi perkembangan agama Islam, hal ini dikemudian hari berujung pada berjalannya sistem pemerintahan yang stabil. Di sisi lain Karisma Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bersinar dan menggema di wilayah Kerajaan Banjar. Hal ini dikarenakan dia mampu secara tepat menempatkan diri dan posisi dalam memainkan peran dalam arus politik Kekuasaan kerajaan Banjar yang saat itu sangat terpusat pada Sultan/ Raja sehingga beliau dapat menjadi media komunikasi kepentingan antara rakyat dan Kerajaan (Sultan).

Jika dikaji secara makro maka strategi dakwah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari agar misi dakwahnya dapat tercapai, maka yang dilakukan oleh Beliau dengan cara mendekati Sultan terlebih dahulu, baru kemudian memberikan pemikiran-pemikiran konstruktif demi kebaikan pemerintahan Kerajaan/Kesultanan. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah ulama yang benar-benar arif/bijaksana dan dapat diterima oleh semua kalangan elite bangsawan Kesultanan Banjar termasuk Sultan Sendiri. Lambat laun perjuangannya mendekati garis birokrasi kerajaan berimplikasi pada dapat diterimanya secara pribadi

³ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indoensia Baru : 1500-1900 dari Emperium sampai Imerium*, Jilid I (Jakarta : Gramedia, 1987), hlm.25

⁴ Kitab ini sebagai salah satu karya monumental Muhammad Arsyad al-Banjari yang berisikan tentang hukum Islam (fekih)

⁵ Kampung ini terletak di daerah Martapura Kabupaten Banjar kira-kira satu setengah jam perjalanan darat dari kota Banjarmasin sekarang ini.

dan pemikiran beliau di kalangan bangsawan dan lapisan masyarakat bawah.

Ambary memberikan penjelasan bahwa di dalam cerita sejarah yang termaktub pada naskah-naskah abad XVII-XIX tampak peranan ulama, wali dan penyebar Islam berfungsi sebagai pendukung legitimasi kekuasaan Raja. Legitimasi tersebut dilakukan dengan melalui isyarat-isyarat geneologis maupun kesinambungan keturunan yang diperlukan.⁶ Hal ini dilakukan dalam kerangka menciptakan transformasi yang baik tanpa halangan yang berarti bagi perkembangan Islam yang didakwahkan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, agama Islam yang disebarkan beliau ternyata mampu dicerna dan terima oleh masyarakat segala kalangan tanpa menimbulkan persoalan baru, khususnya yang terkait dengan benturan antara penguasa dan masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan hubungan antara Sultan dan rakyat, maka dapat dikatakan bahwa misi dakwah yang dikembangkan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dapat berjalan dengan baik tanpa rintangan politik, karena jika Sultan merestui berarti secara politis telah menjadi putusan tertinggi yang wajib didukung oleh siapapun termasuk kerabat (*bubuhan*) Raja.

Legitimasi pihak Kesultanan bagi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari berarti kemenangan politik dakwahnya untuk menumbuhkembangkan tatanan masyarakat Islami. Meskipun Pangeran Tamjidillah tentunya mengharapkan

legitimasi politik untuk kekuasaannya. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah anak angkat Sultan Hamidullah atau saudara angkat dari Putera Mahkota. Dalam Dinamika internal kerajaan, khususnya intrik-intrik yang terjadi dalam pergulatan kekuasaan Kerajaan Banjar. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memiliki berbagai pertimbangan taktis dan bijaksana. Sebagai Arifi Billah Beliau lebih mengedepankan kemaslahatan umat atau kepentingan yang lebih besar daripada persoalan-persoalan “Tahta” yang cuma bermanfaat bagi elite Bangsawan kesultanan saja.

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang bergelar “Tuan Guru” adalah refleksi peran ulama pribumi (lokal) Banjar yang menjadi Tokoh berpengaruh. Dirinya dipandang sukses untuk menerapkan ilmunya di negeri sendiri. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memiliki persyaratan lengkap untuk memberikan legitimasi bagi Kesultanan/Kerajaan Banjar, “Ulama Lulusan Mekah” dan “Anak angkat Sultan Hamidullah”. Status Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mewakili “*achieved status*” dan “*Discribed Status*” sekaligus. Pendeknya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara ulama dengan umara, antara ulama dengan masyarakat dan antara umara dengan rakyat Banjar.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian historis dengan judul Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Dalam dinamika Politik Kerajaan Banjar pada Abad XIX.

⁶ Lihat Hasan Muarif Ambary, *Dinamika Sejarah dan Sosialisasi Islam di Asia Tenggara Abad 11-17 M*, (Jakarta : Depdukbud, 1997), hlm.32-33.

B. Rumusan Masalah

Maksud penelitian ini adalah analisis terhadap posisi dan kedudukan ulama di tengah masyarakat dan interaksinya dalam sistem politik Kerajaan Banjar. Kajian interaksinya dilihat dalam perspektif peran yang dilakukan dalam menjalankan *amar ma'ruf nahi mungkar* dan hubungannya dengan daya tawar (*bargaining position*) yang dimilikinya dalam konteks dinamika politik kerajaan Banjar pada abad XIX.

Penegasan waktu tersebut dilakukan mengingat penelitian ini adalah penelitian sejarah yang membutuhkan kepastian kejadiannya. Dipilihnya abad XIX dikarenakan pada saat tersebut peran ulama Banjar cukup dominan dan mempunyai nilai yang strategis dalam hubungannya dengan dinamika politik Kerajaan Banjar, pada saat situasi dan kondisi ini muncul ulama yang bernama Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang mempengaruhi terhadap dinamika politik kerajaan Banjar tersebut.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut

1. Mengapa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berpengaruh dalam kekuasaan politik Kerajaan Banjar. ?
2. Bagaimana hubungan Syekh Arsyad al-Banjari dengan sistem politik kerajaan Banjar ?

3. Faktor apa yang mempengaruhi interaksi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dengan elite Kerajaan Banjar ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam dinamika politik di Kerajaan Banjar Abad XIX
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dengan sistem Politik di Kerajaan Banjar Abad XIX
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dengan dinamika politik Kerajaan/Kesultanan Banjar.

Sedangkan kegunaannya dimaksudkan adalah bahwa sejarah tentang hubungan ulama dengan penguasa setempat menarik untuk ditulis (dikaji) kembali. Mengingat banyak tulisan-tulisan yang dengan masalah tersebut hanyalah membahas aspek umum yang lebih terbatas pada hubungan ulama dan panutannya (pengikutnya), maka kajian ini memiliki jangkauan yang lebih luas, yaitu dinamika politik kerajaan Banjar dengan peran tokoh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di dalam mengimplementasikan dakwah Islam di tengah dinamika politik kerajaan yang sangat terpusat (sentral) pada Sultan / Raja. Sehingga diharapkan memperkaya kajian historiografi sejarah Islam lokal secara khusus dan secara umum kajian historiografi Islam Nusantara.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai hubungan ulama dan kekuasaan di tengah proses panjang Islamisasi di Nusantara telah dilakukan oleh sarjana Indonesia maupun luar negeri. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh HJ. De Graaf dan TH. Pigeaud tentang *Kerajaan Islam Pertama di Jawa Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI* dan Slamet Muljana tentang *Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbul Negara-Negara Islam di Nusantara*. Di samping ada juga yang lebih menekankan kajian pada aspek biografis tokoh-tokoh serta ajarannya dan pendekatan filologis atas karya-karya ulama yang hidup antara abad XVII sampai abad XIX seperti disertasi Nabilah Lubis tentang Syekh Yusuf di Makasar⁷.

Adapun studi yang lebih memperhatikan aspek-aspek sosialogis dari gerakan keagamaan kaum ulama tampaknya baru dilakukan pertama kali oleh Sartono Kartodirdjo dalam karyanya *The Peasants Revolt of Banten in 1888*, memfokuskan penelitiannya pada gerakan sosial keagamaan dalam pengertian umum. Tetapi jelas bahwa kaum ulama khususnya guru tarekat memainkan peran penting dalam pemberontakan masyarakat Banten.

Azyumardi Azra⁸ dalam penelitian mengemukakan pada bab VI beliau memaparkan beberapa tokoh ulama Banjar tentang bagaimana jaringan keilmuan para ulama tersebut dengan dunia Timur Tengah sebagai pusat kajian keilmuan Islam dan bagaimana peran mereka dalam berinteraksi dengan

keadaan sosial budaya setempat di dalam upaya menyebarkan paham keagamaan yang mereka anut dan diyakini. Dan Martin Van Bruinessen dalam bukunya *Tarekat Naqsyabandiyah* memberikan ulasan pentingnya peran tokoh ulama Banjar dalam menyebarkan Islam pada abad XVII-XIX di daerah Banjar. Penelitian secara spesifik tentang masyarakat Banjar dilakukan oleh Alfani Daud dalam disertasinya, *Islam dan Masyarakat Banjar Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Disertasi ini ditulis melalui pendekatan antropologi Budaya tentang sistem dan ritualitas keagamaan masyarakat Banjar.

Abdurrahman MH juga melakukan penelitian tentang masyarakat banjar melalui pendekatan sosio-hukum dalam beberapa karya beliau seperti *Studi Tentang Undang-Undang Sultan Adam 1835 M : Suatu tinjauan Tentang Perkembangan Hukum dalam Masyarakat di Kerajaan Banjar pad XIX*. Dan Tim Peneliti IAIN Antasari Secara Khusus meneliti tentang Syekh Muhammada Arsyad al-Banjari dari perspektif Biografis melalui kajian teks terhadap sumber karya-karya Beliau.

Adapun peneliti dalam hal ini lebih menitik beratkan pada aspek peran dan posisi beliau sebagai ulama dalam dinamika politik Kesultanan Banjar pada abad XIX dalam interaksi antara ulama dan umara dalam perannya membangun dan menyebarkan Islam ditengah masyarakat Banjar.

E. Kerangka Teori

Indonesian Ulama in The Seventeenth and Eighteenth Centuries. Dan diterjemahkan Beliau sendiri dengan Judul : Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII-XVIII (Bandung : Mizan, 1988),

⁷ Lihat Disertasi Nabilah Lubis, *Syek Yusuf al-Taj al Makasari, menyingkap intisari Segala Rahasia* (Bandung : Mizan, 1977) cet-2, hlm. 95-99

⁸ Lihat Disertasi Azyumardi Azra, *The Transmission of Islamic Reformation to Indonesia : Networks of Middle Estern and Malay-*

Dalam strata sosial terdapat kelompok elite yang mempunyai kedudukan (*status*) dan Peran (*role*)⁹. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan Sosial bisa dilihat dari dua sisi, yaitu, pertama : *Ascribed Status* : kedudukan ini diperoleh disebabkan oleh aspek keturunan. Hal ini dapat ditemukan dalam masyarakat yang masih bersifat feodalistis dan tertutup. Kedua : *Achieved Status*¹⁰ adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha disengaja sehingga terjadi kompetisi dan dinamika dalam masyarakat.

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*) antara status dan peran tidak dapat dipisahkan, namun peran lebih menunjukkan pada fungsi kedudukan dalam penyesuaian dalam dinamika masyarakat. Kadang-kadang perubahan struktur masyarakat suatu kelompok masyarakat menyebabkan fasilitas kekuasaan politik maupun yang lainnya bisa bertambah. Namun kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) dalam proses dinamika masyarakat akan menimbulkan konflik baik antara kedudukan (*status*) dan peranan (*Role*). Dalam realitas kedudukan (*Status*) dan peranan (*role*) sangat terkait dengan persoalan kekuasaan (*power*) dan wewenang (*authority*)¹¹. Max Weber menjelaskan ada tiga jenis wewenang, yaitu : ***Karismatik, tradisional dan rasional***¹². Wewenang Karismatik

dikarenakan kemampuan khusus yang ada pada seseorang melalui keyakinan dan kepercayaan para pengikutnya terhadap tokoh karismatik tersebut, karena hubungan timbal balik yang sangat erat antara sang tokoh dengan pengikutnya. Wewenang tradisional dikarenakan aspek geneologis yang sering terjadi pada masyarakat yang bersifat feodalistis di mana elite bangsawan masih mempengaruhi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat tersebut. Wewenang Rasional dikarenakan adanya usaha seseorang melalui persaingan masyarakat sangat terbuka dan demokratis dikarenakan karena kualitas individu berdasarkan karena faktor pendidikan seseorang maupun lainnya didasarkan atas hukum yang berlaku dan jelas dalam sistem masyarakat yang terbuka dan demokratis tersebut.

Dalam sejarah tradisi politik masyarakat Melayu Nusantara, Raja/ Sultan merupakan figure dan lembaga sentral dalam sistem pemerintahan. Hal jelas ini tersebut dalam Kitab *Sulalatin al-Salatin* bahwa raja/sultan adalah wakil Tuhan di dunia ini¹³. Juga seperti yang dinyatakan oleh al-Gazali dan al Mawardi.¹⁴ Jika diteliti naskah-naskah dari abad XVII-XIX tampak bahwa ulama wali dan penyebar Islam berfungsi sebagai pendukung legitimasi kekuasaan Raja/Sultan. Legitimasi tersebut antara lain dilakukan melalui isyarat geneologis maupun kesinambungan keturunan. Ini perlu dilakukan oleh para ulama agar transformasi Islam tidak

⁹ Selo Sumardjan dan Suliaman Soemardi : *Setangkai Bunga Sosiologi*, Edisi I (Jakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi, 1964), hlm, 255

¹⁰ Roucek dan Warren, *Sociology : An Introduction* (Littlefield : Adam & Co. Patterson-New Jersey, 1962) hlm. 60. Lihat juga Ralph Linton, *The Study Of Man an Introduction* (New York : Appleton Century. 1959) hlm. 105

¹¹ Karl Mannheim. *Freedom, Power and Democratic Planning* (Chicago : Chicago University Press, 1950). Hlm. 41-76

¹² Max Weber, *Essay*. Hlm. 150 -152. Dan lihat juga Ralph Schroeder, *Max Weber and The Sociology of Culture* (London : Sage Publication) hlm. 181-192

¹³ A, Samad Ahmad, *Sulalatin al-Salatin*, (Kuala Lumpur :Dewan Pustaka Dan Kementerian Pelajaran Malaysia, 1984) hlm. 190

¹⁴ Lihat Al Ghazali, *Al-Tibr al-Masbuk fi al-Nashihah al-muluk* (Kairo TP. 1327 H), hlm. 40-41. Dan Al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyah* (Mesir : Musthafa al Baby al-Halaby, 1973) hlm. 80-84

menimbulkan kekacauan dan disharmoni dalam masyarakat, sebagaimana dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di daerah kesultanan Banjar. Hal ini berdasarkan fakta bahwa pada masa pemerintahan Sultan Adam muncul undang-undang yang menyatakan bahwa pemerintahan Kerajaan Banjar berdasarkan syariat Islam. Juga munculnya *Mahkamah Syariat* atas inisiatif beliau.

Dalam proses analisis fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian ini, peneliti tidak bisa melepaskan diri secara teoritik pandangan Max Weber, al-Ghazali dan Al-Mawardi sehingga diharapkan dan menjelaskan bagaimana kedudukan (*status*) dan peran (*role*) Syekh. Muhammad Arsyad al-Banjari dalam dinamika politik Kerajaan Banjar pada abad XIX secara komprehensif berlandaskan historitas dengan teknik analisis sejarah yang bersifat prosedural dan struktural.

F. Metode Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan analisis sejarah ulama Banjar, yakni Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan hubungan dengan Kerajaan/Kesultanan Banjar. Dengan demikian upaya merekonstruksi masa lampau dari obyek yang diteliti itu dapat ditempuh melalui metode sejarah. Sartono Kartodirdjo menekankan bahwa dalam penelitian yang perspektif dan berorientasi sejarah, maka bahan dokumentasi memiliki peranan metodologis yang sangat penting.¹⁵ Pernyataan ini memeberikan isyarat, bahwa metode sejarah akan pentingnya sebuah sumber sebagai

bahan dokumentasi sejarah. Maka dalam penelitian akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Langkah Pertama** : melihat kehidupan sosial keagamaan masyarakat Banjar pada abad XIX, meliputi kondisi geografis, latar belakang sosial budaya dan gerakan keagamaan. Untuk mengetahui kondisi geografis, digunakan beberapa dokumen Pemerintah Hindia Belanda yang tersimpan pada Arsip Nasional, yaitu : *Borneo Zuid En Oostklist*, yang berisikan politik *Verslagen*, yang merupakan hasil laporan Residen Borneo yang menjelaskan aspek-aspek keadaan daerah secara keseluruhan. Beberapa aspek tersebut meliputi : Pemerintahan, sosial budaya, khususnya gerakan keagamaan dan berkas perjanjian Pangeran Soeryanata dengan Pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, digunakan pula *Naskah Lambung Mangkurat* yang memuat bukti arkeologis dan naskah kuno yang berbahasa Banjar lainnya yang tersimpan di Perpustakaan Wilayah Pemprov Kalimantan Selatan.
2. **Angkah Kedua** : untuk mengetahui latar belakang Kerajaan Banjar, struktur pemerintahan dan persaingan internal kerajaan Banjar digunakan *Naskah Hikayah Banjar dan Hikayat Lambung Mangkurat*. Selain menggunkan naskah tersebut, peneliti melihat berbagai peninggalan sejarah, seperti Keraton Kesultanan Banjar di Kabupaten Banjar Martapura dan beberapa makam raja di Kuin Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin. Untuk mengetahui interaksi elite Kerajaan Banjar dengan Ulama Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari pada masanya digunakan

¹⁵ Lihat Sartono Kartodirdjo “ *Metode Penggunaan Dokumen*” dalam Koentjaraningrat (ed) *Metode-Metode Penenlitan Masyarakat* (Jakarta : Gramedia 1977) hlm. 62

berbagai dokumen antara lain *Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835*. Dalam undang tersebut diketahui hukum Islam sebagai sumber hukum yang digunakan, dan dokumen pendirian *Mahkamah Syari'ah* yang dilakukan oleh Syekh Muhammad al-Banjari.

3. **Langkah ketiga** : untuk mengetahui kedudukan (*status*) dan peran (*role*) tokoh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, digunakan dokumen biografi dan karya ulama tersebut seperti misalnya kitab *Sabilal Muhatadin*, juga naskah perang perang *De Kroniek Van Banjarmasin, Bajarmasinche Krijg Van 1859-1863* dan beberapa naskah yang ditulis para pakar menyangkut tentang Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Setelah data dan dokumen didapatkan, peneliti juga melakukan observasi sekaligus wawancara dengan para ahli waris yang ada di Kabupaten Banjar Martapura.
4. **Langkah keempat** : adalah membuat konstruksi dan analisa terhadap data yang diperoleh. Dari proses pemetaan data dan analisa tersebut pada akhirnya ditemukan kesimpulan sebagai akhir proses penelitian ini.

G. Sistematika Penelitian

Penyajian penelitian ini berisikan lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan. Di dalamnya menguraikan hal pokok mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan. Hasil penelitian disajikan dalam empat bab berikutnya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Pada Bab dua Sejarah Kerajaan Islam Banjar, dikaji beberapa sub Bab meliputi terbentuknya kerajaan Banjar, Raja-Raja Banjar dan sistem Pemerintahan

Kerajaan/Kesultanan Banjar, Masa Kejayaan, dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Banjar. Bab Tiga Biografi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, yang meliputi Masa Kecil, Menimba Ilmu di Mekah, Relasi dan Eksistensinya dengan Kerajaan/Masyarakat, Karya-Karyanya. Bab empat Syekh Muhammad Arsyad al- Banjari dan Kekuasaan yang berisikan Interaksi dengan Kekuasaan, Faktor yang Mempengaruhi. Bab Lima. Penutup yang berisikan Kesimpulan dan saran-saran penelitian ini.

BAB II.

Sejarah Kerajaan Islam Banjar

A. Sejarah berdirinya Kesultanan Banjar

Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam terbesar di Kalimantan yang dapat mempersatukan beberapa kerajaan kecil di wilayah Kalimantan seperti Kerajaan Paser dan Kutai di Kalimantan Timur, Kerajaan Kotawaringin di Kalimantan Tengah, serta Kerajaan Qodriah, Kerajaan Landak, dan Kerajaan Mempawah di Kalimantan Barat. Kerajaan Banjar juga mempunyai sejarah cukup panjang, karena diawali dari masa yang jauh sebelum masuknya pengaruh Islam, yaitu masa yang ditandai dengan berdirinya Candi Laras dan Candi Agung pada masa Hindu-Budha.¹⁶

Sesuai tutur Candi dalam Hikayat Banjar versi II, di Kalimantan telah berdiri suatu pemerintahan dari dinasti kerajaan

¹⁶(<http://banuahunjungtanah.wordpress.com/category/sejarah-banjar>)

(keraton) yang terus menerus berlanjut hingga daerah ini digabungkan ke dalam Hindia Belanda pada 11 Juni 1860 M:

1. Keraton awal disebut Kerajaan Kahuripan.
2. Keraton I disebut Kerajaan Negara Dipa.
3. Keraton II disebut Kerajaan Negara Daha.
4. Keraton III disebut Kesultanan Banjar.
5. Keraton IV disebut Kerajaan Martapura
6. Keraton V disebut Pagustian¹⁷

Menurut pakar sejarah masuknya Islam ke Kerajaan Banjar terdapat dua pandangan. *Pertama* : kalangan yang mengatakan bahwa Islam masuk sebelum pasukan Demak tiba di di Kerajaan Banjar; *kedua*, : pandangan yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Kerajaan Banjar setelah Kerajaan Daha berhasil direbut oleh Pangeran Samudera bersamaan dengan bantuan pasukan militer Kerajaan Islam Demak.¹⁸ Pada awalnya pemukiman penduduk diperkirakan terkonsentrasi di desa-desa besar, di kawasan pantai dan kaki Pegunungan Meratus yang lambat laun berkembang menjadi kota-kota bandar yang memiliki hubungan perdagangan dengan India dan Cina. Dalam perkembangan selanjutnya konsentrasi penduduk juga terjadi di aliran Sungai Tabalong.

Pada abad ke 5 M, diperkirakan telah berdiri Kerajaan Tanjungpuri yang berpusat di Tanjung, Tabalong. Jauh beberapa abad kemudian, orang-orang Melayu dari Sriwijaya banyak yang datang ke kawasan ini. Mereka memperkenalkan bahasa dan kebudayaan Melayu sambil berdagang. Selanjutnya terjadilah

asimilasi dengan penduduk setempat yang terdiri dari suku Maanyan, Lawangan dan Bukit. Maka, kemudian berkembang bahasa Melayu yang bercampur dengan bahasa suku-suku daerah setempat yang kemudian membentuk bahasa Banjar Klasik¹⁹.

Untuk mengetahui sejarah Banjar lebih lanjut, dapat dilacak pada historiografi tradisional Hikayat Lambung Mangkurat, atau Hikayat Banjar. Berdasarkan sumber tersebut, di daerah Banjar telah berdiri Kerajaan Hindu, yaitu Negara Dipa yang berpusat di Amuntai. Kemudian berdiri Negara Daha yang berpusat di daerah sekitar Negara sekarang. Menurut Hikayat Banjar tersebut, Negara Dipa adalah kerajaan pertama di Kalimantan Selatan.

Cikal bakal Raja Dipa bisa dirunut dari keturunan Aria Mangkubumi. Ia adalah seorang saudagar kaya, tapi bukan keturunan raja. Oleh sebab itu, berdasarkan sistem kasta dalam Hindu, ia tidak mungkin menjadi raja. Namun, dalam pratiknya, ia memiliki kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki oleh seorang raja. Ketika ia meninggal, penggantinya adalah Ampu Jatmika, yang kemudian menjadi raja pertama Negara Dipa. Untuk menutupi kekurangannya yang tidak berasal dari keturunan raja, Jatmika kemudian banyak mendirikan bangunan, seperti candi, balairung, keraton dan arca berbentuk laki-laki dan perempuan yang ditempatkan di candi. Segenap warga Negara Dipa diwajibkan menyembah arca ini.²⁰ Ketika Ampu Jatmika meninggal dunia, ia berwasiat agar kedua anaknya, Ampu Mandastana dan Lambung Mangkurat tidak menggantikannya, sebab mereka bukan keturunan raja. Tapi kemudian, Lambung Mangkurat berhasil mencari

¹⁷ Lihat Hikayat Banjar versi II

¹⁸ Lihat Khairuzzaini. 2011. *Islamisasi Kerajaan Banjar (analisis hubungan Kerajaan Demak dengan Kerajaan Banjar atas masuknya islam di Kalimantan*

Selatan). Tesis (<http://digilib.uin-suka.ac.id/69011BAB%20I%2CV.pdf>) (online). Diakses tanggal 16 April 2013

¹⁹Lihat (<http://library.utem.edu.my/e-melakakoleksi%20melakasejarahmn2008.pdf>)

²⁰*Ibid*, hlm, 21

pengganti raja, dengan cara mengawinkan seorang putri Banjar, Putri Junjung Buih dengan Raden Putera, seorang pangeran dari Majapahit. Setelah menjadi raja, Raden Putera memakai gelar Pangeran Suryanata, sementara Lambung Mangkurat memangku jabatan sebagai Mangkubum²¹. Setelah Negara Dipa runtuh, muncul Negara Daha yang berpusat di Muara Bahan. Saat itu, yang memerintah di Daha adalah Maharaja Sukarama. Ketika Sukarama meninggal, ia berwasiat agar cucunya Raden Samudera yang menggantikan. Tapi, karena masih kecil, akhirnya Raden Samudera kalah bersaing dengan pamannya, Pangeran Tumenggung yang juga berambisi menjadi raja. Atas nasehat Mangkubumi Aria Tranggana dan agar terhindar dari pembunuhan, Raden Samudera kemudian melarikan diri dari Daha, dengan cara menghilir sungai melalui Muara Bahan ke Serapat, Balandian, dan memutuskan untuk bersembunyi di daerah Muara Barito. Di daerah aliran Sungai Barito ini, juga terdapat beberapa desa yang dikepalai oleh para kepala suku. Di antara desa-desa tersebut adalah Muhur, Tamban, Kuwin, Balitung dan Banjar. Kampung Banjar merupakan perkampungan Melayu yang dibentuk oleh lima buah sungai yakni Sungai Pandai, Sungai Sigaling, Sungai Karamat, Jagabaya dan Sungai Pangeran (Pageran). Semuanya anak Sungai Kuwin. Desa Banjar ini terletak di tengah-tengah pemukiman Oloh Ngaju di BaritoHilir²².

Orang-orang Dayak Ngaju menyebut orang yang berbahasa Melayu dengan sebutan Masih. Oleh karena itu, desa Banjar tersebut kemudian disebut Banjarmasin, dan pemimpinnya disebut Patih Masih. Desa-desa di daerah Barito ini semuanya takluk di bawah Daha dengan kewajiban membayar pajak dan upeti.

²¹*Ibid*, hlm. 23

²²*Ibid*, hlm,32

²³*Ibid*, hlm, 42

Hingga suatu ketika, Patih Masih mengadakan pertemuan dengan Patih Balit, Patih Muhur, Patih Balitung, Patih Kuwin untuk berunding, agar bisa keluar dari pengaruh Daha, dan menjadikan kawasan mereka merdeka dan besar²³. Keputusannya, mereka sepakat mencari Raden Samudera, cucu Maharaja Sukarama yang kabarnya sedang bersembunyi di daerah Balandean, Sarapat. Kemudian, mereka juga sepakat memindahkan bandar perdagangan ke Banjarmasin. Selanjutnya, di bawah pimpinan Raden Samudera, mereka memberontak melawan kerajaan Daha. Peristiwa ini terjadi pada abad ke-16 M. Pemberontakan ini amat penting, karena telah mengakhiri eksistensi Kerajaan Daha, yang berarti akhir dari era Hindu. Selanjutnya, masuk ke era Islam dan berdirilah KerajaanBanjar²⁴. Dalam sejarah pemberontakan itu, Raden Samudera meminta bantuan Kerajaan Demak di Jawa.

Dalam Hikayat Banjar disebutkan, Raden Samudera mengirim duta ke Demak untuk mengadakan hubungan kerja sama militer. Utusan tersebut adalah Patih Balit, seorang pembesar Kerajaan Banjar. Utusan menghadap Sultan Demak dengan seperangkat hadiah sebagai tanda persahabatan berupa sepikul rotan, seribu buah tudung saji, sepuluh pikul lilin, seribu bongkah damar dan sepuluh biji intan. Pengiring duta kerajaan ini sekitar 400 orang. Demak menyambut baik utusan ini, dan sebagai persyaratan, Demak meminta kepada utusan tersebut, agar Raja Banjar dan semua pembesar mau memeluk agama Islam. Atas bantuan Demak, Pangeran Samudera berhasil mengalahkan Pangeran Tumenggung, penguasa Daha, sekaligus menguasai seluruh daerah taklukan Daha²⁵.

²⁴*Ibid*. hlm, 54

²⁵*Ibid*, hlm, 60

Setelah berhasil meruntuhkan dan menguasai kerajaan Daha, maka Raden (Pangeran) Samudera segera menunaikan janji untuk memeluk Islam. Setelah masuk Islam, ia memakai gelar Sultan Suriansyah. Gelar lainnya adalah Panembahan atau Susuhunan Batu Habang. Dialah Raja Banjar pertama yang memeluk Islam, dan sejak itu, agama Islam berkembang pesat di Kalimantan Selatan. Pangeran Samudera (Sultan Suriansyah) diislamkan oleh wakil penghulu Demak, Khatib Dayan pada tanggal 24 September 1526 M, hari Rabu jam 10 pagi, bertepatan dengan 8 Zulhijjah 932 H. Khatib Dayan merupakan utusan Penghulu Demak Rahmatullah, dengan tugas melakukan proses pengislaman raja beserta pembesar kerajaan. Khatib Dayan bertugas di Kerajaan Banjar sampai ia meninggal dunia, dan dikuburkan di Kuwin Utara²⁶.

Sultan Suriansyah telah membuka era baru di Kerajaan Banjar dengan masuk dan berkembangnya agama Islam. Kerajaan Banjar yang dimaksud di sini adalah kerajaan pasca masuknya agama Islam. Sementara era Negara Dipa dan Daha merupakan era tersendiri yang melatar belakangi kemunculan Kerajaan Banjar. Diperkirakan, Suriansyah meninggal dunia sekitar tahun 1550 M. Seiring masuknya kolonial kulit putih Eropa, Kerajaan Banjar kemudian dihapuskan oleh Belanda pada 11 Juni 1860 M. Dalam perjalanannya, Kerajaan Banjar telah mengalami berbagai kesulitan dan ancaman baik dari eksternal maupun internal, terutama masa-masa setelah datangnya bangsa kolonial. Pusat kerajaan atau Keraton Banjar harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain tidak kurang dari 5 (lima) kali. Tetapi tak satupun sisa-sisa tinggalan Keraton Banjar tersebut yang dapat diwariskan kepada generasi

²⁶*Ibid*, hlm, 61

²⁷ *Lihat* (<http://banuahunjungtanah.wordpress.com/category/sejarah-banjar>)

sekarang. Keraton pertama yang disebutkan berada di wilayah Kuin, dan keraton kedua yang berlokasi di Kayutangi atau Teluk Selong, Martapura, tidak ada seorangpun yang dapat menjelaskannya. Kenyataan yang sekarang dapat ditemui di Kuin saat ini hanyalah lokasi Makam Sultan Suriansyah dan para tokoh yang sejaman seperti Khatib Dayan, serta makam keluarga Sultan Suriansyah sendiri²⁷. Tidak atau belum ditemukan serta diketahuinya dimana lokasi Keraton Banjar dan bagaimana bentuk arsitekturnya hingga saat ini merupakan pertanyaan penelitian yang menarik untuk dicarikan jawabannya. Sehubungan dengan hal itu penelitian seperti ini harus dilaksanakan secara kolaboratif antara sejarah, arkeologi dan arsitektur, maka diharapkan dapat menguak tabir yang selama ini belum ada yang mengangkat dan membicarakannya.²⁸ Masuk dan berkembangnya Islam berlangsung sebelum Kesultanan Banjar berdiri. Hal ini dikarenakan wilayah cikal bakal Kesultanan Banjar yang strategis, yaitu jalur perdagangan dan pelayaran. Melalui pelabuhan dan transaksi perdagangan yang ada, Islam didakwahkan oleh pedagang-pedagang muslim kepada rakyat²⁹.

Masuknya Islam berlangsung dengan damai di kawasan ini melalui tangan pedagang dan para ulama. Dalam salah satu makalah Pra Seminar Sejarah Kalsel (1973) disebutkan, Sunan Giri juga pernah singgah di Pelabuhan Banjar. Sunan Giri melakukan transaksi pedagang dengan warga sekitar dan bahkan memberikan secara gratis barang-barang kepada penduduk yang fakir.

Di samping itu juga terdapat keterangan mengenai salah seorang pemuka Kerajaan Daha, yakni Raden Sekar Sungsang yang menimba ilmu kepada Sunan Giri. Melalui jalur inilah Pangeran

²⁸*Ibid*, hlm,70

²⁹ *Lihat* (<http://www.al-khilafah.org/2011/06/kesultanan-banjar-bagian-khilafah-yang.html>)

Samudera mengenai Islam dan kelak mengadakan hubungan dengan Kesultanan Demak. Pangeran Samudera sendiri kemudian masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Suriansyah. Sekaligus menjadi Sultan pertama dalam Sejarah Kesultanan Banjar yang berdiri pada hari Rabu 24 September 1526 M. Tempat pemerintahan dipusatkan di rumah Patih Masih, daerah perkampungan suku Melayu yang terletak di antara Sungai Keramat dan Jagabaya dengan Sungai Kuin sebagai induk. Pada tempat ini pula dibangun sebuah Masjid yang berdiri hingga sekarang, dikenal dengan nama Masjid Sultan Suriansyah³⁰.

Istilah *banjar* muncul sekitar Abad ke-15 atau 16 Masehi beriringan dengan terbentuknya Kerajaan Banjar yang didirikan oleh Pangeran Samudera atau Sultan Suriansyah pada tahun 1526 M. Menurut Hooykaas asisten residen Belanda dan merangkap sebagai ketua Dewan Banjarmasin di tahun 1930-an, yang sempat menulis sebuah buku tentang peringatan tiga lustrum keprajaan daerah kota Banjarmasin (1919 M – 1934 M) di mana sebagian tulisannya mengutip dari buku karangan J. Hageman Joz ; "*In 1520 werd de negeri Bandjermasin in de benedenlanden gesticht*", " Pada tahun 1520 negeri Banjarmasin didirikan di daerah hilir". Daerah "hilir" yang dimaksud oleh Hageman tidak lain merujuk pada daerah yang sekarang bernama Kampung Kuin.

Kata *banjar* berasal dari sebutan awal untuk *Bandarmasih* yaitu nama suatu kampung orang Melayu yang ada di muara Sungai Kuin yang dipimpin oleh Patih Masih. Menurut .Noer'id Haloei Radam, istilah *banjar* sebagai sebuah sungai yang merupakan anak Sungai Barito. *Banjar'* merujuk kepada nama perkampungan di kawasan muara Barito di mana tetuhanya adalah Masih yang

kemudian diberi gelar Patih , lalu menjadi Patih Masih. Jadi kata *banjar* bukan terambil dari kata Melayu *bandar* yang artinya tempat pemukiman di tepi sungai atau pesisir, tetapi kata tersebut asli berasal dari khazanah kata penduduk asli setempat³¹.

Seiring berjalannya waktu kata *banjar* lambat laun tidak lagi berarti suatu kampung atau pedukuhan yang dihuni orang-orang Melayu ('*oloh Masih*' dalam bahasa Ngaju; bahasa penduduk asli setempat yang lebih dulu ada) tetapi berkembang menjadi sebutan untuk menyatakan identitas wilayah suatu negeri/ kerajaan, bahasa, suku bangsa, orang atau manusia, bangunan rumah atau arsitektur dan seterusnya, yang mula-mula terdapat di daerah ini.

Lebih jauh bermula dari sebuah kampung atau pedukuhan, lalu menjadi bandar yang banyak dihuni penduduk pendatang dari suku Melayu di tengah koloni masyarakat suku asli setempat Dayak Ngaju yang mendiami perairan Barito Hilir. Bandar ini dikepalai seorang 'patih' Melayu bernama Patih Masih, atau Patih Oloh Masih. Perkataan '*oloh masih*' dalam bahasa Ngaju mempunyai pengertian 'orang Melayu'. Mereka kemudian menyebut kampung di Muara Kuin Cerucuk yang dihuni orang-orang Melayu tersebut sebagai 'kampung' atau 'bandar oloh Masih', yang mempunyai arti 'kampungnya orang-orang Melayu'.Perkataan 'bandar oloh Masih' yang diucapkan orang-orang Ngaju lama kelamaan penyebutannya menjadi 'Bandarmasih', sampai kemudian kampung ramai yang dihuni oleh koloni pertama orang-orang Melayu dan dikepalai Patih masih ini disebut 'Bandarmasih', lalu menjadi 'Banjarmasih' yang tetap mempunyai arti yang sama yaitu 'bandarnya Patih Masih'.

Dalam perkembangan selanjutnya, nama 'Banjarmasin' timbul akibat kesalahan pengucapan orang-orang Erofa terutama Belanda. karena logat mereka, perkataan 'Banjarmasih' dilafalkan menjadi

³⁰*Ibid*, hlm, 22

³¹Lihat. Noer'id Haloei Radam, *dalam: Sumbangan Kebudayaan Daerah untuk Penyuburan Nilai-nilai Kebangsaan*, 1996.

Bandjarmassing, lalu '*Bandjemasin*'. sampai sekitar tahun 1664 M, arsip-arsip Belanda berupa surat-surat yang dikirim ke wilayah Nusantara untuk sultan-sultan yang memerintah di Kerajaan Banjarmasin tetap menyebut Kerajaan banjarmasih dalam versi ucapan Belanda '*Bandzermash*'. Kemudian sesudah tahun 1664 M menjadi '*Bandjermassing*', dan '*Bandjarmasing*' (tanpa huruf 's' dan 'h').³² Dari sebuah bentuk bandar atau kampung, 'Banjarmasih' - menurut sebutan penduduk Ngaju yang banyak dihuni orang Melayu, berkembang menjadi sebuah bandar besar yang tidak hanya dihuni warga Melayu tetapi juga suku Ngaju, Maanyan, Bukit, Jawa serta suku lainnya. Dan setelah Raden Samudera diangkat menjadi raja oleh beberapa pemimpin/penguasa wilayah muara dan pesisir Sungai Barito, 'bandar Patih Masih' makin bertambah ramai.

Raden Samudera adalah seorang pelarian politik. Cucu dari Maharaja Sukarama ini menyembunyikan diri di sekitar wilayah 'bandar Patih Masih' karena berselisih paham dengan pamannya yang ingin menguasai tampuk pemerintahan Negara Daha dalam perebutan kekuasaan sepeninggalnya Maharaja sukarama. Perebutan kekuasaan ini semakin sengit setelah Pangeran Mangkubumi yang seharusnya menggantikan Maharaja Sukarama terbunuh, situasi politik kerajaan pedalaman itu makin menghangat. Dengan 'hilangnya' putera mahkota pewaris pemerintahan Negara Daha, berarti melicinkan jalan bagi Pangeran Tumenggung untuk menduduki singgasana kerajaan Daha. Sementara di wilayah muara Sungai Barito, Patih Masih, yang mengetahui asal usul si 'pelarian politik' ini, bersama empat orang patih pemimpin penguasa daerah muara dan pesisir sungai Barito yaitu Patih Balit, Patih Muhur, Patih Balitung, dan Patih Kuin yang semula tunduk pada kekuasaan kerajaan Daha, sepakat mengangkat Raden Samudera menjadi pemimpin mereka dan terpisah dari Negara

³² Lihat Bandjermasin (Sultanate), Surat-surat perdjandjian antara Kesultanan Bandjarmasin dengan pemerintahan V.O.C.: Bataafse Republik, Inggeris dan

Daha yang diperintah Pangeran Tumenggung.

Pangeran Samudera dirajakan di kerajaan baru 'Bandarmasih' setelah terlebih dahulu merebut Muara Bahan (daerah sekitar kota Marabahan di Kabupaten Barito Kuala sekarang) sebuah bandar yang sudah ramai penduduknya tetapi berada di bawah penaklukan Negara Daha, lalu memindahkan bandar tersebut ke Bandarmasih bersama para penghuninya. Bagi Pangeran Tumenggung hal itu berarti awal suatu pemberontakan yang akan menyingkirkannya dari tahta kekuasaan, dan tentu saja ini harus ditumpas.

Dengan dibantu tentara dari Kerajaan Demak, kemenangan demi kemenangan selalu berpihak pada Pangeran Samudera. Puncaknya terjadi sekitar bulan September 1526 M, Pangeran Tumenggung mengakhiri perselisihan intern kerajaan yang telah berlangsung lama dengan cara menyerahkan tahta kerajaan kepada keponakannya, Pangeran Samudera.

Sebagai penguasa baru kerajaan, Pangeran Samudera yang kemudin berganti nama menjadi Sultan Suriansyah setelah memeluk agama Islam, lalu memproklamirkan 'bandar Patih Masih' yang terletak di pinggir Sungai Kuin itu sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Banjarmasin yang pertama, dan menjadikan rumah besar kediaman Patih Masih sebagai istana kerajaan. Banjarmasin kemudian menjadi ibukota sekaligus pusat kerajaan baru yang menguasai daerah-daerah sekitar pantai, sungai besar maupun wilayah pedalaman Propinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sekarang.

Keberadaan awal 'Banjarmasih' yang menjadi ibukota kerajaan termasuk unik karena terbentuk dan dikelilingi lima buah sungai yang ujung-ujungnya saling bertemu sehingga membentuk

Hindia- Belanda 1635-1860, Penerbit Arsip Nasional Republik Indonesia, Kompartimen Perhubungan dengan Rakjat 1965

sebuah danau di utara kompleks keraton. Berdasarkan peta rekonstruksi Banjarmasin dalam kurun waktu atau tahun 1530 Masehi yang dibuat oleh sejarawan Banjar diketahui; kediaman Sultan di kompleks keraton terletak di antara Sungai Keramat dan Sungai Jagabaya di Kelurahan Kuin Utara sekarang. Bentuk bangunan yang disebut sebagai 'keraton' pada saat itu diperkirakan masih berupa 'betang' sebagaimana umumnya rumah-rumah tempat tinggal penduduk asli Ngaju, tetapi dengan paduan arsitektur awal rumah Banjar 'bubungan tinggi'. Di kanan dan kiri kompleks keraton didirikan beberapa bangunan pendukung sebagaimana layaknya istana tempat tinggal raja yang menjadi pusat pemerintahan, misalnya bangunan mesjid pertama yang terletak di seberang Sungai Jagabaya. Sedangkan bangunan lain berupa 'paseban', 'pagungan', dan 'sitolohor' menempati areal yang lebih luas di sebelah Sungai Keramat. Menyeberang 'danau pedudusan' tempat bertemunya kelima anak Sungai Kuin dan Sungai Barito searah dengan keraton, terdapat alun-alun luas berpagar kayu kokoh untuk tempat mengadakan latihan berkuda dan perang-perangan.

Perangkat pendukung lainnya dari keberadaan Banjarmasin saat itu sebagai pusat pemerintahan adalah terdapatnya pusat perniagaan berupa pasar, baik yang terletak di darat maupun pasar di atas air, atau '*pasar terapung*'. Daerah industri pembuatan perahu dan jukung Banjar terletak di Sungai Pandai, yang sekaligus menjadi tempat pemusatan pedagang besar dan kediaman warga asing. Penduduk kerajaan -saat itu sudah mencapai jumlah sekitar 15.000 orang ditambah rakyat Negara Daha yang diangkut ke Banjarmasin menempati 'lantung-lantung' sebagai rumah terapung di sepanjang tepi sungai, seperti layaknya rumah milik orang Palembang. Keterangan ini berasal dari catatan perjalanan orang Tiongkok dari dinasti Ming sekitar tahun 1618 Masehi yang pernah mengadakan pelayaran

sampai ke Banjarmasin, lalu mencatatnya dalam suatu lembaran yang dinamakan 'berita Cina'. Dan sebagian penduduk lainnya menghuni 'betang-betang' besar dari kayu bertiang tinggi serta mampu menampung sampai seratus orang penghuni di dalamnya. Adapun daerah daratan yang terletak di sekitar lima anak Sungai Kuin dan Sungai Barito sebagian digarap untuk sawah dan perkebunan penduduk.

Keadaan dan situasi Kerajaan Banjarmasin dalam masa beberapa abad yang silam dilukiskan oleh Hamka dalam tulisan beliau; "dalam lembaran catatan sejarah Dinasti Ming di Tiongkok no.323 disebutkan, di Banjarmasin itu tempo dulu terdapat pusat kegiatan niaga yang besar". Jika diingat bahwa Dinasti Ming memerintah dari tahun 1368 - 1643 M, dapat diduga bahwa sejak lama orang Cina pun telah datang berniaga ke Banjarmasin, terutama mencari hasil bumi yang amat diperlukan dinegerinya akan ditukar dengan kain-kain tenun yang halus-halus dan barang-barang porselen³³. Bisa dikatakan, 'Bandarmasih' pada saat itu (sekitar abad ke-16 dan ke-17 M) merupakan salah satu kota kerajaan teramai di wilayah Kalimantan selain Pasir, Kutai, Sambas, Sukadana dan Bandar Brunei di belahan utara pulau Kalimantan.

Daerah bekas pusat pemerintahan Kerajaan Banjarmasin pada masa awal ini sampai sekarang dikenal dengan sebutan 'Kampung Keraton', terletak di sekitar kompleks pemakaman raja-raja Banjar di Kelurahan Kuin Utara sekarang. Komplek pemakaman yang diperkirakan mulai dibuat sekitar tahun 1550 M, yaitu pada masa pemerintahan raja Banjar kedua Sultan Rakhmatullah pada mulanya merupakan sebuah gunung berupa susunan batu bata yang seluruh dindingnya dibuat berukir indah. Bangunan makamnya berdiri setinggi kurang lebih dua meter dari permukaan tanah, dan mempunyai tangga untuk naik ke atas bangunan makam.

³³Lihat. Hamka: '*Meninjau Sejarah Masuknya Islam ke Kalimantan Selatan*', 1982.

Pada tahun 1970, dinding sebelah selatan kompleks pemakaman yang menghadap ke arah Sungai Kuin pernah digali, ternyata sampai pada kedalaman satu meter lebih belum mencapai landasan bawah. Mungkin karena kondisi tanah yang lemah di sekitar kompleks pemakaman, ditambah akibat beban batu-batu makam yang berat maka dibangun makam 'Panembahan Batu Habang' sebutan penghormatan masyarakat Banjar untuk Sultan Suriansyah setelah wafat- perlahan-lahan tenggelam sehingga hampir rata dengan permukaan tanah. Ukuran batu bata besar di kompleks pemakaman Sultan Suriansyah sama dengan ukuran batu bata yang ada di reruntuhan kompleks Candi Agung Amuntai, dan di bekas tempat pemujaan masa pra-Islam di sekitar berdirinya Mesjid Pusaka Banua Lawas Tanjung. Mungkin ada benarnya perkiraan para ahli selama ini yang mengatakan bahwa tanah sekitar kompleks pemakaman raja-raja Banjar tersebut dahulunya adalah bekas istana (keraton) pertama Kerajaan Banjarmasin yang dibangun oleh Sultan Suriansyah, yang tidak lain merupakan rumah kediaman Patih Masih. Tetapi jangan berharap untuk dapat melihat sisa-sisa bangunan peninggalan bersejarah itu, karena secara fisik situs bekas keraton sulit ditemukan secara utuh, kecuali kompleks pemakaman raja-raja Banjar tadi. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari beberapa peristiwa yang menimpa keraton Banjarmasin saat itu. Misalnya akibat yang dialami setelah penyerbuan armada kapal perang VOC Belanda pada tahun 1612 M yang menghancurkan dan membakar habis keraton Banjarmasin, sehingga pusat pemerintahan dan dipindahkan oleh Sultan Mustain Billah ke Kayu Tangi, dekat Teluk Selong di Martapura sekarang. Pada tahun 1663 M di masa pemerintahan raja ke sembilan, Pangeran Surianata gelar Adipati Anom, kota kerajaan kembali dipusatkan di Banjarmasin. Bandar ini kemudian berkembang semakin pesat, di mana pelabuhannya mampu menampung lebih dari seribu buah kapal layar sehingga membuka kontak perhubungan antara Banjar dengan hampir seluruh negeri dan kerajaan di wilayah Nusantara, bahkan

sampai ke negeri Siam dan Chocin Cina. Sedemikian ramainya Negeri Banjar ketika itu membuat pedagang asing dari benua Erofa turut mencoba mengadu peruntungan. Tetapi karena sifat culasnya VOC Belanda ditolak memasuki Negeri Banjar, sehingga membuat marah pelaut-pelaut Belanda yang berujung pada penyerbuan armada VOC Belanda pada tahun 1612 M.

Setelah sempat menikmati ketenangan dan kemakmuran dari perniagaan antar pulau selama lebih dari setengah abad setelah penyerbuan armada VOC Belanda, petaka lama terulang lagi.

Sekali ini Negeri Banjar diserang oleh orang-orang sesama ras Melayu, keraton di Kuin sebagai pusat pemerintahan dan kediaman Pangeran Adipati Anom rata dengan tanah akibat penyerbuan orang Melayu dan Bugis pada tahun 1677 M. Peristiwa yang sama terjadi 24 tahun kemudian, kali ini pasukan armada dagang Inggris dengan beberapa buah kapalnya memasuki perairan Banjarmasin dan ingin menanamkan pengaruhnya sehingga turut mempunyai andil dalam penghancuran dan perusakan atas keraton Banjarmasin pada tahun 1701 M. Akibat seringnya mengalami penyerbuan dari bangsa asing maka pusat pemerintahan dipindahkan dari Kuin. Kali ini Pulau Tatas lah yang dipilih, sehingga membuat wilayah Pulau Tatas semakin penting dan berkembang pesat sejak tahun 1710 M, serta mampu menggantikan peranan Kampung Keraton di Muara Kuin sebagai pusat pemerintahan turun temurun.

Seiring dengan berkembangnya Zaman dan semakin kuatnya kedudukan VOC Belanda di negeri Banjar maka berdasarkan kontrak yang ditandatangani berturut-turut pada tahun 1747, 1817, dan diperbarui lagi pada tanggal 4 Mei 1826 M tentang penguasaan atas sebagian wilayah Kerajaan Banjarmasin oleh VOC Belanda, sehingga membagi dua ibukota Banjarmasin dengan batas-batas alam berupa Sungai Martapura dan Sungai Kuin. Dalam kontrak tahun 1826 M

yang ditanda tangani oleh Sultan Adam al Wasikh Billah diserahkanlah Pulau Tatas, di mana termasuk di dalamnya daerah Kuin Selatan yang letaknya persis berseberangan dengan lokasi keraton, ditambah beberapa wilayah lainnya sampai ke wilayah Mantuil sekarang (Schan van Tuyl; menurut sebutan Belanda) kepada pihak VOC Belanda. Tahun 1857 M³⁴.

Maka untuk ke sekian kalinya Banjarmasin menjadi ibukota kerajaan lagi. Di akhir masa pemerintahan raja Banjar ke-17, Sultan Adam (1825 M-1857 M) bersama Nyai Ratu Kemala Sari pindah ke Banjarmasin dari Martapura dan menempati keraton di Sungai Mesa. Dalam wilayah yang dikuasai Kerajaan Banjarmasin bermunculan kampung-kampung penting selain di Muara Kuin, yaitu Kampung Sungai Mesa sendiri tempat kedudukan dan pusat pemerintahan Kerajaan Banjarmasin yang dihuni oleh Sultan Adam, serta sebuah istana untuk Mangkubumi kerajaan. Dari wilayah Sungai Mesa sampai Kelayan dan Kuin Utara menjadi pusat pemerintahan, pelayaran dan kegiatan perdagangan orang-orang Banjar. Rumah-rumah penduduk menyebar di sepanjang tepi sungai seperti Kuin, Sungai Miai, Teluk Masjid tempat berdirinya mesjid jamik pertama, Sungai Jingah, Pecinan Laut, dan Kampung Sungai Mesa sendiri. Setelah Sultan Adam wafat, sampai tahun 1860 M keraton di Kampung Sungai Mesa tetap menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Banjarmasin yang terakhir di bawah Sultan Tamjidillah, sebelum diasingkan ke Jawa Barat. Sedangkan Mangkubumi kerajaan yang dipegang oleh Pangeran Hidayatullah pencetus Perang Banjar bersama Pangeran Antasari- tetap menempati keraton di Martapura.

Hubungan tradisional antara Banjarmasin dengan kerajaan lain di Nusantara tetap berlangsung baik. Misalkan dengan cara saling

melakukan kunjungan antara para raja tersebut. Itulah sebabnya di sudut kota lama Banjarmasin yaitu di wilayah sekitar Pasar Lama sekarang, pernah berdiri rumah pesanggrahan untuk peristirahatan raja-raja dari wilayah Kalimantan Timur yang melakukan kunjungan ke Kerajaan Banjarmasin. Pesanggrahan raja-raja yang dipenuhi perabot rumah tangga yang lengkap ini dibangun menghadap ke ujung Sungai Kuin dan Jalan Teluk Masjid, di mana untuk menghubungkan kedua wilayah ini dengan Pasar Lama di Kampung Parit dibuatkan sebuah jembatan 'ringkapan' jembatan gantung yang bisa diangkat untuk kapal lewat.

Adapun wilayah Pulau Tatas yang dikuasai Belanda sentralnya berada di Benteng Tatas (*Fort van Tatas*) yang didirikan pada tahun 1756 M. Benteng ini berbentuk empat persegi panjang, hampir menyerupai bentuk hewan penyu tak berekor yang sedang tengkurap, dengan kepala menghadap sungai. Sedangkan dindingnya terbuat dari balok-balok kayu tebal setinggi tiga meter, bukan beton semen. Di dalam benteng terdapat beberapa fasilitas untuk keperluan ketentaraan dan pertahanan seperti perumahan untuk para perwira sub-altern, asrama untuk para prajurit militer, kantor, rumah sakit militer, gudang perbekalan, bahkan pasar. Dan tiap sudut benteng (bastion) dipasang meriam besar. Pola pembangunan kota di Neegeri Belanda, yang sebenarnya juga kota air dan tak jauh berbeda dengan kondisi Banjarmasin, banyak diterapkan oleh penguasa Belanda di Banjarmasin. Nama Jalan 'Heerengracht' (sekarang namanya Jalan D.I. Panjaitan) juga ada di kota Amsterdam. '*Gracht*' ialah kanal atau 'terusan', atau sungai kecil, sungai buatan bukan alam, yang digali untuk berbagai keperluan ringkas: jalan keluar masuk perahu-perahu kecil, pertahanan, got/saluran air terbuka untuk drainase dan lain-lain.

³⁴Lihat Willem Adriaan Rees, *De bandjermasinsche krijg van 1859-1863: met portretten, platen en een terreinkaart*, D. A. Thieme, 1865

Sampai menjelang akhir Abad XIX, *Fort van Tatas* berkembang menjadi pusat kekuasaan dan administrasi pemerintah kolonial Hindia Belanda, baik sipil maupun militer. Dengan adanya proklamasi residen Hindia Belanda F.N.Nieuwenhuyzen tanggal 11 Juni 1860 M, Kerajaan Banjarmasin dihapus sehingga secara teknis administratif seluruh wilayah Banjarmasin diperintah langsung oleh pemerintah Hindia Belanda dengan pusat pemerintahannya di Batavia waktu itu. Dalam perkembangan selanjutnya, perencanaan kota Banjarmasin yang dimulai sebelum berkecamuknya perang dunia kedua, tak luput mendapat masukan dan ide-ide menarik dari seorang ahli perencanaan kota terkenal Belanda, Ir. Thomas Karsten.

Sebagaimana kerajaan di Nusantara pada abad ke-16 dan ke-17, Kerajaan Banjarmasin yang terletak di pesisir dan muara sungai besar sekitar Muara Kuin sekarang, menggantungkan perekonomiannya di bidang perdagangan dan pelayaran luar negeri. 'Lada' sebagai produk utama kerajaan ini menjadikan 'Bandarmasih' sebagai pelabuhan antara bagi pelayaran laut dari Makassar ke wilayah barat Nusantara. Jatuhnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Malaka, Aceh dan kerajaan-kerajaan lain di bawah kontrol VOC Belanda, serta berpindahnya bandar perdagangan internasional ke timur yang berpusat di Makassar, menambah pesatnya iklim perdagangan di Kerajaan Banjarmasin. Perahu-perahu Banjar yang besar untuk pelayaran inter-insuler dan interkontinental telah mampu dimiliki dan dibuat galangan kapal Banjarmasin. Sehingga sebagai pusat kerajaan dan kota pelabuhan, Banjarmasin ketika itu merupakan bandar internasional yang ramai disinggahi kapal-kapal dari berbagai daerah dan bangsa di dunia.

Dalam kurun waktu itu pula, di bawah kekuasaan raja keempat Sultan Mustain Billah (lebih dikenal dengan sebutan

'Marhum Panembahan' yang memerintah tahun 1595 M – 1620 M) Kerajaan Banjarmasin dengan pusatnya di Karang Intan Martapura setelah boyong dari keraton Banjarmasin di Kuin yang luluh lantak oleh hantaman meriam VOC Belanda pada tahun 1612 M menjadi kerajaan yang disegani oleh kerajaan di sekitarnya, dan sering menerima upeti tahunan dari raja-raja yang berada di bawah pertuanan Banjarmasin. Menurut sebuah berita Belanda, Kerajaan Banjarmasin pernah memiliki prajurit sampai berjumlah 50.000 orang.

Dengan kekuatan tentara sebanyak itu, wajar bila kemudian Banjarmasin mampu membendung pengaruh Tuban, Arosbaya maupun Mataram yang bermaksud 'menggantikan' dominasi Demak. Tahun 1615 M, raja-raja Tuban dan Arosbaya pernah memerangi Kerajaan Banjarmasin karena mereka menuntut agar Banjar tunduk pada mereka³⁵. Usaha penaklukan Tuban maupun Arosbaya di Jawa Timur berakhir ketika Tuban dan Arosbaya ditaklukkan oleh para tentara Sultan Agung dari Kerajaan Mataram pada tahun 1619 M. Mungkin itu pula sebabnya mengapa kerajaan-kerajaan Tanah Bumbu dan Pagatan, Pulau Laut, Kerasikan, Pasir, Berau, Kutai di pantai timur, maupun Kotawaringin, Landak, Sukadana, Mempawah, Sambas di belahan tengah dan barat pulau Kalimantan mengakui pertuanan Kerajaan Banjarmasin.

Hubungan Banjarmasin dengan Kerajaan Mataram pernah mengalami masa menyenangkan, yaitu dengan datangnya perutusan Kerajaan Banjarmasin di ibukota Kerajaan Mataram pada pertengahan bulan Oktober 1641 M. Sekitar pertengahan bulan Oktober 1641 tibalah seorang utusan raja Banjarmasin di Jepara

³⁵ Lihat Lihat J.K.J.de Jonge, dalam [ab](#)Hermanus Johannes de Graaf, *Puncak kekuasaan Mataram: politik ekspansi Sultan Agung*, Grafitipers, 1986 H.J.de Graaf

dengan pengiring sebanyak 500 orang³⁶. Utusan yang berjumlah besar ini diizinkan datang di kota istana. Utusan besar-besaran dari Kerajaan Banjarmasin yang bertandang ke Kerajaan Mataram meninggalkan bekas-bekasnya dalam cerita-cerita tradisional di kedua kerajaan.

Di Jawa diceritakan dalam babad tahunan. Babad Sangkala mencatat pada tahun Jawa 1564 Saka atau bertepatan dengan tahun 1642 Masehi; Putusan Banjar prapta serba miring Mataram, 'utusan-utusan Banjar mengadakan kunjungan kehormatan pada Mataram'. Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, Raffles, pun sempat mencatat (Chronological Table) atas peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut; 'Kehadiran orang Banjarmasin di istana Mataram', begitu ditulis oleh Sir T. S. Raffles dalam catatannya.

Hal ini bertolak belakang dengan tahun-tahun sebelum peristiwa lawatan besar-besaran orang Banjar ke Kerajaan Mataram. Pada bulan Juli 1631 M di Banjarmasin terdengar desas-desus bahwa Kerajaan Mataram merencanakan suatu serangan dengan 2.000 kapal, sehingga pada tahun itu tidak ada kapal-kapal dagang dari Mataram yang muncul di pelabuhan-pelabuhan Banjarmasin. Raja Banjarmasin juga tidak lagi mengizinkan orang-orang Mataram masuk ke kerajaannya. Hal ini dicatat dalam Dagregister tertanggal 1 September 1632 M. Untuk mengantisipasi kemungkinan yang lebih buruk bila serangan betul-betul dilakukan Mataram, Raja Banjarmasin kemudian mengirimkan dua orang utusannya ke Batavia. Oleh utusan tersebut disampaikan undangan kepada pemerintah tinggi Hindia Belanda agar mengirimkan beberapa kapal kesana. Hubungan baik ini membawa ke suatu persetujuan antara Kompeni dan Kerajaan Banjarmasin pada tanggal 4 September 1635 M³⁷

³⁶Lihat Laporan Umum, 12 Desember 1641, Jonge hlm.248.dan(Dagregister, 22 Oktober 1641.

Hubungan Kerajaan Banjarmasin dengan Mataram berangsur-angsur membaik ketika keduanya mengadakan perdamaian setelah sempat tegang selama bertahun-tahun. Golongan istana dan bangsawan Banjar yang pro Inggris dan pro Mataram makin bertambah banyak, sedangkan sikap mereka terhadap orang-orang Belanda sangat bertolak belakang, sehingga makin menyudutkan kedudukan Kompeni Belanda di Banjar. Hal ini kemudian memicu pada perusakan pada loji Belanda di Martapura, yang menewaskan seluruh pegawai loji Belanda tersebut.

Di era Sultan Mustain Billah pula Kerajaan Banjarmasin mampu meluaskan pengaruhnya ke belahan lain pulau Kalimantan, yaitu dengan cara mengirim salah seorang puteranya yang bernama Pangeran Adipati Anta Kesuma mendirikan Kerajaan Kotawaringin pada tahun 1679 M. Generasi kelima dari dinasti raja-raja Banjarmasin inilah yang menurunkan raja-raja Kotawaringin sekarang. Pangeran Adipati Anta Kesuma sesudah resmi menjadi raja Kerajaan Kotawaringin kemudian diberi gelar Ratu Begawan.

Selain di pulau Kalimantan, Kerajaan Banjarmasin juga membina hubungan baik dengan kerajaan lain di Nusantara. Salah seorang cucu Marhum Panembahan (nama lain Sultan Mustain Billah) yang bernama Raden Subangsa yang tidak lain adalah saudara lain ibu dengan Pangeran Singamarta, dikawinkan dengan dua orang puteri raja Kerajaan Selaparang yang menguasai pulau Lombok dan Sumbawa. Raden Subangsa sendiri yang di kemudian hari sesudah lama menetap di Kerajaan Selaparang diberi gelar Pangeran Taliwang. Dari perkawinan itu lahir anak dan keturunan Raden Subangsa atau Pangeran Taliwang, yang mana menurut cerita-cerita

³⁷Lihat Cense, *De Kroniek van Banjarmasin*, hlm.,95 -105, dan J.E. Heeres, hlm.,270 -271

rakyat di kepulauan Nusa Tenggara terutama di Kerajaan Bima, bangsawan dari Kerajaan Banjarmasin inilah yang menurunkan raja-raja yang ada disana³⁸.

Misi pengiriman Raden Subangsa ke Kerajaan Selaparang oleh pihak istana Kerajaan Banjarmasin ini diperkirakan terjadi dalam era pemerintahan Sultan Ri'ayatullah atau Sultan Tahlilullah, atau dengan sebutan yang lebih dikenal untuk masa itu, Pangeran Ratu, yang diperkirakan memerintah Kerajaan Banjarmasin antara tahun 1642 M - 1660 M.

Pada masa itu pembagian wilayah teritorial dalam sistem pemerintahan untuk seluruh wilayah/daerah Kerajaan Banjarmasin dikenal tiga jenis wilayah teritorial, meskipun terminologi ini tidak dipergunakan dalam sistem politik dan pemerintahan kerajaan. Tiga wilayah teritorial itu ialah sebagai berikut :

1. Negara Agung

Wilayah Kerajaan Banjarmasin meliputi titik pusat, yaitu wilayah keraton tempat istana raja yang berkedudukan di Kayu Tangi Karang Intan. Sejak abad ke-17 M, Karang Intan menjadi ibukota Kerajaan Banjarmasin sampai masa pemerintahan Sultan Sulaiman Almu'tamidullah (1801 M – 1825 M). Dengan demikian hampir selama dua abad Karang Intan menjadi pusat pemerintahan kerajaan dan memegang peranan penting dalam percaturan politik kerajaan-kerajaan di Nusantara.

Sultan pertama yang menjadikan Karang Intan sebagai ibulota kerajaan adalah Sultan Musta'in Billah (1595 M- 1620 M) dan sejak

itu berlanjut sampai ke masa pemerintahan Sultan Sulaiman Almu'tamidullah. Baru pada masa Sultan Adam al Wasikh Billah (1825 M – 1857 M) pusat pemerintahan dipindahkan ke kraton Bumi Selamat Martapura. Periode Karang Intan sebagai ibukota dan pusat pemerintahan kerajaan berlangsung sangat lama dibandingkan dengan Martapura.

2. Wilayah teritorial yang kedua meliputi daerah-daerah :

- Tanah Laut,
- Banjar Lama dengan Pelabuhan Banjarmasin,
- Banua Ampat meliputi wilayah Martapura dan Rantau,
- Banua Lima meliputi Nagara, Alabio, Sungai Banar, Amuntai dan Kalua,
- Margasari,
- Alay,
- Daerah Amandit,
- Muara Bahan,
- Tanah Dusun, nama lain untuk daerah atas Barito.

3. Wilayah Teritorial ketiga adalah:

- Tanah Bumbu,
- Pulau Laut,
- Karasikan,
- Pasir,
- Berau, Kutai dan daerah-daerah di pantai timurnya,
- Kotawaringin,
- Landak, Sukadana, Sambas dan daerah-daerah pantai sebelah barat.

³⁸Lihat Sumarsono, *'Urang Banjar dan Kebudayaannya'*

Ketiga wilayah teritorial tersebut dikenal sebagai wilayah Kerajaan Banjar, di mana Karang Intan dijadikan sebagai ibukota negara. Semua wilayah yang termasuk dalam teritorial Kerajaan Banjar ini diharuskan membayar upeti kepada Sultan yang berkedudukan di Karang Intan.

B. Raja-raja Kerajaan Banjar dan Sistem Pemerintahan

Pemerintahan kerajaan Banjar di pimpin oleh raja-raja sebagai berikut :

1. Sultan Suriansyah (1525 - 1545)
2. Sultan Rakhmatullah (1545 - 1570)
3. Sultan Hidayatullah (1570 - 1595)
4. Sultan Musta'inbillah (1595 - 1620)
5. Sultan Inayatullah (1620 - 1637)
6. Sultan Sa'idullah (1637 - 1642)
7. Sultan Tahlilullah (1642 - 1660)
8. Sultan Arm-Allah (1661 - 1663)
9. Sultan Surianata (1663 - 1679)
10. Sultan Amr-Allah Bagus Kesuma (1680 - 1700)
11. Sultan Tahmidullah (1700)
12. Sultan Hamidullah (1700 - 1734)
13. Sultan Tamjidullah (1734 - 1759)
14. Sultan Muhammad Aminullah (1759 - 1761)
15. Sultan Sulaiman Sa'idullah (1762 - 1798)
16. Sultan Sulaiman Rakhmatullah (1801 - 1825)
17. Sultan Adam Al Wasikh Billah (1825 - 1857)
18. Sultan Tamjidullah (1857 - 1859) versi pemerintah kolonial Belanda.

19. Sultan Hidayatullah (1860), berdasarkan wasiat S.Adam, dan versi rakyat Banjar.

20. Panembahan Amirudin Khalifatul Mukminin atau Pangeran Antasari (1860 - 1862)

21. Panembahan Muhammad Said (1863 - 1875)

22. Sultan Muhammad Seman (1863 - 1905)

24. Gusti (Pangeran) Muhammada Arsyad (1905 - Vakum)

25. Sultan Muda Pangeran Haji Khairul Saleh (2010 -sekarang).

Adapun sebutan gelar para Raja dan para pembantunya adalah sebagai berikut :

- 1 Raja : bergelar Sultan/Panambahan/Ratu/Susuhunan
- 2 Putra Mahkota : bergelar Ratu Anum/Pangeran Ratu/Sultan Muda
- 3 Perdana Menteri : disebut Perdana Mantri/Mangkubumi/Wazir, dibawah Mangkubumi : Mantri Panganan, Mantri Pangiwa, Mantri Bumi dan 40 orang Mantri Sikap, setiap Mantri Sikap memiliki 40 orang pengawal.
- 4 Lalawangan : kepala distrik, kedudukannya sama seperti pada masa Hindia Belanda.
- 5 Sarawasa, Sarabumi dan Sarabraja : Kepala Urusan keraton
- 6 Mandung dan Raksayuda : Kepala Balai Longsari dan Bangsal dan Benteng
- 7 Mamagarsari : Pengapit raja duduk di Situluhur
- 8 Parimala : Kepala urusan dagang dan pekan (pasar). Dibantu Singataka dan Singapati.
- 9 Sarageni dan Saradipa : Kuasa dalam urusan senjata (tombak, ganjur), duhung, tameng, badik, parang, badil, meriam dll.
- 10 Puspawana : Kuasa dalam urusan tanaman, hutan, perikanan, ternak, dan berburu

- 11 Pamarakan dan Rasajiwa : Pengurus umum tentang keperluan pedalaman/istana
- 12 Kadang Aji : Ketua Balai petani dan Perumahan. Nanang sebagai Pembantu
- 13 Wargasari : Pengurus besar tentang persediaan bahan makanan dan lumbung padi, kesejahteraan
- 14 Anggarmarta : Juru Bandar, Kepala urusan pelabuhan
- 15 Astaprana : Juru tabuh-tabuhan, kesenian dan kesusasteraan.
- 16 Kaum Mangkumbara : Kepala urusan upacara
- 17 Wiramartas : Mantri Dagang, berkuasa mengadakan hubungan dagang dengan luar negeri, dengan persetujuan Sultan.
- 18 Bujangga : Kepala urusan bangunan rumah, agama dan rumah ibadah
- 19 Singabana : Kepala ketenteraman umum.

Jabatan-jabatan pada masa Panembahan Kacil (Sultan Mustain Billah), terdiri :

1. Mangkubumi
 2. Mantri Pangiwa dan Mantri Panganan
 3. Mantri Jaksa
 4. Tuan Panghulu
 5. Tuan Khalifah
 6. Khatib
 7. Para Dipati
 8. Para Pryai
- Masalah-masalah agama Islam dibicarakan dalam rapat/musyawaharah oleh Penghulu yang memimpin pembicaraan, dengan anggota terdiri dari : Mangkubumi, Dipati, Jaksa, Khalifah dan Penghulu.

- Masalah-masalah hukum sekuler dibicarakan oleh Jaksa yang memimpin pembicaraan dengan anggota terdiri dari Raja, Mangkubumi, Dipati dan Jaksa.
- Masalah tata urusan kerajaan merupakan pembicaraan antara raja, Mangkubumi dan Dipati.
- Dalam hierarki struktur negara, di bawah Mangkubumi adalah Panghulu, kemudian Jaksa. Urutan dalam suatu sidang negara adalah Raja, Mangkubumi, Panghulu, kemudian Jaksa. Urutan kalau Raja berjalan, diikuti Mangkubumi, kemudian Panghulu dan selanjutnya Jaksa. Kewenangan Panghulu lebih tinggi dari Jaksa, karena Panghulu mengurus masalah keagamaan, sedangkan Jaksa mengurus masalah keduniaan.
- Para Dipati, terdiri dari para saudara raja, menemani dan membantu raja, tetapi mereka adalah kedua setelah Mangkubumi.

Sistem pemerintahan mengalami perubahan pada masa pemerintahan Sultan Adam Al-Watsiq Billah. Perubahan itu meliputi jabatan :

1. Mufti : hakim tertinggi, pengawas Pengadilan umum
2. Qadi : kepala urusan hukum agama Islam
3. Penghulu : hakim rendah
4. Lurah : langsung sebagai pembantu Lalawangan (Kepala Distrik) dan mengamati pekerjaan beberapa orang Pambakal (Kepala Kampung) dibantu oleh Khalifah, Bilal dan Kaum.
5. Pambakal : Kepala Kampung yang menguasai beberapa anak kampung.
6. Mantri : pangkat kehormatan untuk orang-orang terkemuka dan berjasa, diantaranya ada yang menjadi kepala desa dalam wilayah yang sama dengan Lalawangan.
7. Tatuha Kampung : orang yang terkemuka di kampung.

8. Panakawan : orang yang menjadi suruhan raja, dibebaskan dari segala macam pajak dan kewajiban.

• **Sebutan Kehormatan**

- Sultan, disebut : *Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan*
- Gubernur Jenderal VOC : *Tuan Yang Maha Bangsawan Gubernur Jenderal*.
- Permaisuri disebut Ratu jika keturunan bangsawan atau Nyai Ratu jika berasal dari kalangan biasa, sedangkan para selir disebut Nyai.
- Anak laki-laki raja bergelar Gusti (= Raden/Raden Aria pada zaman Hindu & awal Islam), dan jika anak permaisuri akan mendapat gelar Pangeran dan jika menjabat Dipati mendapat gelar berganda menjadi Pangeran Dipati. Para Pangeran keturunan Sultan yang memerintah menurunkan gelar "Gusti" ini kepada keturunannya baik anak lelaki maupun wanita. Para Gusti (lelaki) yang sudah jauh garis keturunannya dengan Sultan yang memerintah hanya menurunkan gelar Gusti hanya kepada anak lelaki.
- Anak perempuan raja bergelar Gusti (= Raden Galuh pada zaman Hindu), jika anak permaisuri akan mendapat gelar Putri dan setelah menikah mendapat gelar Ratu.
- Andin, menurut Tutur Candi gelar tersebut untuk keturunan kerajaan Negara Daha yang telah dikalahkan

oleh Sultan Suriansyah dan tidak diperkenankan lagi memakai gelar Pangeran.

- Antung, gelar untuk putera/puteri dari wanita "Gusti" yang menikah dengan orang kalangan biasa. Antung setara dengan gelar Utin (wanita) di Kotawaringin.
- Seorang lelaki dari kalangan biasa yang menikah dengan puteri Sultan, akan mendapat gelar Raden. Raden juga merupakan gelar bagi pejabat birokrasi dari golongan Nanang/Anang misalnya gelar Raden Tumenggung, yang selanjutnya meningkat menjadi Raden Dipati. Menurut Hikayat Banjar, gelar Nanang diberikan untuk kalangan keluarga Ampu Jatmika yang disebut Kadang Haji (haji= raja), sedangkan keluarga isteri Ampu Jatmika tidak mendapat gelar tersebut atau juga diberikan kepada lelaki dari kalangan biasa yang menikah dengan puteri Sultan misalnya Nanang Sarang (digunakan pada abad ke-17).
- Seorang lelaki keturunan Arab yang menikah dengan puteri Sultan akan mendapat gelar Pangeran Serip (Syarif), sedangkan puteri Sultan tersebut menjadi isteri permaisuri disebut Ratu Serip (Ratu Syarif)³⁹.

Pada Hari Ahad tanggal 12 Desember 2010 atau bertepatan dengan tanggal 06 Muharram tahun 1432 Hijriyah merupakan hari bersejarah bagi kerabat Kerajaan Banjar . Dengan dihadiri kurang lebih 23 Raja se-Nusantara ditambah utusan dari negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura, hari itu Pangeran Haji Khairul

³⁹van Dijk, Ludovicus Carolus Desiderius; George Willem Vreede (1862). Neêrlands vroegste betrekkingen met Borneo, den Solo-

Archipel, Cambodja, Siam en Cochinchina: een nagelaten werk. J. H. Scheltema. hlm. 23.

Saleh resmi dinobatkan sebagai raja muda Kerajaan Banjar untuk meneruskan tradisi para pendahulunya sejak Pangeran Samudera (Sultan Suriansyah) membangun dinasti raja-raja Banjar di Kampung Kuin, sampai era kepemimpinan seorang raja Banjar yang fenomenal Sultan Muhammad Seman yang memimpin Pemerintahan Pagustian penerus Kerajaan Banjar di pedalaman hutan belantara Kalimantan yang sekarang termasuk ke dalam wilayah administratif Propinsi Kalimantan Tengah.

Hampir lebih dari seratus tahun sejak Sultan Muhammad Seman tewas dalam suatu pertempuran sengit melawan pasukan Belanda, ketika beliau bersama-sama dengan para panglima perang dari suku Dayak dan anggota pasukannya mempertahankan benteng terakhir di Kalang Barah. Sejak itu Kerajaan Banjar seolah-olah hilang dari pentas sejarah.

Saat ini di era modern di mana dunia seakan tak berjarak, tantangan menanti raja muda Banjar Pangeran Haji Khairul Saleh dalam memimpin kembali sebuah kerajaan yang pernah berjaya pada abad ke-17 sampai ke-19 Masehi di belahan tengah Nusantara sebagai kerajaan maritim. Kerajaan Banjar dan sejarahnya, serta beberapa fakta berkenaan dengan angka-angka tahun maupun sisa-sisa peninggalan/warisan sejarah Banjar yang masih ada di masa sekarang ini. Fenomena ini sangat menarik perhatian, apalagi bila dikaitkan dengan dilantiknya raja muda Banjar di kota Martapura Darussalam, yang merupakan pusat Kerajaan Banjar terakhir sebelum di bumi-hanguskan oleh tentara kolonial Hindia Belanda. Hal ini tentu saja menarik, karena tidak semua orang

tahu tentang hal ikhwal mengenai Kerajaan Banjar yang memang pernah ada di Benua Kalimantan.

C. Masa kejayaan

Sebagaimana kerajaan lainnya di Nusantara pada abad ke-16 dan ke-17, Kerajaan Banjarmasin yang terletak di pesisir dan muara sungai besar sekitar Muara Kuin sekarang, menggantungkan perekonomiannya di bidang perdagangan dan pelayaran luar negeri. 'Lada' sebagai produk utama kerajaan ini menjadikan 'Bandarmasih' sebagai pelabuhan antara bagi pelayaran laut dari Makassar ke wilayah barat Nusantara. Pada waktu itu kekuasaan raja keempat Sultan Mustain Billah ('Marhum Panembahan' 1595 M – 1620 M) Kerajaan Banjarmasin dengan pusatnya di Karang Intan Martapura setelah keraton di Kuin yang luluh lantak oleh hantaman meriam VOC Belanda pada tahun 1612M, menjadi kerajaan yang disegani oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Menurut sebuah berita Belanda, Kerajaan Banjarmasin pernah memiliki prajurit sampai berjumlah 50.000 orang. Dengan kekuatan tentara sebanyak itu, wajar bila kemudian Banjarmasin mampu membendung pengaruh Tuban, Arosbaya maupun Mataram yang bermaksud 'menggantikan' dominasi Demak. Tahun 1615 M, raja-raja Tuban dan Arosbaya pernah memerangi Kerajaan Banjarmasin karena mereka menuntut agar Banjar tunduk pada mereka⁴⁰. Usaha penaklukan Tuban maupun Arosbaya di Jawa Timur berakhir ketika Tuban dan Arosbaya ditaklukkan oleh tentara-tentara Sultan Agung dari Kerajaan Mataram pada tahun 1619 M. Mungkin itu pula sebabnya mengapa kerajaan-kerajaan Tanah Bumbu dan Pagatan, Pulau Laut, Kerasikan, Pasir, Berau, Kutai di pantai timur, maupun Kotawaringin, Landak, Sukadana, Mempawah, Sambas di belahan tengah dan barat pulau

⁴⁰ Lihat J.K.J.de Jonge, dalam [ab](#)Hermanus Johannes de Graaf, *Puncak kekuasaan Mataram: politik ekspansi Sultan Agung*, Grafitipers, 1986 H.J.de Graaf

Kalimantan mengakui pertuanan Kerajaan Banjarmasin.

Hubungan Banjarmasin dengan Kerajaan Mataram pernah mengalami masa-masa menyenangkan, yaitu dengan datangnya perutusan Kerajaan Banjarmasin di ibukota Kerajaan Mataram pada pertengahan bulan Oktober 1641 M. Sekitar pertengahan bulan Oktober 1641 M, tibalah seorang utusan raja Banjarmasin di Jepara dengan pengiring sebanyak 500 orang⁴¹. Utusan yang berjumlah besar ini diizinkan datang di kota istana. Utusan besar-besaran dari Kerajaan Banjarmasin yang bertandang ke Kerajaan Mataram meninggalkan bekas-bekasnya dalam cerita-cerita tradisional di kedua kerajaan.

Di Jawa diceritakan dalam babad tahunan. Babad Sangkala mencatat pada tahun Jawa 1564 Saka atau bertepatan dengan tahun 1642 Masehi; Putusan Banjar prapta seba mring Mataram, 'utusan-utusan Banjar mengadakan kunjungan kehormatan pada Mataram'. Hal ini dicatat dalam Dagregister tertanggal 1 September 1632 M.

Hubungan baik juga terjalin dengan pemerintah Kerajaan Belanda hal ini terbukti persetujuan antara Kompeni dan Kerajaan Banjarmasin pada tanggal 4 September 1635 M

Di era Sultan Mustain Billah pula Kerajaan Banjarmasin mampu meluaskan pengaruhnya ke belahan lain pulau Kalimantan, yaitu dengan cara mengirim salah seorang puteranya yang bernama Pangeran Adipati Anta Kesuma mendirikan Kerajaan Kotawaringin pada tahun 1679 M. Generasi kelima dari dinasti raja-raja Banjarmasin inilah yang menurunkan raja-raja Kotawaringin sekarang. Pangeran Adipati Anta Kesuma sesudah resmi menjadi raja Kerajaan Kotawaringin kemudian diberi gelar Ratu Begawan. Selain

⁴¹ Lihat Laporan Umum, 12 Desember 1641, Jonge hlm.248 dan Dagregister, 22 Oktober 1641

di pulau Kalimantan, Kerajaan Banjarmasin juga membina hubungan baik dengan kerajaan lain di Nusantara.

Salah seorang cucu Marhum Panembahan (nama lain Sultan Mustain Billah) yang bernama Raden Subangsa yang tidak lain adalah saudara lain ibu dengan Pangeran Singamarta, dikawinkan dengan dua orang puteri raja Kerajaan Selaparang yang menguasai pulau Lombok dan Sumbawa. Raden Subangsa sendiri yang di kemudian hari sesudah lama menetap di Kerajaan Selaparang diberi gelar Pangeran Taliwang. Dari perkawinan itu lahir anak dan keturunan Raden Subangsa atau Pangeran Taliwang, yang mana menurut cerita-cerita rakyat di kepulauan Nusa Tenggara terutama di Kerajaan Bima, bangsawan dari Kerajaan Banjarmasin inilah yang menurunkan raja-raja yang ada disana⁴².

Misi pengiriman Raden Subangsa ke Kerajaan Selaparang oleh pihak istana Kerajaan Banjarmasin ini diperkirakan terjadi dalam era pemerintahan Sultan Ri'ayatullah atau Sultan Tahlilullah, atau dengan sebutan yang lebih dikenal untuk masa itu, Pangeran Ratu, yang diperkirakan memerintah Kerajaan Banjarmasin antara tahun 1642 M - 1660 M.

Kesultanan Banjar mulai mengalami masa kejayaan pada dekade pertama abad ke-17 dengan lada sebagai komoditas dagang,. Sebelumnya Kesultanan Banjar membayar upeti kepada Kesultanan Demak, tetapi pada masa Kesultanan Pajang penerus Kesultanan Demak, Kesultanan Banjar tidak lagi mengirim upeti ke Jawa.

Supremasi Jawa terhadap Banjarmasin, dilakukan lagi oleh Tuban pada tahun 1615M untuk menaklukkan Banjarmasin dengan bantuan Madura (Arosbaya) dan Surabaya, tetapi gagal karena

⁴² Lihat Sumarsono, *'Urang Banjar dan Kebudayaannya*.

mendapat perlawanan yang sengit. Sultan Agung dari Mataram (1613–1646), mengembangkan kekuasaannya atas pulau Jawa dengan mengalahkan pelabuhan-pelabuhan pantai utara Jawa seperti Jepara dan Gresik (1610 M), Tuban (1619 M), Madura (1924 M) dan Surabaya (1625 M). Pada tahun 1622 M Mataram kembali merencanakan program penjajahannya terhadap kerajaan sebelah selatan, barat daya dan tenggara pulau Kalimantan, dan Sultan Agung menegaskan kekuasaannya atas Kerajaan Sukadana tahun 1622 M.

Seiring dengan hal itu, karena merasa telah memiliki kekuatan yang cukup dari aspek militer dan ekonomi untuk menghadapi serbuan dari kerajaan lain, Sultan Banjar mengklaim Sambas, Lawai, Sukadana, Kotawaringin, Pemuang, Sampit, Mendawai, Kahayan Hilir dan Kahayan Hulu, Kutai, Pasir, Pulau Laut, Satui, Asam Asam, Kintap dan Swarangan sebagai vazal dari kerajaan Banjarmasin, hal ini terjadi pada tahun 1636 M.

Sejak tahun 1631 M Banjarmasin bersiap-siap menghadapi serangan Kesultanan Mataram, tetapi karena kekurangan logistik, maka rencana serangan dari Kesultanan Mataram sudah tidak ada lagi. Sesudah tahun 1637 M terjadi migrasi dari pulau Jawa secara besar-besaran sebagai akibat dari korban agresi politik Sultan Agung. Kedatangan imigran dari Jawa mempunyai pengaruh yang sangat besar sehingga pelabuhan-pelabuhan di pulau Kalimantan menjadi pusat difusi kebudayaan Jawa. Di samping menghadapi rencana serbuan-serbuan dari Mataram, kesultanan Banjarmasin juga harus menghadapi kekuatan Belanda. Pada tahun 1637 Banjarmasin dan

Mataram mengadakan perdamaian setelah hubungan yang tegang selama bertahun-tahun. Perang Makassar (1660-1669) menyebabkan banyak pedagang pindah dari Somba Opu, pelabuhan kesultanan Gowa ke Banjarmasin. Mata uang yang beredar di Kesultanan Banjar disebut **doit**.

Sebelum dibagi menjadi beberapa daerah (kerajaan kecil), wilayah asal Kesultanan Banjar meliputi provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kerajaan Tanjungpura pada lokasi Tanjung Sambar (Ketapang) dan sebelah timur berbatasan dengan Kesultanan Pasir pada lokasi Tanjung Aru. Pada daerah-daerah pecahannya, rajanya bergelar Pangeran, hanya di Kesultanan Banjar yang berhak memakai gelar Sultan. Kesultanan-kesultanan lainnya mengirim upeti kepada Kesultanan Banjar, termasuk Kesultanan Pasir yang ditaklukan tahun 1636 M dengan bantuan Belanda. Kesultanan Banjarmasin merupakan kerajaan terkuat di pulau Kalimantan. Sultan Banjar menggunakan perkakas kerajaan yang bergaya Hindu⁴³.

Abad ke-17 itu juga merupakan saat memuncaknya perdagangan lada yang merupakan satu-satunya komoditi ekspor Kerajaan Banjarmasin. Banjarmasin saat itu menjadi bandar dari daerah-daerah penghasil lada terbesar di dunia, dan mampu melayani perdagangan lada internasional. Aktivitas pelayaran dan perdagangan yang dibiayai dengan modal penguasa dan para bangsawan Banjar membuat armadanya mampu melintasi lautan. Mereka berlayar ke pesisir utara Pulau Jawa, Makassar, Lombok, Sumbawa, Batavia, Banten, Brunei sampai ke Aceh, Siam dan Chocin Cina. Para

⁴³(https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Banjar)

penguasa kemudian berusaha memperoleh tanah garapan yang lebih luas untuk lahan penanaman lada. 'Aroma' lada yang harum dan menggiurkan membuat semua orang terbius ingin memilikinya. Penanaman lada kemudian makin berkembang seiring kedatangan pedagang-pedagang bermodal dari luar yang membawa serta keluarga dan kapa-kapal besarnya. Mereka adalah penduduk bandar-bandar besar di pesisir utara Jawa yang melarikan diri ketika kota-kota itu diserbu oleh pasukan Sultan Agung, dan sebagian lagi berasal dari Johor, Malaka, Aceh, Banten dan Makassar yang lebih dulu datang. Kedatangan para saudagar ini makin menambah ramai iklim perdagangan di Kerajaan Banjarmasin.

Sesudah jatuhnya Makassar dan Banten -berturut-turut tahun 1669 dan 1583- yang melumpuhkan ekonomi mereka sama sekali akibat keserakahan VOC Belanda dalam memberlakukan sistem monopoli perdagangan, Banjarmasin yang terletak di tengah-tengah Kepulauan Nusantara menjadi penyambung urat nadi perdagangan bebas, yang di beberapa bagian Kepulauan Nusantara telah diputuskan oleh hegemoni VOC Belanda.

Kedatangan orang-orang Melayu ke Banjarmasin diperkirakan terjadi jauh sebelum tahun 1526 M (yaitu perhitungan masa berdiri dan dibentuknya kerajaan ini oleh Pangeran Samudera atau Sultan Suriansyah). Sejak penolakan Sultan Malaka, Mahmud Syah, terhadap kedatangan orang-orang Portugis di bandar Malaka pada tahun 1509 M, mulailah merebak benih-benih permusuhan. Lalu ketika kota palabuhan yang ramai itu direbut armada Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511 M, banyaklah penduduk Melayu di Malaka (yang sebagian besar beragama Islam, termasuk saudagar-saudagar asal Gujarat dan tanah Arab) memindahkan kegiatannya ke wilayah-wilayah lain di Nusantara termasuk ke Banjarmasin yang saat itu mayoritas dihuni orang-orang Ngaju, dengan tujuan agar mereka tetap dapat

melanjutkan usaha perniagaan mereka secara bebas dan aman sekaligus membendung pengaruh kristenisasi Portugis. Orang-orang Banjar yang menjadi warga negara Kerajaan Banjar saat itu mempunyai jiwa bahari dan berbakat dagang. Pedagang-pedagang Banjar bergerak dari jual beli eceran hingga ekspor impor. Berlayar dan berniaga menjadi tradisi sampai pada masa Perang Dunia II. Seluruh wilayah Nusantara, bahkan kemudian mencapai negeri Siam dan Chocin Cina mampu diarungi dan disinggahi para pelaut dan pedagang Banjar. Sebaliknya, mereka yang dari luar atau pedagang-pedagang asing pun singgah untuk berniaga di Banjarmasin.

Dengan perahu-perahu layarnya, para pedagang asing Tiongkok, Siam, Joho, Jawa, Palembang, Portugis, Inggris, Belanda datang silih berganti merapat di Bandarmasih untuk berniaga barang-barang komoditi seperti emas, permata, cengkih, lada, pala, champor, kulit buaya, mutiara, rotan, besi dan lain-lain. Sedangkan Banjar mengimpor perhiasan, porselen, garam, gula, tawas dan keperluan sandang untuk penduduknya.

Di antara pedagang asing yang memasuki wilayah Kerajaan Banjar, orang Belanda lah yang paling serakah. Bangsa ini memang terkenal dengan pameo 'tuntutan yang banyak tetapi memberi sedikit'. Untuk meraih hak monopoli pada suatu komoditi tertentu maka dilakukannyalah cara-cara yang tidak sehat, yang selalu diakhiri dengan permusuhan dan pertempuran yang saling memusnahkan loji-loji (gudang komoditi sekaligus benteng pertahanan) maupun armada kapal mereka. Hal ini berturut-turut terjadi pada tahun 1638 M, 1694 M, dan 1707 M.

Silih bergantinya pertikaian dalam keluarga kerajaan ke pertikaian yang lain, kemudian peperangan ke peperangan yang lain terutama dengan bangsa-bangsa asing pendatang dari benua Eropa baik Inggris maupun Belanda, telah membawa kerajaan yang sempat mengalami masa kejayaan pada kurun waktu Abad ke-17 M dan ke-

18 M ini pada keruntuhannya. Campur tangan Kompeni Belanda terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam Kerajaan Banjar begitu mengusik perasaan dan memicu ketidak-senangan para elite penghuni istana maupun rakyat dan para pemimpinnya, serta para ulama Banjar. Rakyat dalam Kerajaan Banjar merasakan bahwa dengan adanya penetrasi pihak asing dari bangsa lain serta masuknya agama Nasrani, maka tradisi lama dan agama Islam akan terancam.

Kekecewaan ini makin mengemuka ketika Belanda menghendaki Pangeran Tamjidillah (cucu Sultan Adam, dan anak oleh Sultan Muda Abdurrahman dari isteri selir seorang Cina) yang menjadi raja, menggantikan Sultan Adam, kakek dari Pangeran Tamjidillah sendiri. Sedangkan Pangeran Hidayatullah yang paling berhak atas tahta Kerajaan Banjar karena lahir dari isteri Sultan Muda Abdurrahman yang berasal dari keturunan raja yaitu Ratu Siti, makin tersisihkan dan tidak diakui hak-haknya. Hal ini mengakibatkan ketegangan politik yang terus saja meletup-letup, dimulai pada tahun 1852 M sampai tahun 1859 M yang kemudian menyulut api peperangan selama hampir 50 tahun, dan melibatkan sampai tiga generasi keturunan pahlawan-pahlawan perang Banjar. Gerakan perlawanan yang kemudian mencetuskan Perang Banjar merupakan perang yang terbesar dan menyeluruh dalam wilayah Kerajaan Banjarmasin yang meliputi atau sekarang termasuk dalam daerah administratif propinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan sebagian kecil wilayah yang ada di propinsi Kalimantan Timur. Perang tidak juga berhenti walau Pangeran Antasari kemudian wafat oleh karena faktor usia yang sudah lanjut pada tanggal 11 Oktober 1862 M.

Peperangan berlanjut terus secara sporadis. Para generasi penerus Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin (Pangeran Antasari) mendirikan 'Pemerintahan Pegustian' sebagai penerus

Kerajaan Banjar di Gunung Bundang Sungai Laung pada tahun 1863 M. Oleh para pemimpin rakyat dan panglima perang serta kepala-kepala suku Dayak yang ada di pedalaman Barito, putra-putra Pangeran Antasari Gusti Muhammad Said dan Gusti Muhammad Seman diangkat sekaligus sebagai 'panembahan' dan 'sultan'. Sepeninggal Panembahan Muhammad Said pada tahun 1875 M, otomatis Sultan Muhammad Seman sendirian yang memimpin Pemerintahan Pegustian dan menjadi raja Kerajaan Banjarmasin terakhir.

Setelah berjuang selama hampir mendekati 50 tahun, Sultan Muhammad Seman gugur sebagai syuhada dalam suatu pertempuran sengit yang terjadi untuk ke sekian kalinya di benteng pertahanan sekaligus pusat pemerintahan Kerajaan Banjarmasin terakhir di benteng Kalang Barah, Baras Kuning ketika melawan pasukan korps marsose Belanda pada pertengahan bulan Januari 1905 M.

D. Kehidupan Sosial Budaya

Dalam kehidupan masyarakat Banjar terdapat susunan dan peranan sosial yang berbentuk limas (lapisan). Lapisan paling atas adalah golongan penguasa yang merupakan golongan minoritas. Mereka adalah kaum bangsawan atau "bubuhan raja-raja". Penghargaan masyarakat terhadap golongan bangsawan ini sesuai dengan derajat kebangsawanannya. Mereka, secara turun-temurun, menjadi golongan terhormat dan berdarah bangsawan, serta mempunyai gelar-gelar seperti sultan, pangeran, ratu, gusti, andin, antung, dan nanang. Golongan ini mempunyai hak memungut cukai dari hasil bumi, hasil pertanian, perikanan dan lain-lain⁴⁴.

⁴⁴(<http://library.utm.edu.my/emelakakoleksi%20melakasejarahmn2008.pdf>)

Golongan kedua adalah pejabat kerajaan, ulama-ulama, mufti, dan penghulu. Golongan ini langsung berhubungan dengan penduduk. Segala macam barang yang mereka beli dari masyarakat dan di bayar dengan uang. Mufti sebagai pejabat formal mengurus segala perkara hukum pada tingkat tinggi. Sementara ulama-ulama menyampaikan ajaran agama Islam. Golongan ketiga merupakan golongan terbesar, yaitu rakyat biasa. Mereka itu adalah golongan yang hidup dari bertani dan perdagangan kecil-kecilan, nelayan, kerajinan, industri, dan pertukangan. Golongan bawah adalah golongan pandeling. Golongan pandeling adalah mereka yang kehilangan setengah kemerdekaan akibat hutang-hutang yang tak dapat mereka bayar. Biasanya, merekalah yang menjalankan perdagangan dari golongan bangsawan atau pedagang-pedangan kaya. Golongan ini berakhir pada abad ke-19, seiring dengan dihapuskannya Kerajaan Banjar oleh Belanda.

Berkaitan dengan kehidupan budaya, telah berkembang beberapa corak seni dan sastra. Saat itu, Banjar telah memiliki gamelan yang dipukul dengan lemah lembut, seni sastra berkembang dengan menggunakan huruf Arab Melayu (Jawi), dan kemungkinan, juga telah berkembang suatu seni, hasil perpaduan antara tonil Melayu dan cerita Seribu Satu Malam. Seni ukir berkembang karena adanya kebiasaan para bangsawan dan orang kaya untuk membuat rumah secara mewah, yang dipenuhi dengan ukiran indah. Corak seni lain yang juga telah berkembang dan amat kuat dipengaruhi kebudayaan Islam adalah *mahidin* dan

balamut. Ini semua menunjukkan bahwa, di Kerajaan Banjar telah berkembang suatu seni budaya dengan coraknya yang khas.

Bab III

Biografi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari

A. Masa Kecil

Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdur Rahman al-Banjari atau lebih dikenal dengan nama Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari lahir di Lok Gabang, 17 Maret 1710 M meninggal di Dalam Pagar, 3 Oktober 1812 M pada umur 102 tahun atau 15 Shofar 1122 – 6 Syawwal 1227 H) adalah ulama *fiqih* mazhab Syafi'i yang berasal dari kota Martapura di Tanah Banjar (Kesultanan Banjar), Kalimantan Selatan. Beliau hidup pada masa tahun 1122-1227 hijriyah. Beliau mendapat julukan anumerta **Datu Kelampaian**. Beliau adalah pengarang Kitab *Sabilal Muhtadin* yang banyak menjadi rujukan bagi banyak pemeluk agama Islam di Asia Tenggara.⁴⁵

Beberapa penulis biografi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, antara lain Mufti Kerajaan Indragiri Abdurrahman Siddiq, berpendapat bahwa ia adalah keturunan Alawiyyin melalui jalur Sultan Abdurrasyid Mindanao. Jalur nasabnya ialah Maulana Muhammad Arsyad Al Banjari bin Abdullah bin Tuan Penghulu Abu Bakar bin Sultan Abdurrasyid Mindanao bin Abdullah bin Abu Bakar Al Hindi bin Ahmad Ash Shalaibiyah bin Husein bin Abdullah bin Syaikh bin Abdullah Al Idrus Al Akbar (datuk seluruh keluarga Al

⁴⁵Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari Pengarang *Sabilal Muhtadin*, oleh Abdullah Hj W. Moh. Shagir, Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, Tahun 1990. Dan *Syajaratul Arsyadiyah*, Mathba'ah Ahmadiyah Singapura, oleh Abd Rahman Shiddiq (Tuan Guru Sapat, Mufti Kesultanan Indragiri) Cetakan I. Tahun 1356 H.

Aidrus) bin Abu Bakar As Sakran bin Abdurrahman As Saqaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Maula Ad Dark bin Alwi Al Ghoyyur bin Muhammad Al Faqih Muqaddam bin Ali Faqih Nuruddin bin Muhammad Shahib Mirbath bin Ali Khaliqul Qassam bin Alwi bin Muhammad Maula Shama'ah bin Alawi Abi Sadah bin Ubaidillah bin Imam Ahmad Al Muhajir bin Imam Isa Ar Rumi bin Al Imam Muhammad An Naqib bin Al Imam Ali Uraidhy bin Al Imam Ja'far As Shadiq bin Al Imam Muhammad Al Baqir bin Al Imam Ali Zainal Abidin bin Al Imam Sayyidina Husein bin Al Imam Amirul Mu'minin Ali Karamallah wajahah wa Sayyidah Fatimah Az Zahra binti Rasulullah SAW.

Sejak dilahirkan, Muhammad Arsyad melewati masa kecil di desa kelahirannya Lok Gabang, Martapura. Sebagaimana anak-anak pada umumnya, Muhammad Arsyad bergaul dan bermain dengan teman-temannya. Namun pada diri Muhammad Arsyad sudah terlihat kecerdasannya melebihi dari teman-temannya. Begitu pula akhlak budi pekertinya yang halus dan sangat menyukai keindahan. Diantara kepandaiannya adalah seni melukis dan seni tulis. Sehingga siapa saja yang melihat hasil lukisannya akan kagum dan terpukau. Pada saat Sultan Tahlilullah sedang bekunjung ke kampung Lok Gabang, sultan melihat hasil lukisan Muhammad Arsyad yang masih berumur 7 tahun. Terkesan akan kejadian itu, maka Sultan meminta pada orang tuanya agar anak tersebut sebaiknya tinggal di istana untuk belajar bersama dengan anak-anak dan cucu Sultan. Di istana, Muhammad Arsyad tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia, ramah, penurut, dan hormat kepada yang lebih tua. Seluruh penghuni istana menyayanginya dengan kasih sayang. Sultan sangat memperhatikan pendidikan Muhammad Arsyad, karena sultan

mengharapkan Muhammad Arsyad kelak menjadi pemimpin yang alim.

B. Menimba ilmu di Mekkah

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mendapat pendidikan penuh di Istana sehingga usia mencapai 30 tahun. Kemudian ia dikawinkan dengan seorang perempuan bernama *Tuan Bajut*.⁴⁶

Ketika istrinya mengandung anak yang pertama, terlintasl di hati Muhammad Arsyad suatu keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu di tanah suci Mekkah. Maka disampaikannyalah hasrat hatinya kepada sang istri tercinta. Meskipun dengan berat hati mengingat usia pernikahan mereka yang masih muda, akhirnya isterinya mengamini niat suci sang suami dan mendukungnya dalam meraih cita-cita. Maka, setelah mendapat restu dari sultan berangkatlah Muhammad Arsyad ke Tanah Suci mewujudkan cita-citanya. Deraian air mata dan untaian doa mengiringi kepergiannya.

Di Tanah Suci, Muhammad Arsyad mengaji kepada *masyaikh* terkemuka pada masa itu. Di antara guru beliau adalah Syekh 'Athailah bin Ahmad al-Mishry, al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi dan al-'Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim al-Samman al-Hasani al-Madani.

Syekh yang disebutkan terakhir adalah guru Muhammad Arsyad di bidang tasawuf, dimana di bawah bimbingannya Muhammad Arsyad melakukan suluk dan khalwat, sehingga mendapat ijazah darinya dengan kedudukan sebagai khalifah. Selain

⁴⁶ Sudrajat, A. Suryana (2006). *Ulama pejuang dan ulama petualang: belajar kearifan dari Negeri Atas Angin*. Erlangga. hlm. 77. ISBN9797816079. ISBN 9789797816070

itu guru-guru Muhammad Arsyad yang lain seperti Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im ad Damanhuri, Syekh Muhammad Murtadha bin Muhammad az Zabidi, Syekh Hasan bin Ahmad al Yamani, Syekh Salm bin Abdullah al Basri, Syekh Shiddiq bin Umar Khan, Syekh Abdullah bin Hijazi asy Syarqawy, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz al Maghrabi, Syekh Abdurrahman bin Sulaiman al Ahdal, Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin al Fathani, Syekh Abdul Gani bin Muhammad Hilal, Syekh Abis as Sandi, Syekh Abdul Wahab at Thantawy, Syekh Abdullah Mirghani, Syekh Muhammad bin Ahmad al Jauhari, dan Syekh Muhammad Zain bin Faqih Jalaludin Aceh.

Selama menuntut ilmu di sana, Syekh Muhammad Arsyad menjalin persahabatan dengan sesama penuntut ilmu seperti Syekh Abdussamad Falimbani, Syekh Abdurrahman Misri, dan Syekh Abdul Wahab Bugis. Setelah lebih kurang 35 tahun menuntut ilmu di Maekkah dan Madinah, timbulah niat untuk menuntut ilmu ke Mesir. Ketika niat ini disampaikan dengan guru mereka, Syekh menyarankan agar keempat muridnya ini untuk pulang ke Jawi (Indonesia) untuk berdakwah di negerinya masing-masing. Sebelum pulang, keempat sahabat sepakat untuk berhaji kembali di Tanah Suci Mekkah. Pada saat itu tanpa disangka-sangka Syekh Muhammad Arsyad bertemu dengan adik kandung beliau yaitu Zainal Abidin yang sedang menunaikan ibadah haji. Sang adik membawa kabar berita bahwa anak beliau yaitu Fatimah sudah beranjak dewasa dan sang anak menipkan cincin kepada beliau. Melihat hal demikian, tiga sahabat Syekh Muhammad Arsyad masing-masing mengajukan lamaran untuk memperisteri anak beliau. Setelah berpikir lama, Syekh Muhammad Arsyad memutuskan untuk mengundi, lamaran yang akan diterima. Hasil pengundian ternyata lamaran Syekh Abdul Wahab Bugis yang diterima. Untuk itu diadakahnlah ijab kabul pernikahan antara Syekh Abdul Wahab Bugis dengan Fatimah binti

Syekh Muhammad Arsyad, yang dinikahkan langsung oleh Syekh Muhammad Arsyad sambil disaksikan dua sahabat lainnya.

Maka bertolaklah keempat putra Nusantara ini menuju kampung halaman. Memasuki wilayah Nusantara, mula-mula mereka singgah di Sumatera yaitu di Palembang, kampung halaman Syekh Abdussamad Al Falimbani. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Betawi, yaitu kampung halaman Syekh Abdurrahman Misri. Selama di Betawi, Syekh Muhammad Arsyad diminta menetap sebentar untuk mengajarkan ilmu agama dengan masyarakat Betawi. Salah satu peristiwa penting selama di Betawi adalah ketika Syekh Muhammad Arsyad membetulkan arah kiblat Masjid Jembatan Lima, Masjid Luar Batang dan Masjid Pekojan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, masyarakat sekitar Masjid Jembatan Lima menuliskan di atas batu dalam aksara arab melayu (tulisan jawi) yang bertuliskan bahwa kiblat masjid ini telah diputar ke kanan sekitar 25 derajat oleh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada tanggal 4 Safar 1186 H.

Setelah dirasa cukup, maka Syekh Muhammad Arsyad dan Syekh Abdul Wahab Bugis berlayar menuju kampung halaman ke Martapura, Banjar. Pada Bulan Ramadhan 1186 H bertepatan 1772 M, sampailah Muhammad Arsyad di kampung halamannya, Martapura, pusat Kesultanan Banjar pada masa itu. Akan tetapi, Sultan Tahlilullah, seorang yang telah banyak membantunya telah wafat dan digantikan kemudian oleh Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidullah I, yaitu cucu Sultan Tahlilullah. Sultan Tahmidullah yang pada ketika itu memerintah Kesultanan Banjar, sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan serta kemajuan agama Islam di kerajaannya.

Sultan Tahmidullah II menyambut kedatangan beliau dengan upacara adat kebesaran. Segenap rakyatpun mengelu-elukannya

sebagai seorang ulama "Matahari Agama" yang cahayanya diharapkan menyinari seluruh Kesultanan Banjar. Aktivitas beliau sepulangny dari Tanah Suci dicurahkan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Baik kepada keluarga, kerabat ataupun masyarakat pada umumnya. Bahkan, sultan pun termasuk salah seorang muridnya sehingga jadilah dia raja yang 'alim lagi wara' Selama hidupnya ia memiliki 29 anak dari tujuh isterinya.

C. Eksistensi dan Relasi dengan Kesultanan/Masyarakat

Pada waktu ia berumur sekitar 30 tahun, Sultan mengabdikan keinginannya untuk belajar ke Mekkah demi memperdalam ilmunya. Segala perbelanjaannya ditanggung oleh Sultan. Lebih dari 30 tahun kemudian, yaitu setelah gurunya menyatakan telah cukup bekal ilmunya, barulah Syekh Muhammad Arsyad kembali pulang ke Banjarmasin. Akan tetapi, Sultan Tahlilullah seorang yang telah banyak membantunya telah wafat dan digantikan kemudian oleh Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidullah I, yaitu cucu Sultan Tahlilullah.

Sultan Tahmidullah II yang pada ketika itu memerintah Kesultanan Banjar, sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan serta kemajuan agama Islam di kerajaannya. Sultan inilah yang meminta kepada Syekh Muhammad Arsyad agar menulis sebuah Kitab Hukum Ibadat (Hukum Fiqh), yang kelak kemudian dikenal dengan nama *Kitab Sabilal Muhtadin*.

Makam Datu Kalampayan yang sering dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah pelopor pengajaran Hukum Islam di Kalimantan Selatan. Sekembalinya ke kampung halaman dari Mekkah, hal pertama yang dikerjakannya ialah membuka tempat pengajian (semacam pesantren)

bernama *Dalam Pagar*, yang kemudian lama-kelamaan menjadi sebuah kampung yang ramai tempat menuntut ilmu agama Islam. Ulama-ulama yang dikemudian hari menduduki tempat-tempat penting di seluruh Kerajaan Banjar, banyak yang merupakan didikan dari suraunya di Desa Dalam Pagar. Di samping mendidik, ia juga menulis beberapa kitab dan risalah untuk keperluan murid-muridnya serta keperluan kerajaan. Salah satu kitabnya yang terkenal adalah *Kitab Sabilal Muhtadin* yang merupakan kitab Hukum-Fiqh dan menjadi kitab-pegangan pada waktu itu, tidak saja di seluruh Kerajaan Banjar tapi sampai ke-seluruh Nusantara dan bahkan dipakai pada perguruan-perguruan di luar Nusantara Dan juga dijadikan dasar Negara Brunai Darussalam.

D. Karya-karyanya

Tradisi kebanyakan ulama, ketika mereka belajar dan mengajar di Mekah, sekali gus menulis kitab di Mekah juga. Lain halnya dengan Syekh Muhammad Arsyad bin `Abdullah al-Banjari, walaupun dipercayai bahawa beliau juga pernah mengajar di Mekah, namun karya yang dihasilkannya ditulis di Banjar sendiri. Lagi pula nampaknya beliau lebih mencurahkan khidmat derma baktinya di tempat kelahirannya sendiri yang seolah-olah tanggungjawab rakyat Banjar terbeban di bahunya. Ketika mulai pulang ke Banjar, sememangnya beliau sangat sibuk mengajar dan menyusun segala macam bidang yang bersangkutan-paut dengan dakwah, pendidikan dan pentadbiran Islam. Walaupun begitu beliau masih sempat menghasilkan beberapa buah karangan. Karya-karya Syekh Arsyad banyak ditulis dalam bahasa Arab Melayu atau Jawi yang memang diperuntukkan untuk bangsanya. Meskipun ia memiliki kemampuan menulis berbagai kitab dalam bahasa Arab, tapi, ia lebih suka menuliskannya dalam bahasa Jawi. Ia mengajarkan kitab-kitab

semacam Ihya Ulumiddin karya Imam Ghazali kepada para muridnya. Karangannya yang sempat dicatat adalah seperti berikut di bawah ini:

1. Tuhfah ar-Raghibin fi Bayani Haqiqah Iman al-Mu'minin wa ma Yufsiduhu Riddah ar-Murtaddin, diselesaikan tahun 1188 H/1774 M
2. Luqtaḥ al-'Ajlan fi al-Haidhi wa al-Istihadhah wa an-Nifas an-Nis-yan, diselesaikan tahun 1192 H/1778 M.
3. Sabil al-Muhtadin li at-Tafaqquhi fi Amri ad-Din, diselesaikan pada hari Ahad, 27 Rabiulakhir 1195 H/1780 M
4. Risalah Qaul al-Mukhtashar, diselesaikan pada hari Khamis 22 Rabiulawal 1196 H/1781 M.
5. Kitab Bab an-Nikah.
6. Bidayah al-Muḥtadi wa 'Umdah al-Auladi
7. Kanzu al-Ma'rifah
8. Ushul ad-Din
9. Kitab al-Faraid
10. Hasyiyah Fat-h al-Wahhab
11. Mushhaf al-Quran al-Karim
12. Fat-h ar-Rahman
13. Arkanu Ta'lim as-Shibyan
14. Bulugh al-Maram
15. Fi Bayani Qadha' wa al-Qadar wa al-Waba'
16. Tuhfah al-Ahbab
17. Khuthbah Muthlaqah Pakai Makna. Kitab ini dikumpulkan semula oleh keturunannya, Abdur Rahman Shiddiq al-Banjari. Dicitak oleh Mathba'ah Al-Ahmadiyah, Singapura, tanpa dinyatakan tarikh cetak.
18. Tulisan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani, "Maka disebut oleh yang empunya karangan Tuhfatur Raghibin fi

Bayani Haqiqati Imanil Mu'minin bagi 'Alim al-Fadhil al-'Allamah Syeikh Muhammad Arsyad."

19. Tulisan Syeikh 'Abdur Rahman Shiddiq al-Banjari dalam Syajaratul Arsyadiyah, "Maka mengarang Maulana (maksudnya Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, pen:) itu beberapa kitab dengan bahasa Melayu dengan isyarat sultan yang tersebut, seperti Tuhfatur Raghibin ..." Pada halaman lain, "Maka Sultan Tahmidullah Tsani ini, ialah yang disebut oleh orang Penembahan Batu. Dan ialah yang minta karangkan Sabilul Muhtadin lil Mutafaqqih fi Amrid Din dan Tuhfatur Raghibin fi Bayani Haqiqati Imani Mu'minin wa Riddatil Murtaddin dan lainnya kepada jaddi (Maksudnya: datukku, pen al-'Alim al-'Allamah al-'Arif Billah asy-Syeikh Muhammad Arsyad bin 'Abdullah al-Banjari."
20. Pada cetakan Istanbul, yang kemudian dicetak kembali oleh Mathba'ah Al-Ahmadiyah, Singapura tahun 1347 H, iaitu cetakan kedua dinyatakan, "Tuhfatur Raghibin ... ta'lif al-'Alim al-'Allamah asy-Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari." Di bawahnya tertulis, "Telah ditashhikkan risalah oleh seorang daripada zuriat muallifnya, iaitu 'Abdur Rahman Shiddiq bin Muhammad 'Afif mengikut bagi khat muallifnya sendiri ...". Di bawahnya lagi tertulis, "Ini kitab sudah cap dari negeri Istanbul fi Mathba'ah al-Haji Muharram Afandi".
21. Terakhir sekali Mahmud bin Syeikh 'Abdur Rahman Shiddiq al-Banjari mencetak kitab Tuhfah ar-Raghibin itu disebutkan cetakan yang ketiga, nama Syeikh Muhammad Arsyad bin 'Abdullah al-Banjari tetap dikekalkan sebagai pengarangnya. Kitab Ushuluddin yang biasa disebut Kitab Sifat Duapuluh,
22. Kitab Tuhfatur Raghibin, yaitu kitab yang membahas soal-soal itikad serta perbuatan yang sesat,

23. Kitab Nuqtatul Ajlan, yaitu kitab tentang wanita serta tertib suami-isteri,
24. Kitabul Fara-idl, hukum pembagian warisan.⁴⁷

Dari bukti-bukti di atas, terutama yang bersumber daripada Syeikh Daud bin `Abdullah al-Fathani dan Syeikh `Abdur Rahman Shiddiq adalah cukup kuat untuk dipegang kerana keduanya ada hubungan dekat dengan Syeikh Muhammad Arsyad bin `Abdullah al-Banjari itu. Syeikh Daud bin `Abdullah al-Fathani adalah sahabat Syeikh Muhammad Arsyad bin `Abdullah al-Banjari sedangkan Syeikh `Abdur Rahman Shiddiq pula adalah keturunan Syeikh Muhammad Arsyad bin `Abdullah al-Banjari. Mengenai karya-karya Syeikh Muhammad Arsyad bin `Abdullah al-Banjari yang tersebut dalam senarai, insya-Allah akan dibicarakan pada kesempatan yang lain. Masih banyak lagi tulisan dan catatan syaikh yang disimpan kalangan muridnya yang kemudian diterbitkan di Istambul (Turki), Mesir, Arab Saudi, Mumbai (Bombai), Singapura, dan kemudian Jakarta Surabaya, dan Cirebon. Di samping itu beliau menulis satu naskah al Quranul Karim tulisan tentang beliau sedikit, yang sampai sekarang masih terpelihara dengan baik.

Kitab karya Syekh Muhammad Arsyad yang paling terkenal ialah Kitab Sabilal Muhtadin, atau selengkapnya adalah Kitab *Sabilal Muhtadin lit-tafaqquh fi amriddin*, yang artinya dalam terjemahan bebas adalah "Jalan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk untuk mendalami urusan-urusan agama". Syekh Muhammad Arsyad telah menulis untuk keperluan pengajaran serta pendidikan, beberapa kitab serta risalah dan beberapa pelajaran penting yang langsung diajarkannya, oleh murid-

muridnya kemudian dihimpun dan menjadi semacam Kitab Hukum Syarat, yaitu tentang syarat syahadat, sembahyang, bersuci, puasa dan yang berhubungan dengan itu, dan untuk mana biasa disebut Kitab Parukunan. Sedangkan mengenai bidang Tasawuf, ia juga menuliskan pikiran-pikirannya dalam Kitab Kanzul-Makrifah. Ada pun karyanya yang pertama, yaitu Tuhfah ar-Raghibin, kitab ini sudah jelas atau pasti karya Syeikh Muhammad Arsyad bin `Abdullah al-Banjari bukan karya Syeikh `Abdus Shamad al-Falimbani seperti yang disebut oleh Dr. M. Chatib Quzwain dalam bukunya, Mengenal Allah Suatu Studi Mengenai Ajaran Tasawuf Syeikh Abdus Samad AI-Falimbani, yang berasal daripada pendapat P. Voorhoeve. Pendapat yang keliru itu telah saya bantah dalam buku Syeikh Muhammad Arsyad (1990).

Bab. IV

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Kekuasaan

A. Interaksi dengan Kekuasaan

Struktur politik kerajaan di Nusantara, yang berbentuk "Kesultanan" pada abad XIX, umumnya di bawah kendali raja (*King centrist*). Raja/Sultan adalah aktor politik, pemilik otoritas politik tertinggi. Demikian halnya struktur politik di Kerajaan Banjar pada abad XIX, tidak jauh berbeda dengan Kesultanan Islam lainnya di kawasan Nusantara. Sultan Banjar memiliki otoritas penuh, dalam menentukan garis-garis kebijakan politik dan instrumen-instrumen politik.

⁴⁷ Jusuf Halidi, *Ulama Besar Kalimantan : Sech Muhammad Arsyad al-Banjari*, (Martapura : Yayasan al-Banjari, 1968).

Yang sedikit membedakan antara Kerajaan Banjar dengan kerajaan lain di Nusantara adalah adanya lembaga musyawarah, disebut “Dewan Mahkota”⁴⁸ yang terdiri dari kerabat (*bubuhan*) raja-raja, kelompok kerabat Istana. Lembaga ini sudah muncul sejak abad ke 17 di Kesultanan Banjar yang diketuai Mangkubumi. Pejabat ini, biasanya sangat mengetahui tentang persoalan-persoalan; politik, ekonomi dan sosial-budaya. Tidak heran, jika di antara mereka dapat mempengaruhi Sultan, dan pada suatu situasi tertentu dapat merebut kedudukan Sultan.

Pangeran Tamjidillah yang bergelar Sultan Sepuh, sebenarnya adalah seorang mantan Mangkubumi Kesultanan Banjar masa pemerintahan Sultan Hamidullah (1700 M–1734 M). Ketika Sultan Hamidullah wafat, Pangeran Tamjidillah ditunjuk sebagai Wali Putera Mahkota, Pangeran Aliuddin Aminullah. Pangeran Tamjidillah sendiri adalah adik dari Sultan Hamidullah atau Paman (*Paanang*) dari Pangeran Aliuddin Aminullah. Pangeran Tamjidillah mengangkat dirinya sebagai Sultan Banjar.

Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari⁴⁹ datang ke Banjar Kalimantan Selatan pada pertengahan abad XVIII,

dalam situasi kesultanan berada di bawah kekuasaan “Dinasti Baru”, serta struktur dan sistem politik “Terpusat” di tangan Sultan/Raja. Oleh karena itu, untuk mengkaji hubungan, posisi dan peran Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam dinamika interaksi kekuasaan di Kesultanan Banjar memerlukan pemahaman yang mendalam dan serius. Karena idiom “Politik/Kekuasaan” terkadang tersamarkan oleh realitas “Pertentangan” elite politik (bangsawan). Untuk itu konsep ilmu politik (kekuasaan) dengan segala aspeknya perlu dilihat sebagai alat untuk menganalisis hubungan dan interaksi ulama dengan raja/sultan dalam konteks sistem kekuasaan kerajaan nusantara ini, khususnya di kerajaan Banjar.

Jika dikaji secara makro, strategi politik dakwah Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari agar misi dakwahnya dapat tercapai dilakukan dengan cara mendekati Sultan terlebih dahulu, kemudian memberikan pemikiran-pemikiran konstruktif guna kebaikan pemerintahan. Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah ulama yang benar-benar Arif dapat diterima oleh semua kalangan elite bangsawan Kesultanan Banjar, termasuk Sultan sendiri. Lambat laun perjuangannya

⁴⁸ Dewan Mahkota ini diketuai oleh Mangkubumi dengan empat deputi. Yaitu: *Pangiwa, Panganan, Gampiran, dan Panumping*. Keberadaan dewan mahkota tentunya tidak selalu ada dan sama, baik bentuk maupun personil tergantung kebijakan sultan yang berkuasa saat itu. Liha J.J. Ras, *Hikayat Banjar : A Study in Malay Historiography*, (Martinus Nijhoff: The Hague, 1968), hlm. 233. A.A. Cense, *De Kroniek Van Banjarmasin*, Poefschriff, CA. Mess Santpoort (NH), hlm.109. Dan Idwar Shaleh, *Papper Trade and the Rulling Class of Banjarmasin in the Seventeenth Century*, (Leiden: Ducth-Indonesian Historical Conference, 1978). Lihat pula Milner AC, *Islam and Malay Kingship*, (JRAS, 1981). Dan Islam and The Muslim State, dalam M.B. Hooker (ed), *Islam in South East Asia*, (Leiden: Brill), hlm. 23-49

⁴⁹ Untuk biografi lengkap Muhammad Arsyad, lihat, Zamzam, *Syeikh Muhammad Arsyad*; Jusuf Halidi, *Ulama Besar Kalimantan: Sjech Muhammad Arsyad al Banjari*, (Martapura: Jajasan al Banjari, 1968). Tamar Djaja, “Sjech M. Arsyad Banjar,” dalam *Pustaka Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965). Shagir Abdullah, *Syeikh Muh. Arsyad Al Banjari, Matahari Islam*, (Pontianak: Al Fathanah, 1983). Abu Daudi, *Maulana Syeikh Moh. Arsyad al Banjari*, (Martapura: Sullamul’ulum, 1980). M.S. Kadir. “Syeikh Muhammad Arsyad al Banjari Pelopor Dakwah Islam di Kalimantan Selatan,” *Mimbar Ulama*, (Vol 6, 1976), hlm. 69-79.

mendekati garis birokrasi kerajaan berimplikasi pada dapat diterimanya beliau secara pribadi dan pemikirannya dikalangan bangsawan dan lapisan masyarakat bawah.

Kesultanan Banjar pada abad XVIII adalah kesultanan Islam. Secara konsepsional, tujuan sebuah kesultanan tentunya dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya. Di samping itu tujuan lainnya adalah untuk memberikan kebebasan bagi rakyat untuk kreatif dalam segala bidang kehidupan, termasuk berdagang. Berdagang sendiri bagi kalangan masyarakat Banjar merupakan pekerjaan "primadona".

Kesultanan Banjar pada awal abad XVIII dipandang sebagai kerajaan bebas dan berhasil mengalahkan penetrasi asing dalam bidang ekonomi. Terbukti dengan adanya pelabuhan kerajaan Banjar sebagai pusat perdagangan Lada⁴⁹. Keadaan ekonomi dan politik yang stabil pada abad XVIII itu, sangat mendukung bagi Kesultanan Banjar untuk "mengirim putera terbaiknya, yaitu "Arsyad" anak angkat Sultan Hamidullah (1700 M-1734 M) untuk belajar ke luar negeri di Mekah dan Madinah. Arsyad (Syeikh Muhammad Arsyad) dibiayai oleh Sultan (Kesultanan) sejak berangkat sampai pulang pada masa Pangeran Tamdjidillah yang bergelar Sultan Sepuh (1734 M-1759 M).

Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari disambut oleh Sultan Banjar dengan penuh suka cita. Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari dikawinkan dengan cucu Sultan, yang

bernama Ratu Aminah. Sultan juga meminta dibuatkan sebuah kitab, yang kemudian dikenal dengan kitab *Sabil al Muhtadin*.⁵¹ Sultan memberi hadiah tanah di lingkungan Martapura, yang sekarang disebut "dalam pagar"⁵².

Gambaran tersebut memberikan makna, bahwa Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari telah memberikan "visi" kepada Sultan, untuk mewujudkan "masyarakat Islam" dalam kerangka kedaulatan Kesultanan Banjar. Di samping "*Political Will*" Sultan untuk melakukan kebijakan pemerintahan yang memberikan ruang bagi berkembangnya Islam. Hal ini kemudian berujung pada berjalannya sistem pemerintahan yang stabil. Di sisi lain "karisma" Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari bersinar dan menggema di wilayah kerajaan Banjar. Hal ini dikarenakan dirinya mampu secara tepat menempatkan posisi sebagai ulama, disamping dapat mengkomunikasikan kepentingan pemerintahan Sultan dengan rakyat Banjar. Ulama sebagai panutan masyarakat, diharapkan oleh Sultan dapat menjadi media komunikasi dalam menjaga stabilitas pemerintahan.

Dengan berjalannya waktu dan seiring dengan perkembangan hubungan antara Sultan dan rakyat, maka dapat dikatakan bahwa misi dakwah yang diemban oleh Syeikh Muhammad Arsyad dapat berjalan dengan baik tanpa rintangan politik. Strategi dakwah yang dikembangkan oleh Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah strategi politik kesultanan. Artinya jika sultan "merestui", berarti secara

⁵⁰ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emperium Sampai Imperium*, Jilid 1, (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm.25.

⁵² Kampung ini terletak di daerah Martapura Kabupaten Banjar, kira-kira satu jam perjalanan darat dari kota Banjarmasin sekarang ini.

⁵¹ Kitab ini sebagai salah satu karya monumental Muhammad Arsyad al Banjari yang berisikan tentang hukum Islam (fikih).

politis telah menjadi putusan tertinggi yang wajib didukung oleh siapapun, termasuk kerabat (*bubuhan*) raja.

Legitimasi pihak kesultanan bagi Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari berarti kemenangan politik dakwahnya untuk menumbuhkan kembangan tatanan masyarakat Islami. Meskipun sultan/raja Pangeran Tamjidillah sendiri tentunya “mengharapkan” legitimasi politik untuk kekuasaannya. Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah “anak angkat” dari Sultan Hamidullah, atau “saudara angkat” dari Putera Mahkota. Dalam dinamika internal kerajaan, khususnya intrik-intrik yang terjadi dalam pergulatan kekuasaan kerajaan Banjar. Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari memiliki berbagai pertimbangan yang bijaksana dan taktis. Sebagai “*Arif Billah*”, dirinya lebih mengedepankan kemaslahatan umat atau kepentingan yang lebih besar daripada persoalan-persoalan “Tahta” yang cuma bermanfaat bagi elite Bangsawan kesultanan/kerajaan Banjar saja.

Dalam fase abad ke XVII-XVIII, terjadi pergulatan antara emporium dan imperium serta “komunikasi” yang diselenggarakan oleh para penyebar Islam, baik pedagang, musafir, ulama dan kaum sufi. Dengan adanya fenomena ini berdampak semakin diakuinya peranan ulama dalam struktur komunitas pribumi, bahkan ada yang menduduki jabatan birokrasi kerajaan⁵³.

Ambary memberikan penjelasan bahwa di dalam cerita sejarah yang termaktub pada naskah-naskah abad XVII-XIX, tampak peranan ulama, wali dan penyebar Islam berfungsi

sebagai pendukung legitimasi kekuasaan raja. Legitimasi tersebut dilakukan melalui isyarat-isyarat *genealogist* maupun kesinambungan keturunan yang diperlukan. Hal ini dilakukan dalam kerangka menciptakan transformasi yang baik tanpa halangan yang berarti. Islam yang dakwahkan oleh Syeikh Muhammad Arsyad ternyata mampu dicerna oleh masyarakat segala kalangan tanpa menimbulkan persoalan baru, khususnya yang terkait dengan benturan antara penguasa dan masyarakat.

Syeikh Muhammad Arsyad al Banjari yang bergelar “Tuan Guru”, adalah refleksi peran ulama pribumi (lokal) Banjar yang telah menjadi “Tokoh”. Dirinya dipandang sukses untuk menerapkan ilmu yang ditimbanya di Tanah Mekkah dan mengamalkan ilmunya di negeri sendiri. Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari memiliki persyaratan lengkap untuk memberi legitimasi bagi Kesultanan/Kerajaan Banjar, yaitu “Ulama Lulusan Mekah” dan “Anak Angkat Sultan Hamidullah”. Status Syeikh Muhammad Arsyad al Banjari mewakili “*Achieved Status*” dan “*Discribed Status*” sekaligus. Pendeknya, Syeikh Muhammad Arsyad al Banjari mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara ulama dengan umara, antara ulama dengan masyarakat dan antara umara dengan rakyat Banjar.

Dalam kerangka penyebaran Islam di Kerajaan Banjar, Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari melakukan pemetaan wilayah kerajaan Banjar. Hal ini dilakukan untuk

⁵³ Lihat Hasan Muarif Ambary, *Dinamika Sejarah dan Sosialisasi Islam di Asia Tenggara Abad 11-17 M*, (Jakarta: Depdikbud, 1997), hlm. 32-33.

memudahkan pembagian wilayah kerjanya. Adapun daerah tersebut meliputi;

1. Pertama adalah Wilayah Kerajaan Banjar, meliputi Istana Raja di Martapura dan berakhir dari titik luar dari daerah Landak ke Berau
2. Kedua adalah wilayah Tanah Laut, Sebelah Barat Meratus dan Sebelah Selatan Banjar, Banjar Lama, Banua Ampat (Banua Padang, Banua Halat, Perigi dan Gadung (Rantau), Margasari, Alai, Amandit, Banua Lima; Nagara, Alabio, Sungai Banar, Amuntai, Kalua, Marabahan dan Daerah Atas Barito.
3. Ketiga adalah wilayah yang meliputi; Tanah Bumbu, Pulau Laut, Karasihan, Pasir, Berau dan Kutai, Pantai Timur, Kotawaringin, Landak, Sukadana, dan Sambas serta Pantai Sebelah Barat.⁵⁴

Dengan izin Sultan, Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari sangat leluasa dalam berdakwah di seluruh daerah kekuasaan kerajaan. Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari menyadari masih banyak penduduk di daerah kekuasaan kerajaan/kesultanan Banjar yang belum masuk Islam, terutama di wilayah Banua Ampat, Banua Lima dan Daerah Atas Barito. Kuatnya tradisi lama yang dapat menyebabkan bahaya “Syirik” di lingkungan penganut agama Islam juga menjadi agenda tersendiri dalam visi dakwahnya.

Atas usaha dan wibawa/karisma Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari, secara politik Kesultanan/Kerajaan Banjar memiliki komitmen melakukan Islamisasi secara kuantitatif dan kualitatif. Gerakan Islamisasi ini, kalau boleh dikatakan adalah “Revolusi Kebudayaan” dalam lingkungan kesultanan/kerajaan Banjar yang dimotori oleh Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari. Sebagai wujud nyata usaha Islamisasi di lingkungan kerajaan/kesultanan Banjar, puncak Islamisasi di Kerajaan Banjar terjadi pada masa pemerintahan Sultan Adam al Wasikbillah (1825 M-1857 M) dengan ditetapkannya hukum Islam sebagai dasar hukum kerajaan Banjar melalui Undang- Undang Sultan Adam. Munculnya lembaga *Mahkamah Syari'ah* dan dikukuhkannya lembaga penghulu yang hirarkinya lebih tinggi dari Jaksa merupakan kontribusi dirinya yang tidak dapat dilupakan begitu saja. Implikasi dari semua itu adalah munculnya fenomena di abad XVII-XVIII, dimana posisi lembaga Panghulu/penghulu sangat menentukan dalam masalah-masalah keagamaan.⁵⁵

Pada masa Sultan Nata Alam (1787 M-1801 M) telah dibentuk lembaga mufti dan Qadi. Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah konseptor dan pelopor pembentukan lembaga tersebut. Hal ini dapat dikatakan sebagai wujud "dakwah-politik" Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari. Dirinya turut memberikan inspirasi bagi pembagian kekuasaan meskipun, saat itu putusan tertinggi tetap di tangan Sultan/Raja.

⁵⁴ Lihat J.J. Ras, *Hikayat Banjar : A Study in Malay Historiography*, (Leiden, t.p., 1968). Dan J.C. Noorlander, *Banjarmasin de Campagnie in de tveede helth. der 18 de Een*, N. (Leiden: Dubbeldemen, 1935).

⁵⁵ Gazali Usman, *Kerajaan Banjar, sejarah Perkembangan Politik Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam*, (Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 1994), hlm. 44.

Sultan telah membagi kewenangan yang dimilikinya dalam persoalan hukum. Hukum tidak lagi bersumber pada institusi tunggal birokratik kesultanan, sebagaimana biasanya penetapan hukum bersandar pada tradisi. Pengadilan di Kesultanan Banjar kemudian bersumber pada hukum Islam.

Seiring dengan berdirinya lembaga tersebut, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mengarang kitab Fiqih, yang menjadi rujukan dalam memutuskan perkara. Lembaga Pengadilan di Kesultanan Banjar pada akhir abad XVIII, menggunakan kitab fiqh tersebut sebagai acuan hukumnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari telah berperan pada aspek politik dan kekuasaan. Pembatasan wewenang Sultan, bertambahnya institusi kerajaan, diperhatikannya hak-hak rakyat merupakan kontribusi dirinya dalam percaturannya dengan sistem kerajaan Banjar. Akhirnya, pejabat birokratik di bawah Sultan tidak lagi merasa menjadi *superpower* “Paharatnya”, melainkan membaaur jadi satu demi kemakmuran dan penegakan keadilan bersama.

Posisi Sultan dalam Kerajaan/Kesultanan Banjar adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam konteks kekuasaan Sultan tersebut ternyata Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya pengaruh yang ditimbulkan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari terhadap kebijakan-kebijakan sultan. Kebijakan yang ada juga tidak hanya terfokus pada persoalan keagamaan saja, melainkan merambah kepada kebijakan-kebijakan lainnya, seperti ekonomi-pertanian, hukum dan sosial keagamaan.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari bersikap “hati-hati” dalam menyikapi “suksesi” dan intrik-intrik di lingkungan Istana Kesultanan. Ketika Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari pulang dari Makkah dan tiba di kesultanan Banjar, tahta kesultanan Banjar dipegang oleh Sultan Tamdjidillah (1734-1759). Putra Mahkota yang bernama Pangeran Aliudin Aminullah adalah anak dari Sultan Hamidullah. Pangeran Aliudin Aminullah sengaja dijadikan menantu oleh Sultan Tamdjidillah, agar tidak lagi menuntut haknya. Kenyataan memang demikian. Sebagai putra mahkota dirinya tidak meminta kembali hak atas tahta kesultanan Banjar. Akan tetapi kemudian muncul kenyataan, dimana Pangeran Aliudin Aminullah akhirnya berhasrat ingin merebut tahta kesultanan Banjar dari tangan ayah mertuanya sendiri, sekaligus pamannya. Mengapa Pangeran Aliuddin Aminullah yang tadinya “Diam” dan tidak bernafsu atas tahta, berubah pikiran dan menjadi “aktif” menggagalkan kekuatan?.

Menengarai hal ini, ada beberapa interpretasi logis yang dapat dikaji secara sosio-kultural dalam perspektif historis kerajaan Banjar. Beberapa latar belakang dan alasan dapat diungkapkan di bawah ini;

1. Kondisi politik pada saat itu sangat terkait dengan kerabat “*Bubuhan Raja-raja*”. Bubuhan ini, menampung kumpulan elite bangsawan kesultanan Banjar. Para elite bangsawan ini, memiliki berbagai kepentingan, termasuk kepentingan ekonomi dan politik. Pada abad XVII, konflik kubu-kubu pro Inggris dan Belanda dalam persaingan perdagangan Lada, dapat dijadikan rujukan untuk memahami motif pencetus konflik abad XVIII ini. Kelompok tertentu dari bermacam personal elite Bangsawan Banjar, berhasil menjadi provokator ulung,

sehingga Pangeran Aliudin Aminullah tergerak untuk memberontak terhadap mertuanya.

2. Sultan Tamdjidillah termasuk Sultan yang cerdas. Siasat politiknya merugikan VOC. Perjanjian Kesultanan Banjarmasin dengan VOC tanggal 18 Mei 1747 yang ditanda tangani Sultan Tamdjidillah dan disetujui Pangeran Aliuddin Aminullah secara sepintas menempatkan pihak VOC (kompeni) pada posisi yang diuntungkan, tetapi pada prakteknya perjanjian itu hanya sekedar siasat kesultanan Banjar untuk melindungi diri dari pengaruh pihak asing. Ternyata masyarakat Banjar selalu mengadakan transaksi perdagangan secara bebas dengan bangsa manapun yang berkehendak membeli lada. Karena itu, perjanjian diperbaharui lagi pada tanggal 20 Oktober 1756 M. Ternyata Pangeran Aliuddin Aminullah secara sepihak, tanpa sepengetahuan mertuanya menandatangani perjanjian dengan VOC di Benteng Tatas, pada tanggal 27 Oktober 1756. Kasus ini memberikan penjelasan, bahwa VOC adalah salah satu sebab pencetus pemberontakan yang dilakukan Pangeran Aliuddin Aminullah terhadap mertuanya, Sultan Tamdjidillah. VOC “meracuni” pikiran Pangeran Aliuddin Aminullah dengan kekuasaan dan iming-iming bantuan pasukan⁵⁶.

Pangeran Aliuddin Aminullah yang sudah terobsesi menempati tahta Kesultanan Banjarmasin, menjadikan Tabonio sebagai markas sembari mengumpulkan kekuatan. Tabonio menurut *Ondskvopman Ringholm*⁵⁷ adalah pusat

perdagangan gelap paling ramai di Kalimantan pada abad XVII-XVIII.

Setelah kekuatannya terbilang cukup, Pangeran Aliuddin Aminullah beserta pasukan mulai bergerak dari Tabonio menuju Martapura, lokasi istana Sultan saat itu. Ketika Sultan Tamdjidillah mengetahui serbuan menantunya, kemudian mempertimbangkan baik-buruknya, benar-salahnya agar tidak terjadi pertumpahan darah di kalangan kerabat (*bubuhan*) sendiri. Setelah melalui pemikiran panjang, maka tahta kesultanan Banjar diserahkan kepada Pangeran Aliuddin Aminullah pada tahun 1759 M. Pangeran Aliuddin Aminullah memerintah selama 3 tahun (1759 M-1761 M). beliau meninggal dunia karena penyakit yang diidapnya.

Dalam kasus di atas dapat dilihat bagaimana peran yang diberikan Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari. Dirinya tidak hanya diam untuk tidak memberikan kontribusi positif, melainkan melakukan beberapa hal yang dipandang sebagai sebuah pemikiran. Adapun hal-hal yang dilakukannya antara lain;

- a. Sultan Tamdjidillah sebagai Sultan yang berpengalaman menganggap Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari sebagai “Guru” sekaligus Sahabatnya. Dalam menghadapi serbuan menantunya, Sultan Tamdjidillah selalu meminta “*Papadah*” (nasehat) dari Syeikh Muhammad Arsyad Al- Banjari. Nasehat yang diberikan kepada Sultan tamdjidillah adalah agar beliau mundur

⁵⁶ Arsip Nasional, *Surat-Surat Perjanjian Antar Kesultanan Banjarmasin dengan Pemerintah VOC, Inggris dan Hindia Belanda 1635-1860*, (Jakarta, 1965).

⁵⁷ J.C. Noorlander, *Op.Cit.*, hlm. 38

dari tahtanya dan meyerahkan kepada Sultan Alauddin. Hal ini dilakukan dalam kerangka menghindari pertumpahan berdarah antar kerabat kerajaan.

- b. Masa pemerintahan Pangeran Aliuddin Aminullah hanya tiga tahun saja (1759 M-1761 M). Sumber Belanda yang pro Pangeran Aliuddin Aminullah menyatakan meninggalnya Pangeran Aliuddin Aminullah direkayasa oleh mertuanya sendiri. Tetapi, perlu diingat, bahwa sebenarnya motivasi untuk berkuasa pada jiwa Pangeran Aliuddin Aminullah adalah karena dorongan provokasi berbagai pihak, termasuk VOC sendiri. Hasrat berkuasa Pangeran Aliuddin Aminullah bukan berasal dari “Sifat Asli” dirinya. Ketika mertuanya (Sultan Tamdjidillah) menyerahkan legalitas Kesultanan kepadanya, mungkin di hatinya timbul rasa penyesalan. Apalagi dalam budaya Banjar mengenal adanya istilah “*Katulahan Lawan Urang Tuha*”⁵⁸. Pangeran Aliuddin Aminullah bagai “Makan Buah Simalakama”, menyebabkan tekanan batin yang membawa kematian bagi dirinya. Sebagai Sultan Baru, Pangeran Aliuddin Aminullah pasti mencari legitimasi dari pihak elite bangsawan dan ulama/*Tuan Guru*. Tidak ada pilihan lain bagi Aliuddin Aminullah kecuali menemui Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari. Syeikh Muhammad Arsyad al Banjari adalah ulama yang “Arif Billah” tentunya memberi nasehat (“*Papadah*”) kepada Pangeran Aliuddin Aminullah yang juga saudara angkatnya. Nasehat-nasehat (*Papadah-papadah*) Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari boleh jadi membawa

dampak psikologis pula bagi Pangeran Aliuddin Aminullah, sehingga dia menjadi sakit, sejenis ada rasa penyesalan, lalu meninggal dunia pada tahun 1761 M.

Selanjutnya, kekuasaan kerajaan Banjar dipegang oleh Pangeran Nata Alam (1787 M-1801 M), anak dari Sultan Tamdjidillah. Nata Alam menjadi Sultan, sebab tiga orang anak dari Pangeran Aliuddin Aminullah masih kecil, yaitu Pangeran Abdullah, Pangeran Rahmat dan Pangeran Amir. Pangeran Abdullah dan Pangeran Rahmat meninggal dalam usia muda. Sedangkan Pangeran Amir, setelah dewasa berupaya merebut kekuasaan dari Pangeran Nata Alam. Pangeran Amir pada tahun 1785 M, meminta bantuan Arung Turawe, untuk menyerang Martapura. Pasukannya berjumlah 3.000 orang dengan kekuatan 60 buah perahu. Pasukan ini mendarat di Tabonio melakukan pembunuhan terhadap rakyat yang tidak berdosa, memusnahkan kebun lada rakyat dan menawan mereka. Pasukan ini laksana perampok saja. Akibatnya Pangeran Amir tidak mendapat simpati⁵⁹. Sebaliknya, justru Pangeran Nata Alam lebih mendapat simpati dari rakyat Banjar.

Dari peristiwa tersebut, dapat dipahami alasan keberpihakan Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari terhadap Pangeran Nata Alam. Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari menyadari persoalan kekuasaan erat hubungannya dengan kepemimpinan. Kepemimpinan Pangeran Nata Alam sendirinya mendapat legitimasi dari Syeikh Muhammad

⁵⁸ Durhaka terhadap orang tua sehingga mendapat murka dari Allah swt.

⁵⁹ Lihat Idwar Shaleh, *Selayang Pandang Mengenal Bangkitnya Kerajaan Banjarmasin, Posisi, Fungsi dan Artinya dalam sejarah Indonesia dalam Abad ke 17*,

(Bandung, KPPK, Balai Pendidikan Guru, tth.), hlm. 125; Lihat pula Arsip Nasional, *Decentralisatie, Kies voorschriften Manado Zuider En Oosterafdeeling Van Borneo*, 19 Maart 1930 nomor 7

Arsyad Al Banjari dan sebagian besar elite bangsawan, disamping disenangi oleh rakyat banyak.

Tahun 1787 M untuk menjaga stabilitas kekuasaannya, sekaligus stabilitas keamanan rakyat dilakukan kontrak antara VOC dengan penguasa kerajaan Banjar. Dalam kontrak ini Sultan menyerahkan beberapa wilayah kepada VOC. Adapun wilayah tersebut antara lain; Pasir, Laut Pulo, Tabonio, Mendawai, Sampit, Pambuang, Kotawaringin. Sultan menjadi vazai VOC, langsung menguasai daerah sendiri, putera mahkota pilihan VOC dan adanya jaminan dari VOC, bahwa tahta Kesultanan Banjar seterusnya hanya dari keturunan Pangeran Nata Alam saja.

Ternyata, kontrak 1787 M ini dalam prakteknya sebuah nol besar. VOC hanya menjadi obyek semata. Kontrak 1787 M dan 1797 M adalah “Sandiwara Politik” Kesultanan Banjar dengan Pangeran Nata Alam sebagai sutradaranya. Daerah-daerah yang diserahkan kepada VOC pun daerah kosong dari hasil budi daya tanaman ekspor.

Fenomena ini semua memberikan penjelasan bahwa, hubungan, sikap dan peran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari terhadap pemerintah Sultan Nata Alam juga sangat besar dalam memarginalkan VOC. Adapun kontribusinya dapat digambarkan sebagai berikut;

- a. Penetrasi VOC semakin menyempitkan eksistensi kebebasan perdagangan rakyat Banjar. Sultan Nata Alam dapat menyiasati keadaan politik eksternal kesultanan dengan melakukan “kontrak bohongan”, untuk menipu

Belanda VOC, yang selalu ingin monopoli perdagangan. Keadaan yang dihadapi kesultanan Banjar, akibat penetrasi ekonomi perdagangan dari VOC ini memerlukan sejenis dukungan moral, di antaranya dari para Tuan Guru, Alim Ulama di Martapura. Dalam konteks ini, Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari menganggap Sultan Nata Alam memerlukan taktik yang tepat, agar “kedaulatan” kesultanan tetap eksis. Sultan Nata Alam sendiri dapat bertukar pikiran dan minta nasehat/ “Papadah” kepada Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari. Biasanya *papadah* yang ditelorkan bersifat umum dan normatif, sehingga masih membutuhkan penafsiran sendiri.

- b. Ketika Sultan Nata Alam memerintah, usia Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari telah cukup tua. Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari tidak lagi sepenuhnya ikut memikirkan soal-soal pemerintahan (baca:duniawi). Tidak dapat dilupakan bahwa terkurasnya tenaga dan pikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah untuk berdakwah. Bahkan beliau menyempatkan waktu menulis Al-Qur’an dengan tangan beliau sendiri. Menurut A.B. Lopian⁶⁰ bahwa Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari sebagai ulama yang sukses berdakwah di Kalimantan Selatan, dengan murid-muridnya yang tersebar di Kepulauan Indonesia, di Tanah Semenanjung Melayu, Muang Thai Selatan dan Filipina Selatan.

Selama Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari menjadi penasehat para Sultan Banjar, fakta sejarah

⁶⁰ A.B. Lopian, “Memperluas Cakrawala Melalui Sejarah Lokal”, dalam *Prisma* No. 8 Agustus 1980, Tahun IX, hlm. 5

menunjukkan kuatnya hegemoni VOC terhadap kesultanan Banjar. Namun, kedaulatan Kesultanan terpelihara dari rongrongan pihak-pihak asing. Rakyat Banjar bebas berdagang dan bebas beribadah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian peran politik Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari sangat menentukan bagi keberlangsungan pemerintah Kesultanan/Kerajaan. Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari, sehingga mampu menjaga harmonisasi dari berbagai pihak yang berkonflik. Perpecahan internal elite bangsawan, tidak berdampak buruk bagi integrasi Kesultanan. Tekanan-Tekanan eksternal dari VOC, teratasi dengan “Strategi Kontrak” yang dimainkan oleh para Sultan Banjar melalui nasehat yang telah diberikan Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari.

Pada masa Sultan Sulaiman Saidullah (1801-1825). Istana Kesultanan dipindahkan ke Karang Intan. Posisi ini menunjukkan semakin jauhnya Istana dari posisi Sungai Martapura. Aktifitas politik Sultan ini lebih bersifat kompromistis dengan VOC. Sultan Sulaiman Saidullah diangkat sebagai Sultan, atas ketetapan kompeni - memerintah tanah kompeni dan wakil kompeni dalam menjaga dan memelihara seperti milik Sultan sendiri. Hasil-hasil bumi dipungut oleh Sultan. Demikian isi kontrak Sultan Nata Alam dengan kompeni tahun 1787 M.

Mencermati kontrak yang ada dapat dikatakan bahwa Sultan Sulaiman Saidullah memerintah dengan aman dan penghidupan rakyat pun berjalan lancar. Kontrak tahun 1787

M adalah kecenderungan politik Sultan Nata Alam, meskipun Tanah Banjar seolah-olah tergadai, padahal Urang Banjar tetap merdeka menggarap tanahnya. Dalam kurun waktu pemerintahan Sultan Sulaiman Saidullah, diperkirakan aktifitas Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari sudah mulai menurun. Usia Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari sudah cukup senja. Akhirnya Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari wafat pada 6 Syawal 1227 H (13 Oktober 1812) dan dimakamkan di Kalampayan.⁶¹

Sepeninggal Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari, konflik istana tidak terelakkan lagi. Belanda mencampuri langsung persoalan tahta Kesultanan, sehingga pada tahun 1856 pecah “*Perang Banjar*” dan akhirnya kesultanan Banjar dihapuskan Belanda pada tahun 1860 M. Dalam waktu kurang lebih setengah abad setelah Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari tiada, kedaulatan kesultanan Banjar telah runtuh. Namun demikian pondasi “keimanan dan Ketaqwaan” kepada Allah SWT, telah menjadikan Islam sebagai motivator anti kolonialisme Belanda di bumi Banjar pada fase perjalanan sejarah selanjutnya.

B. Faktor Yang Mempengaruhi

Dalam sebuah ketetapan Sultan Adam Alwasikubillah selaku Raja dari Kesultanan Banjarmasin, tertulis isnain tanggal 12 bulan Shafar tahun 1259 H; pada alenia terakhir tercantum kalimat sebagai berikut:

⁶¹ Makam beliau terletak di daerah Martapura di desa Kalampayan Kabupaten Banjar sekitar satu setengah jam perjalanan darat dari kota Banjarmasin. Makam beliau ramai dikunjungi sebagai tempat ziarah bagi kaum

muslimin di daerah Kalimantan Selatan dan sekitarnya bahkan dari manca negara sekarang ini. Sehingga Syeikh Muhammad Arsyad al Banjari juga dikenal dengan julukan Datu Kalampayan

“Kemudian aku memberitahu kepada sekalian raja-raja yang lain dan sekalian hamba rakyatku semua mesti merayakan kepada cucuku Andarun Hidayatullah inilah buat ganti Abdur Rakhman adanya.”⁹⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Hidayatullah dalam pandangan Sultan Adam (kakeknya) telah ditetapkan sebagai calon Sultan yang akan menggantikannya bila kelak ia wafat - oleh karena calon sultan terdahulu Sultan Muda Abdur Rakhman (ayah Hidayatullah) telah terlebih dahulu meninggal dunia. Hidayatullah semenjak mendapat surat wasiat penetapan itu, berkedudukan selaku putra mahkota atau Sultan Muda Kesultanan Banjarmasin.

Penunjukkan Hidayatullah selaku putra mahkota oleh Sultan Adam itu didasarkan atas hal, bahwa Hidayatullah selain dianggap sebagai orang yang berhak, juga dianggap paling berbakat dan berwatak kepemimpinan untuk dapat menduduki kedudukan tinggi itu. Keadaan diri Hidayatullah tersebut tidak saja terpandang oleh kalangan istana, rakyat juga oleh kalangan Belanda yang digambarkan oleh W.A. Van Rees dalam buku yang ditulisnya *“De Bandjermasinsche Krijg”*⁹⁸ adalah orang yang paling pantas menjadi Raja/Sultan.

Akan tetapi, di samping Hidayatullah, ada pula saudaranya yang bernama pangeran Tamdjidillah, putra

Sultan Muda Abdur Rahman dari istri selir keturunan Cina yang oleh adat tidak memenuhi syarat memenuhi sultan. Pangeran Tamdjidillah merasa berhak pula menduduki tahta kerajaan Banjarmasin.

Setelah Sultan Muda Abdur Rakhman wafat, hal ini dijadikan sebagai peluang oleh Tamdjidillah dan Belanda untuk merebut kekuasaan tertinggi kesultanan. Tamdjidillah diangkat Belanda menjadi Sultan Muda sekaligus mangkubumi. Kejadian ini bertentangan dengan adat, nilai-nilai luhur yang berlaku di Kesultanan Banjarmasin dan bertentangan pula dengan wasiat Sultan Adam. Satu-satunya dasar pengangkatan Tamdjidillah menjadi sebagai Raja Muda ketika itu hanya karena ia akrab dengan Belanda di Banjarmasin. Sedang sebaliknya bagi Hidayatullah yang menunjukkan sikap tidak bersahabat dengan mereka.⁹⁹

Pihak Belanda dapat memperhitungkan loyalitas Tamdjidillah, juga kepentingan Belanda atas konsesi dagang dan pertambangan yang telah di dapat melalui sultan yang berada di bawah pengaruh Belanda, sedangkan persetujuan itu pasti tidak akan mudah diperoleh pada Hidayat.¹⁰⁰ Menurut Belanda Hidayatullah itu lebih cerdas dan lebih berbahaya. Hal ini diakui dalam statemennya; *“....den besser berechtigten, aber auch energischer und gefahrlicher Hidayat, der schon seit 1858 Reichwesser wer ubergangen hatte.”*¹⁰¹

⁹⁷ Surat asli ketetapan Sultan Adam Alwasikubillah ditulis dalam aksara Arab.

⁹⁸ Lihat: H.G. Mayur, *Loc-Cit.*, hlm. 7 dan 8

⁹⁹ Lihat Tamar Djaja, *Pustaka Indonsia*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), hlm. 493.

Sebagai orang yang berbahaya, tentu tidak akan menguntungkan pihak Belanda. Oleh karena itulah, dua hari setelah Sultan Adam Al Wasik Billah wafat (tanggal 1 Nopember 1857), Belanda mengangkat Tamdjidillah sebagai sultan penuh di Banjarmasin.

Penobatan Sultan baru tersebut ditentang oleh seluruh lapisan masyarakat dan kalangan istana. Rakyat menghendaki agar Hidayatullah diangkat sebagai sultan, karena mengerti aspirasi rakyat dan sikapnya yang tidak menyukai Belanda di Tanah Banjar.

Pengangkatan Tamdjidillah sebagai sultan, semula tidak merupakan permasalahan besar bagi Hidayatullah andaikata sultan dapat merubah sikap dan bisa mengemban amanat rakyat. Namun muncul permasalahan yang menyangkut diri pribadi Sultan Tamdjidillah, dimana dirinya sering melanggar aturan-aturan agama, sewenang-wenang dalam penetapan pajak, terutama kedudukannya sebagai sultan yang justru memberi konsesi kekuasaan dagang dan politik di Kesultanan Banjar dengan Belanda yang membuat Hidayatullah turun tangan menentangnya. Semula Hidayatullah tidak menerima kedudukan yang disodorkan Tamdjidillah dan Belanda sebagai Mangkubumi, akan tetapi suatu pemikiran jauh yang telah disepakati bersama Sultan Adam menyebabkan Hidayatullah menerima kedudukan itu, dengan demikian dapat meminimalisasikan tindakan-tindakan sultan yang absolut, dan kekuatan politik Belanda. Namun Hidayatullah sesungguhnya lah menjadi

Sultan Banjarmasin yang terpilih secara “de facto” dan atas pengakuan rakyat dan surat ketetapan Sultan Adam, kemudian secara “de jure”¹⁰⁴ Hidayatullah merupakan orang yang disetujui adat dan tata nilai / hukum yang berlaku turun temurun.

Hidayatullah dipandang oleh pihak Belanda sebagai Mangkubumi, dan sebagai sultan dalam pandangan masyarakat. Hal ini dikarenakan tugas-tugasnya yang membawanya lebih berwibawa, dengan memberi gelar dan jasa kepada siapapun yang dianggapnya layak. Kondisi inilah yang menyebabkan Hidayatullah dapat mengumpulkan sekian banyak pengikut untuk berperang melawan kelaliman dan kebobrokan Belanda.

Beberapa tahun setelah Hidayatullah menjadi Mangkubumi dan telah merasa saatnya melakukan gerakan pengusiran terhadap Belanda, Hidayatullah dan para pengikutnya tidak lagi menentang kehadiran penjajah Belanda secara diam-diam dan bersandiwara politik, namun secara terang-terangan melakukan pemberontakan.

“....tetap bersitegang leher, bertahan untuk menarik diri dari segala bentuk kerjasama dengan wakil pemerintahan Hindia Belanda =hardnekkig blijft volharden om zich te onttrekken aan iedere samenwerking mer den vertegenwoordiger, van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement....dan ini terjadi, biarpun ia oleh Kolonel Andressen, Ajudan Luar Biasa Sri Maha Raja, Komisaris

¹⁰¹ E.D. Kriele, *Das Evangelium bei im Dajak auf Borneo* Barmen.

¹⁰⁰ H.G. Mayur., *Op. Cit.*, hlm. 10.

Pemerintah untuk wilayah Borneo bagian Selatan dan Timur. Telah berkali-kali diundang untuk turut dengannya mempersembahkan pemulihan yang menyeluruh dan segera=...en zulks niettegenstaande de hem door den Kolonel Andressen, Ujudant den Konings in buitengewoone dients, gouvernements-commissaris voor de Zuideren Ooster-afdeling van Borneo, bij herhaling gedane dringende uitnodiging om zich bij dezen aan te sluiten tot bevordering van een spoedigen algeheel herstel der rust. Hidayatullah pada tanggal 5 Pebruari 1860, oleh pemerintah Belanda telah dicopot dari jabatannya sebagai mangkubumi Kerajaan Banjarmasin=Den Pangeran Hidayatoellah vervallen te verklaren van zijn waardigheid als rijksbestierder van het rijk van Bandjarmasin."¹⁰²

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa, ketika Hidayatullah diberi penawaran, berunding dengan orang yang paling berkuasa atas nama pemerintahan Hindia Belanda di Borneo Selatan dan Timur, untuk tetap bekerja sama dengan Belanda sebagai Mangkubumi, dan melakukan pemulihan menyeluruh atas Kesultanan dari kehancuran kerajaan dan bahkan ia ditawarkan sebagai penguasa tertinggi di kesultanan Banjar Hidayatullah menolak. Ini merupakan pernyataan kebencian yang amat sangat dari Hidayatullah atas penjajahan Belanda di Banjarmasin.

Akibat penolakan Hidayatullah untuk berunding dan bekerjasama dengan Belanda, maka ultimatum Belanda adalah perang terhadapnya. Kemudian Belanda mengeluarkan *besluit* penghapusan kesultanan Banjarmasin pada tanggal 11 Juni 1860, hal ini menyebabkan kemarahan rakyat "*het zelfbesturend Rijk van Bandjarmasin heeft opgehouden tebesten*"¹⁰³ padahal dalam kontrak, kerajaan ini dinyatakan sebagai benda (barang) pinjaman yang bakal tiada boleh mati; *een wettig en onsterfelijk leen.*"¹⁰⁴

Dengan adanya tindakan sepihak dari Belanda ini, Hidayatullah tidak merasa terikat lagi dengan segala macam perjanjian yang telah pernah ada yang direncanakan dan dipersiapkan Belanda; "*geanuleerd, kragteloos gemaakt te niet gedaan.*"¹⁰⁵

Tidaklah mengherankan kalau kemudian tawaran pihak Belanda untuk mengangkatnya sebagai tawaran berarti pengikatan diri sendiri dan seluruh Kesultanan Banjarmasin terbelenggu oleh kolonialisme yang sudah sejak semula tidak disukainya. Juga tidaklah mengherankan kalau Hidayatullah tidak menolak penobatan dirinya sebagai Sultan oleh rakyat di tengah berkecamuknya perang, dengan gelar Sultan Hidayatullah Alwasikubillah karena Hidayat hanya menghendaki kembalinya kesultanan Banjarmasin atas nama rakyat, bukan Belanda.

¹⁰² Lihat : Surat-surat perjanjian antara Kesultanan Banjarmasin dengan pemerintahan Belanda-VOC, Bataafse Republiek, Inggris dan Hindia Belanda, 1635-1860, terbitan Arsip Nasional RI, hlm. 262-263.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 128.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 265.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 124.

Hidayatullah adalah raja (Sultan) Banjarmasin yang lepas dari Belanda, merdeka, berdaulat dan penentang terhadap kaum penjajah hingga menyebabkan Kerajaan Banjarmasin yang berdiri sejak abad XIV menjadi lebur dihapuskan Belanda. Namun keberadaannya tertanam dalam hati sanubari seluruh rakyat dan berlaku efektif di seluruh Kesultanan Timur dan Tengah Borneo. sebagaimana dituliskan Van Rees:

*“Die man was Hidayat, de pangeran, de rijksbestierder; de sulthan orang itu adalah Hidayat, Sang Pangeran; Sang Mangkubumi; Sang Sultan”.*¹⁰⁶

Setelah Hidayatullah ditangkap dan dibuang oleh Belanda ke Cianjur Jawa Barat, Pangeran Antasari dan anaknya (Pangeran Muhammad Seman) memproklamkan diri sebagai Sultan. Namun kekuasaannya bersifat lokal dan tidak berlaku efektif meliputi seluruh Kesultanan Banjar, yang meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan sejak Raja Surianata dan Pangeran Samudra (Sultan Suriansyah) yang memiliki beberapa daerah Kotawaringin, Sukadana dan Lawei dimana semuanya membayar upeti kepada Kerajaan Banjar.¹⁰⁷

Sistem pemerintahan Belanda di Indonesia adalah pemerintahan tidak langsung (*indirect rule*). Dalam

sistem ini di samping para pejabat Belanda yang jumlahnya kecil seperti gubernur, residen, asisten residen, kontrolir dan lain-lain, masih dipakai pejabat yang berasal dari “penguasa setempat / pejabat pribumi” dari kesultanan yang ada untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Penguasa setempat ini di Jawa dikenal dengan sebutan *Pangreh Praja*.¹⁰⁸ Dengan adanya “penguasa setempat” atau *Pangreh Praja*, maka kerajaan kekurangan pejabat dan personalia. Namun disisi lain hal ini menguntungkan karena gajinya lebih murah, daripada pegawai yang harus didatangkan dari Negeri Belanda. Tugas mereka lebih banyak sebagai “pejabat perantara” dari pemerintah Belanda kepada rakyat. Menurut Taufik Abdullah mereka ini berfungsi sebagai “*schakel*” (kalangan perantara) dimana berfungsi sebagai perantara yang terpisah antara yang diperintah dan yang memerintah.¹⁰⁹

Penguasa setempat ini berada langsung di bawah penguasa Belanda. Kalaupun masih ada sultan yang dipertahankan sebagai penguasa setempat, maka kekuasaannya tidak lagi mencakup bidang ekonomi dan militer. Sedangkan untuk biaya hidup, mereka diberi gaji. Penguasa setempat ini terdiri dari Bupati, Patih, Wedana, Camat dan lain-lain termasuk Penghulu.

¹⁰⁶ Lihat J.M.C.E. Le Rutth.e, *Expeditie tegen de versterking van Pangeran Antasari gelegen aan de Montallatrivier*, hlm. 10; dan lihat pula H.G. Mayur., *Op. Cit.*, hlm. 32 dan W.A. Van Rees, *Op. Cit.*, hlm. 162 dan 219.

¹⁰⁷ Sebagai perbandingan; Lihat A.A. Cence, *De Kroniek van Bandjermasin*, Proefschrift MCMXX VIII, Uitgeverij, C.A. Mees Sent Poort (NH), hlm. 109.

¹⁰⁹ Taufik Abdullah, “The Making of a Schakel Society; the Minangkabau Region in the Late 19th Century”, dalam *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia*, Vol 6, iii, 1976, hlm. 13-29.

¹⁰⁸ *Pangreh Praja* yang dalam istilah Belanda disebut *Inlandsch Bestuur* adalah para pejabat yang berasal dari penguasa setempat dari kerajaan tradisional yang langsung berada di bawah pemerintah Belanda.

Kehadiran penguasa setempat dalam pemerintahan kolonial telah memberikan “corak baru” dalam sistem birokrasi kerajaan nusantara. Dalam tradisi penguasa tradisional atau juga disebut *patrimonial*¹¹⁰ tidak dikenal pemisahan kepentingan pribadi dengan jabatan. Raja sebagai penguasa tertinggi memiliki semuanya, baik itu tanah, sungai maupun rakyat. Oleh karena itu tidak jarang terjadi orang bekerja atas perintah raja tanpa mendapat gaji atau seseorang mendapat jabatan karena disenangi raja. Gelar Pangeran dapat saja diberikan raja kepada siapa yang dikehendaki dan dapat pula dicabut kembali.

Kelas sosial didasarkan pada kelahiran, dimana raja berada di puncak piramida sosial, dan rakyat, terutama para budak, menjadi alasnya. Perbedaan kelas ini dinyatakan tidak hanya dalam hak atau kemungkinan hak, tetapi juga dalam titel yang dipakai serta dalam gaya rumah atau perahu serta dalam corak kehidupan keluarga. Walaupun sistem kelas secara teoritis bersifat statis namun secara empirik hal tersebut bersifat dinamis sebagaimana pendapat Van Sevenhoven bahwa status ataupun kedudukan raja bersifat dinamis. Hal ini dimungkinkan karena kedudukan raja sebagai “pusat” yang bersifat kharismatis, sebagai sumber legitimasi. Seorang yang disenangi raja, walaupun berasal dari kelas rendah, dapat diangkat menjadi pejabat tinggi, dengan segala hak-hak yang melekat pada pangkat tersebut. Demikian pula sebaliknya, seorang pangeran, jika raja menghendaki, dapat dicabut segala hak dan jabatannya. Kedudukan politik dan sosial seluruhnya tergantung pada raja. Begitu pula halnya dengan hak milik. Hak milik bukanlah sesuatu yang melekat pada individu

¹¹⁰ Dalam konsep birokrasi dikenal istilah penguasa tradisional berpasangan dengan penguasa modern dan birokrat patrimonial dengan birokrat rasional. Lihat Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah elite Birokrasi*, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1983), hlm. 11.

tetapi tergantung pada anugrah ataupun amarah raja. Tidak seperti kelas sosial, yang terlepas dari kemampuan pribadi dan kesenangan atau kemarahan raja, maka hak milik dan kedudukan tergantung pada lembaga kerajaan yang kharismatis dan patrimonial.

Ikatan antara atasan dengan priayi bawahan, seperti halnya antara priayi dan rakyat, dikatakan sebagai kelanjutan dari hubungan *kawula gusti* menurut tradisi klasik Jawa atau sering juga disebut dengan hubungan “tuan” dan “hamba” atau “*patron*” dan “*client*”. Ini merupakan suatu ikatan antara perintah dan kepatuhan tanpa syarat, tetapi juga merupakan ikatan yang sangat bersifat pribadi, yaitu saling ketergantungan yang rapat antara dua manusia. Ikatan ini didasarkan atas model hubungan kekeluargaan antara sesama saudara atau antara ayah dan anak, yang dijalin dengan gagasan-gagasan tentang kesatriaian, hubungan guru-murid dalam agama, serta persatuan dalam dunia mistik.¹¹¹ Sekalipun demikian, batas antara atasan dan bawahan ditandai dengan tegas sekali oleh tata cara kepangkatan dan bentuk-bentuk penghormatan yang rumit dan tak dapat dihindari.

Suatu tulisan yang dikutip Sutherland menunjukkan bentuk hubungan “tuan” dan “hamba” tersebut sebagai berikut:

Barang siapa ingin mencapai pangkat tinggi, mulailah dengan mengabdikan kepada seorang terkemuka, kalau dapat kepada seorang pangeran atau seorang perdana menteri, sekurang-kurangnya seorang bupati. Sekali ia masuk bekerja, ia harus beranggapan tidak ada kesulitan yang

¹¹¹ Soemarsaid Moertono, *State Statecraft in Old Java: A Study of the later Mataram period, 16th to 19th century*, (Cornell University, Modern Indonesia project Monograph Series, 1968), hlm. 14-26.

*terlalu besar, atau pekerjaan yang terlalu hina, untuk merebut perhatian tuannya; ia harus selalu memperhatikan perubahan wajah tuannya, dan menyusun jawaban atas pertanyaan sepatutnya, bertujuan untuk senantiasa menyenangkan hati tuannya. Dalam pada itu ia harus selalu ringan tangan dan menyenangkan setiap orang yang dihubungnya. Dengan berlaku demikian, lambat laun ia bukan saja akan memperoleh perhatian dari tuannya tetapi juga mendapat nama yang bagus diantara priayi lainnya. Apabila akhirnya ia berhasil diterima ke dalam kalangan pejabat, ia harus mempertahankan kehormatan pangkat yang diperolehnya, dan melalui perbuatannya membuktikan bahwa dirinya pantas bagi kedudukannya tersebut. Dengan cara demikian dalam jangka panjangnya ia akan naik ke kedudukan yang pantas dan mencapai tingkat tertinggi yang dapat dicapai manusia di dunia ini.*¹¹²

Sekalipun gambaran ini berasal dari kalangan keraton Jawa, namun berlaku juga di daerah lainnya yang dikuasai Belanda. Hubungan disini tidak terletak pada efisiensi melainkan pada hubungan pribadi, agar dirinya disukai oleh atasannya. Kata kuncinya di sini adalah “disukai”; suatu penilaian dan restu yang bersifat subyektif dari atasan merupakan kunci keberhasilan yang sangat penting bagi seorang calon pejabat.

¹¹² Dikutip dari sebuah terjemahan bahasa Belanda dalam arsip Kolonial, VB, 12 Juni 1911, no. 76 dalam buku Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah elite Birokrasi*. (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, t.t).

¹¹³ Lihat Taufik Abdullah, “Kata Pengantar” dalam van Sevenhoven, *Op.Cit.*, hlm. 5-9.

Sebagaimana dikemukakan Taufik Abdullah, dalam laporan Van Sevenhoven menyelipkan “kegembiraan” dari rakyat atas kehadiran Belanda yang telah melakukan usaha “perbaikan”. Van Sevenhoven mengusulkan perlunya sistem pemerintahan yang “adil”- jadi membebaskan rakyat dari “kesewenangan” para penguasa mereka-sistem pajak yang teratur-supaya orang tahu pasti tentang hak dan kewajiban ekonomi mereka-dan penyediaan beberapa sarana ekonomi dan sebagainya.¹¹³

Kehadiran pemerintah kolonial Belanda berperan besar dalam mengubah birokrasi tradisional. Deandels dan Raffles lebih mempercepat proses ini dengan menempatkan para penguasa setempat di bawah bupati yang diawasi langsung oleh pemerintah pusat. Status para pejabat bawahan ini telah diatur dalam hirarki dengan gelar yang disederhanakan.

Pada tahap permulaan menuju perubahan birokratisasi, Belanda berkeyakinan bahwa perlu dipertahankan prestise penguasa setempat terhadap rakyat. Sebab prestise ini merupakan unsur kunci dalam kontrol. Sikap ini didasarkan pada pemikiran bahwa kepatuhan dan kesetiaan yang tinggi dari masyarakat kepada penguasa setempat akan menyebabkan kepatuhan dan kesetiaannya pula terhadap pemerintah yang mengangkat pejabat itu.¹¹⁴

Kebanyakan pejabat Belanda masih yakin bahwa perlu dipertahankan unsur “tradisional”¹¹⁵ untuk memelihara

¹¹⁴ Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa rakyat setia kepada pejabat pribumi dan para pejabat pribumi itu setia kepada Belanda (lihat syarat utama pejabat pribumi harus loyal). Oleh karena itu banyak orang Belanda yang berkedudukan tinggi-mengira bahwa rakyat akan bengkik mempertahankan negara seandainya Jepang menyerbu Hindia Belanda, atau paling tidak, penduduk akan menolak bekerja sama dengan jepang. Dalam hal ini ternyata orang-orang Belanda

kewibawaan penguasa setempat. Oleh karena itu, maka simbol-simbol penguasa tradisional tetap dipertahankan seperti payung emas dan pusaka-pusaka lainnya. Ada sejumlah orang Eropa yang menghendaki dilakukan “modernisasi”. Meskipun mereka pada awalnya masih dalam jumlah kecil, tapi pada awal abad ke 20 pengaruhnya makin lama makin besar terutama melalui pemikiran Snouck Hurgronje dan penasehat-penasehat urusan-urusan pribumi.¹¹⁶

Kelompok yang menganjurkan perubahan berpendapat bahwa perluasan pendidikan dan kemakmuran adalah sangat penting, sebab dengan standar hidup yang lebih baik dan pengetahuan tentang peradaban Barat secukupnya, maka rakyat pribumi bukan saja akan meningkat kesejahteraannya, tetapi juga akan dapat menghargai segala sesuatu yang diciptakan oleh Belanda. Pada tahun 1901 (awal abad XX), sikap seperti ini memperoleh persetujuan resmi pemerintah dengan ditetapkannya apa yang dinamakan kebijakan etis.¹¹⁷

Selama akhir abad XIX dan awal abad XX, beberapa orang residen menggunakan kekuasaannya untuk menggeser hubungan patrimonial menuju hubungan yang rasional dengan mengatur penerimaan dan kenaikan pangkat kepegawaian negeri yang baru.

Pada tahun 1877 M, di Banyumas (Jawa Tengah) ditetapkan suatu sistem yang memungkinkan seseorang untuk

magang dan berpengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun untuk mengikuti ujian dan calon yang memperoleh angka tertinggi diangkat menjadi pangreh praja. Tahun 1900, Residen H.E. Steinmetz dari Tegal membuat suatu peraturan lengkap yang menyangkut soal latihan, pengangkatan dan kenaikan pangkat bagi para priayi di lingkungan karesidenannya. Ia membatasi jumlah magang di berbagai jawatan, menetapkan syarat-syarat pendidikan terendah dan mengadakan “daftar kepangkatan”, di mana tanggal penunjukan dan kemauan semua pejabat dicatat untuk kemungkinan kenaikan pangkat berdasarkan kesenioran.

Pada tahun yang sama, Residen Cirebon menganjurkan agar daftar kepangkatan itu diterapkan secara umum. Hal ini dianjurkan dengan alasan untuk mencegah terjadinya kepangkatan dengan sistem kenaikan sesuka hati, pembentukan klik-klik pribadi dan nepotisme. Pendidikan gaya Barat buat pejabat-pejabat pribumi memang penting, baik sebagai persiapan menuju gaya birokrasi baru maupun sebagai usaha menggerakkan mereka agar lebih erat dengan Batavia dan sikap-sikap orang Eropa.

Pada tahun 1866, pemerintah mendirikan “Sekolah untuk anak-anak para pemimpin pribumi dan kaum pribumi yang kaya” (*hoofden scholen*) di Magelang, Bandung dan Probolinggo. Kemudian sekolah ini mengalami reorganisasi (1900) dan berubah nama menjadi *Opleidingsscholen voor Inlandsche Ambtenaren* (Sekolah Pendidikan bagi para Pejabat Pribumi atau

itu keliru, rakyat menyambut baik kedatangan Jepang, dengan sedikit pengecualian-di daerah yang rakyat banyak di bunuh Jepang-dan segera terbiasa bekerja di bawah tuan yang baru.

¹¹⁶ Penasehat-penasehat berikutnya adalah G.A.J. Hazeu (1906-1912), D.A. Rinkes (1913-1916), R.A. Kern (1920-1922, 1923-1926), E. Gobebe (1926-1928, 1929-1931, 1931-1937) dan G.F. Pijper (1937-1942).

¹¹⁵*Ibid.*, hlm. 250.

¹¹⁷ Dalam tahun 1901 Ratu Wilhelmina secara resmi membuka suatu era kolonial baru, tatkala ia berbicara tentang “kewajiban etis dan tanggung jawab moral” negeri Belanda terhadap Hindia Belanda.

lebih dikenal dengan ASVIA.¹¹⁸ Berbagai usaha perbaikan menuju “rasionalisasi birokrasi” dilakukan oleh pihak Belanda seperti tampak dalam kutipan berikut ini:

Tak terelakkan, pangreh praja terperangkap dalam situasi yang berubah. Insruksi-instruksi baru yang merubah tugas-tugas dari pangkat-pangkat tertentu pun dikeluarkan, buat bupati dan wedana ditetapkan pada tahun 1867, buat wedana lagi tahun 1886 dan buat asisten wedana tahun 1874. Namun yang lebih penting lagi ialah hapusnya hak-hak tradisional atas tanah dan tenaga kerja. Pada tahun 1867 hak jabatan mereka atas tanah akhirnya dicabut. Sedangkan pada tahun 1872 hak untuk meminta tenaga kerja dibatasi dan akhirnya dihapuskan pada tahun 1882. pengetatan menyeluruh atas jaringan kerja administratif mengakibatkan berkurangnya kebebasan pejabat untuk meminta sumbangan “sukarela” dari rakyat pedesaan. Panglima-panglima perang di Jawa yang masih hidup dari upeti rakyatnya, menjadi juru tulis Melayu yang digaji, pengamat-pengamat pertanian dan polisi-polisi kolonial.¹¹⁹

Di awal pemerintahan Belanda di Banjar dikeluarkan Keputusan Residen Borneo No. 32 tahun 1823 yang mengatur tentang pengadilan agama di Banjarmasin. Dalam aturan tersebut ditentukan bahwa jumlah anggota mahkamah empat orang khatib dan naik banding tidak lagi kepada sultan, tapi kepada residen.

Mengeai gaji mereka ditetapkan, hanya disebutkan tetap seperti adat Melayu.¹²⁰

Pengaturan pejabat agama secara lebih meluas, ditetapkan pada tahun 1832 M melalui *Beslit* Residen tanggal 15 Maret 1832 M. Dalam *beslit* tersebut diatur struktur, prosedur pengangkatan, tugas dan wewenang, tanda jabatan dan penghasilan penghulu.¹²¹

Prosedur pengangkatan penghulu menjadi lebih jelas dengan ditetapkannya Keputusan Residen Borneo tanggal 20 April 1832 No. 43.¹²² Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa: Pangeran Penghulu Nata Agama diangkat oleh gubernemen di batavia atas pilihan residen. Jabatan khatib penghulu dan khatib imam dipilih oleh masyarakat. Untuk kelompok masyarakat Arab dipilih diantara mereka sendiri, demikian pula untuk masyarakat Melayu. Hasil pemilihan tersebut diajukan oleh Pangeran Penghulu Nata Agama kepada residen. Kemudian residen mendengarkan pula pendapat *ambtenar* melayu dalam hal ini demang¹²³ tentang kebaikan dan kelemahan calon tersebut. Bila residen berkenan, lalu ditetapkan calon penghulu itu menjadi khatib penghulu atau khatib imam; jabatan modin dan marbot diangkat dari orang yang dipilih oleh Pangeran Penghulu Nata Agama dengan mendengarkan suara *Ambtenar* Melayu dan kemudian ditetapkan oleh residen. Bilal dipilih oleh orang kampung, di muka kepala polisi dan disetujui oleh Pangeran Penghulu Nata Agama, lalu kemudian ditetapkan oleh residen.

¹¹⁸ Lihat de Kat Angelino, *Staatkundig Beleid*, Jilid III, hlm. 82-83 dan lihat pula R.Kadarman, “De Geschiedenis van de Opleidig van het Inheemsch Bestuur” dalam *Gedenkboek 1928-1938, Verreeniging van Ambtenaren bij den Inlandschen Bestuur-dients*, (Batavia: 1938), hlm. 48-59.

¹¹⁹ Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1983), hlm. 51-52.

¹²⁰ *Adatrechtbundels*, 's-ravenhage, Martinus Nijhoff, 27, 1928, hlm. 447.

¹²¹ *Adatrechtbundels*, 12, 1916, hlm. 198-2002.

Prosedur tersebut tampaknya sedikit berbeda dengan pengangkatan penghulu dan pejabat agama di Jawa dan Madura. Di Jawa dibedakan antara penghulu landraad dan penghulu masjid. Untuk penghulu landraad wewenang pengangkatannya berada pada residen, sedangkan untuk penghulu masjid wewenangnya ada pada bupati. Walaupun demikian untuk pengangkatan penghulu landraad masih didasarkan usul bupati.¹²⁴

Suatu hal yang cukup menarik dari Beslit No. 43 tahun 1832 tersebut adalah tentang tugas penghulu membuat laporan berkala secara bertingkat sampai kepada Residen. Laporan tersebut memuat pencatatan perkawinan yang dikutip dari buku kawin. Khatib di ibukota Banjarasin membuat buku catatan orang kawin di wilayahnya dan melaporkannya sebulan sekali kepada khatib penghulu. Khatib penghulu membuat laporan yang sama kepada *hoofdpenghulu* berdasarkan laporan para khatib sebulan sekali. Untuk daerah uluan, khatib membuat laporan tahunan sebulan sekali kepada lebai penghulu dan lebai penghulu membuat laporan tahunan kepada *hoofd penghulu*. *Hoofd penghulu* kemudian membuat laporan kepada Residen.

Di samping laporan buku kawin yang dibuat secara berkala, penghulu juga melaporkan perceraian dan rujuk serta perkara-perkara lain di bidang agama. Mekanisme dan sistem laporan tersebut menuntut kemampuan administrasi bagi para penghulu. Oleh karena itu, maka dalam beslit residen tersebut dianjurkan agar calon seorang penghulu dapat membaca dan

menulis. Hal yang sama ditemukan dalam *Undang-Undang Simbur Cahaya*. Oleh karena itu tidak heran bila Snouck Hurgronje melalui kantor *voor Inlandsche Zaken* mensyaratkan seorang penghulu haruslah yang bisa membaca dan menulis huruf latin.

Adanya suasana politik yang memberi peluang besar terhadap posisi dan peran ulama dalam kerajaan Banjar, telah dimanfaatkan dengan baik oleh kaum ulama, sebab pemberlakuan syariat Islam bisa efektif hanya dengan kekuasaan. Sebab menurut Ibnu Chaldun, manusia adalah *hayawan al-siyasi*¹²⁵, mempunyai naluri berpolitik, yang membedakan hanyalah intensitas interaksi dengan lingkungan. Ulama Banjar pada akhir abad ke-18, bisa dikatakan mempunyai kesadaran politik yang tinggi. Menurut penyelidikan Steenbrink terhadap kitab *Sabil al-Muhtadin* yang nota bene kitab *Undang-undang kerajaan*, ternyata tidak membicarakan sama sekali persoalan dasar negara atau persoalan sosial politik lainnya. Kebanyakan yang ada hanya soal ibadah.¹²⁶

Hal ini barangkali yang menyebabkan ulama Banjar pada umumnya menganut paham *Sunni (ahl al-Sunnah wal al-jama'ah)*, yang mempunyai pemikiran politik cenderung tidak terikat kepada format atau bentuk negara, melainkan pada substansi bernegaranya. Kaum sunni tak peduli apakah pemerintahan itu berbentuk teokrasi atau monarki, yang penting di dalamnya ada supremasi syariat dan prinsip kenegaraan seperti

¹²³ Jabatan Demang merupakan jabatan tertinggi yang dicapai oleh pegawai pribumi di Palembang setelah jabatan *rijkbestuurder* dihapuskan. Lihat Snouck Hurgronje, *Ambtelijke Adviezen*, Jilid I, 1957, hlm. 792.

¹²² *Adatrechtbundels*, 12, 1916, hlm. 200-2002.

¹²⁴ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 85.

¹²⁶ Karel A. Steenbrink, "Metodologi Studi Sejarah Islam di Indonesia Beberapa Catatan dari Praktek Penyelidikan Tentang Abad ke-19", dalam Mu'in Umar dkk. (Ed.), *Penulisan Sejarah Islam di Indonesia dalam Sorotan*, (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), hlm. 9.

¹²⁵ Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam*, 5 Jilid, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), Jilid 1, hlm. 40.

keadilan, persamaan, musyawarah dan sebagainya. Rupanya Raja/Sultan Tahmidullah II sudah termasuk kriteria dimaksud sehingga patut didukung oleh kaum ulama. Ini terbukti dengan pujian Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa Tahmidullah II adalah seorang Raja yang tinggi cita-citanya, cerdas, pandai berbicara dengan *Petah* (ramah dan lembut), mempunyai pikiran yang bersih dan ilmu pengetahuan yang dalam. Dialah yang menguasai Negeri Banjar, yang selalu berusaha memperbaiki urusan agama dan dunia, pemimpin yang besar dan ikutan yang mulia.¹²⁷ Atau dalam ungkapan al-Mawardi, Tahmidullah II telah memenuhi syarat sebagai imam yang menjalankan tugas pokok, yaitu memelihara agama dan menyanggarakan kepentingan umum.¹²⁸

Kemudian wujud peluang politik ulama itu adalah terciptanya semacam lembaga pengadilan yang dikenal dengan *Mahkamah Syariah*, yaitu lembaga pengadilan agama yang dipimpin oleh seorang Mufti sebagai penguasa tertinggi dalam bidang hukum sesudah Sultan, dan sebagai ketua hakim tertinggi pengawas pengadilan umum yang bertanggung jawab terhadap jalannya lembaga-lembaga kehakiman. Lembaga ini mengurus masalah keagamaan yang timbul dalam masyarakat, agar senantiasa terpimpin kepada kebenaran hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Mufti didampingi oleh seorang *Kadi* yang berfungsi sebagai pelaksana hukum dan mengatur jalannya pengadilan seperti soal nikah, talak, rujuk,

pembagian harta warisan dan sebagainya,¹²⁹ bahkan terkadang mengurus perkara yang lebih luas dari itu¹³⁰ atau jelasnya mengatur masalah hampir secara keseluruhan aspek keagamaan dalam wilayah kerajaan.

Jabatan Mufti dipercayakan kepada ulama yang tidak sembarang ulama. Snouck Hurgronje mengatakan bahwa jabatan Mufti di Banjarmasin sejak dulu sangat dihormati dan hanya ulama yang paling pandai dan berbakat saja yang bisa diangkat menjadi Mufti, sehingga sangat dipercaya oleh rakyat di sana.¹³¹ Jabatan Mufti tampak sekaligus merupakan jabatan dan gelar kehormatan. Selain itu, Mufti juga merangkap jabatan dalam Dewan Mahkota yang turut serta menentukan kebijaksanaan yang ditempuh oleh Raja dan kerajaan bersama-sama kaum bangsawan dan Mangkubumi.

Namun dalam sistem kekuasaan Kerajaan/Kesultanan Banjar ada ulama yang berada di luar sistem tersebut sebagai tokoh masyarakat, sebagaimana menurut Taufik Abdullah sebagai ulama bebas,¹³² yang lebih ditentukan oleh persyaratan kemampuan diri yang mempunyai pengaruh spiritual mendalam karena keahliannya dalam ilmu agama dan ketekunan/keshalehan melaksanakan ajaran agama sehingga mempunyai *karamah* yang diberikan Tuhan kepada seorang ulama yang mempunyai semangat pengabdian terhadap masyarakat, terutama dalam penyebaran pendidikan melalui langgar, madrasah, rumah dan

¹²⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Cet. III, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973), hlm. 5.

¹²⁷ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadin li al-Tafaquh fi Amr al-Din*, (Mesir: Darun Ahya, Cet. III, tth.), hlm. 3.

¹³⁰ Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 85.

¹²⁹ Yusuf Halidi, *Ulama Besar Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, (Banjarmasin: Aulia, 1968), hlm. 40.

¹³¹ *Ibid.*, hlm 85-86

tempat-tempat pendidikan lainnya,¹³³ sehingga sangat disegani masyarakat.

Sebagaimana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang berasal dari status sosial yang tinggi, semakin tinggi saja wibawa dan pengaruhnya di tengah masyarakat. Beliau menjadi dibutuhkan tidak saja sebagai pelindung spiritual tapi juga pelindung sosial dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Beliau adalah teladan dan panutan yang ditaati dengan sepenuh hati karena bagi masyarakat hidup dan adanya Beliau jadi keuntungan, mati dan tiada mereka berarti musibah.¹³⁴

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai Ulama Banjar yang menjadi tokoh masyarakat lebih berorientasi pada gerakan kemasyarakatan daripada orientasi kekuasaan. Sebagai Ulama Banjar berupaya mengadakan perubahan dalam masyarakat tidak hanya melalui kekuasaan, namun melalui jalur kultural yang dukungan dari bawah untuk keberhasilan perubahan. Apalagi pada abad XIX pemahaman masyarakat Banjar terhadap masih rendah, terutama daerah pedalaman bahkan terkadang masih bercampur ajaran pra-Islam.

Jadi faktor interaksi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai ulama dan raja/sultan adalah lebih pada “*faktorkepentingan*” masing-masing, ulama membutuhkan situasi yang kondusif dalam mengembangkan misi dakwah, sedangkan raja/sultan membutuhkan penguatan legitimasi kekuasaannya. Sekalipun dalam hubungan ini terjadi dinamika karena persepsi dan kepentingan dalam memperebutkan/mempertahankan

¹³³ Masyhur Amin, “Kedudukan Kelompok Elit Aceh Dalam Perspektif Sejarah,” dalam Alfian, Ed. *Kelompok Elite dan Hubungan Sosial di Pedesaan*, (Jakarta: Pustaka Grafika Kita, 1988), hlm. 20.

kekuasaan di lingkungan elite Kerajaan/Kesultanan Banjar. Antara Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai ulama sendiri bisa terjadi perbedaan dalam menyikapi dan melaksanakan strategi dakwah dalam masyarakat di mana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari lebih menitik beratkan pada pendekatan dengan kekuasaan dan kultural, Namun perlu dicatat pula faktor interaktif lainnya adalah adanya kolonial Belanda yang karena kepentingannya ikut pula mempengaruhi terjadinya hubungan raja/sultan dengan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai ulama di tengah dinamika kekuasaan Kerajaan/Kesultanan Banjar pada abad XIX sebagaimana contoh dalam pada peristiwa *Perang Banjar*, *Perang fisabillah Baratib Baamal* dan peristiwa lainnya.

Bab V Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pergulatan politik kerajaan Banjar, hal ini dapat dibuktikan betapa beliau dapat memberikan pengaruh terhadap sistem pemerintahan dengan terbukti dapat

¹³² Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat Pantulan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 66.

¹³⁴ Abu Bakar Muhammad Ibnu Husain bin Abdullah Al-Ajiry, *Budi Pekerti Ulama*, Terj. Drs. Aly As’ad, (Kudus: Menara Kudus, 1978), hlm. 1.

melahirkan undang-undang Kerajaan yang berdasarkan syariah Islam.

2. Sebagai ulama yang cukup luas pengetahuannya terbukti dengan banyaknya karya Beliau, di samping beliau status dan kedudukan sosial di dalam masyarakat maupun di pemerintahan Kerajaan.

3. Antara Seykh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Raja mempunyai hubungan yang mutual simbiosis dalam masyarakat dan pemerintahan Kerajaan Banjar.

B. Saran-Saran

1. Betapa dalam menjalankan strategis dakwah Islam Syekh Muhammad Arsyad al- Banjari penuh strategis yang bijaksana dan penuh perhitungan ke depan sehingga menjadi contoh dan tauladan bagi generasi seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

A,A. Cense, *De Kroniek Van Banjarmasin*, Poefschriff, CA. Mess Santpoort(NH),

Abu Daudi, Maulana Sekh Moh. Arsyad al-Banjari Pelopor Dakwah Islam di Kalimantan Selatan, "*Mimbar Ulama*", (Vol 6, 1976)

Abd Rahman Shiddiq *Syajaratul Arsyadiyah*, Mathba'ah Ahmadiyah Singapura, (Tuan Guru Sapat, Mufti Kesultanan Indragiri) Cetakan I. Tahun 1356 H.

2. Bahwa perjuangan untuk menyebarkan agama Islam tidak pernah berhenti sesuai dengan perkembangan Zaman.

Penutup

Demikianlah penelitian ini ditulis semoga ada manfaatnya, hanya kepada Allah peneliti menyerahkan segalanya. Wallahu 'alamu bissawab. Amin.

Banjarmasin, 12 Nopember 2013

Peneliti yang Fakir
Dr. Ahmad Suriadi, MA

A, Samad Ahmad, *Sulalatin al-Salatin*, (Kuala Lumpur :Dewan Pustakan Dan Kementerian Pelajaran Malaysia, 1984)

Al Ghazali, *Al-Tibr al-Masbuk fi al-Nashihah al-muluk* (Kairo TP. 1327 H),

Al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyah* (Mesir : Musthafa al Baby al-Halaby, 1973)

Azyumardi Azra, *The Transmission of Islamic Reformation to Indonesia : Networks of Middle Estern and Malay-Indonesian Ulama in The Seventeenth and Eighteenth Centuries*. Dan diterjemahkan Beliau sendiri dengan Judul : Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII-XVIII (Bandung : Mizan, 1988),

Arsip Nasional Republik Indonesia, Bandjermasin (Sultanate), Surat-surat perdjandjian antara Kesultanan Bandjermasin dengan pemerintahan V.O.C.: Bataafse Republik, Inggeris dan Hindia- Belanda 1635-1860, Arsip Nasional Republik Indonesia, Kompartimen Perhubungan dengan Rakjat 1965
Amir Hasan Kiai Bondan, Suluh Sedjarah Kalimantan

Hermanus Johannes de Graaf, Puncak kekuasaan Mataram: politik ekspansi Sultan Agung, Grafitipers, 1986

J.J. Ras, *Hikayat Banjar : A Study in Malay Historiography*, (Martinus Nijhoff : The Hague, 1968)

Idwar Shaleh, *Papper Trade and the Rulling Class of Banjarmasin in the Seventeenth Century*, (Leiden : Ducth-Indonesian Historical Conference, 1978).

Milner AC, *Islam and Malay Kingship*, (JRAS, 1981)

M.B. Hooker (ed), *Islam in South East Asia*, (Leiden : Brill 1978),

Hasan Muarif Ambary, *Dinamika Sejarah dan Sosialisasi Islam di Asia Tenggara Abad 11-17 M*, (Jakarta : Depdukbud, 1997)

Nabilah Lubis, *Syek Yusuf al-Taj al Makasari, menyingkap intisari Segala Rahasia* (Bandung : Mizan, 1977) cet-2, hlm. 95-99

Selo Sumardjan dan Suliaman Soemardi : *Setangkai Bunga Sosialogi*, Edisi I (Jakarta : Yayaysan Penerbit Fakultas Ekonomi, 1964),

Roucek dan Warren, *Sociology : An Introduction* (litttlefield : Adam & Co. Patterson-New Jersey, 1962)

Ralp Linton, *The Study Of Man an Introduction* (New York : Appleton Century. 1959)
Karl Mannheim. *Freedom, Power and Democratic Planning* (Chicago : Chicago University Press, 1950).

Ralph Schroeder, *Max Weber and The Sociology of Culture* (London : Sage Publication, 1979)

Koentjaraningrat (ed) *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta : Gramedia 1977)

Jusuf Halidi, *Ulama Besar Kalimantan : Sech Muhammad Arsyad al-Banjari*, (Martapura : Yayasan al-Banjari, 1968).

Johannes Jacobus (1990). *Hikayat Banjarditerjemahkan oleh Siti Hawa Salleh*. Malaysia: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka. ISBN9789836212405.ISBN 983621240X

Tamar Djaja, *Sjeh M. Arsyad al Banjari, dalam Puistaka Indoensia*. (Djakarta : Bulan Bintang, 1965)

Shagir Abdullah, *Syekh Muh. Arsyad al-Banjari, Matahari Islam*, (Pontianak : al Fathanah, 1983).

Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indoensia Baru : 1500-1900 dari Emperiom sampai Imerium*, Jilid I (Jakarta : Gramedia, 1987)

Sudrajat, A. Suryana (2006). *Ulama pejuang dan ulama petualang: belajar kearifan dari Negeri Atas Angin*. Erlangga. hlm. 77. ISBN9797816079.ISBN 9789797816070

van Rees, Willem Adriaan (1865). *De bandjermasinsche krijg van 1859-1863: met portretten, platen en een terreinkaart*1. D. A. Thieme.

Willem Adriaan (1865). *De bandjermasinsche krijg van 1859-1863*. D. A. Thieme.

B. Internit

<http://library.utm.my/~melakakoleksi%20melakasejarahmn2008.pdf>
(online), diakses tanggal 16 April 2013.

<http://www.al-khilafah.org/2011/06/kesultanan-banjar-bagian-khilafah-yang.html> (online), diakses tanggal 15 April 2013

<http://banuahunjungtanah.wordpress.com/category/sejarah-banjar/> (online),
diakses tanggal 15 April 2013

Khairuzzaini. 2011. *Islamisasi Kerajaan Banjar (analisis hubungan Kerajaan Demak dengan Kerajaan Banjar atas masuknya islam di Kalimantan*

Selatan). Tesis (<http://digilib.uin-suka.ac.id/69011BAB%20I%2CV.pdf>) (online).
Diakses tanggal 16 April 2013

<http://kadahakunjua.blogspot.com/2009/02/cikal-bakal-kerajaan-banjar-di.html>(online) diakses tanggal 16 April 2013

https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Banjar(online) diakses tanggal 16 April 2013